LAPORAN TAHUNAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
TAHUN 2025

JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
TELEPON: 0274 385192

Daftar Isi

Daftar Isi *i*

Kata Pengantar *ii*

Ikhtisar Utama *ii*

I. Laporan Manajemen *1*

Laporan Direksi *1*

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris *7*

II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif *13*

III. Kepemilikan *19*

IV. Perkembangan Usaha *20*

V. Analisis dan Pembahasan Manajemen *25*

VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia *34*

VII. Laporan Keuangan Tahunan *50*

VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik *60*

Surat Pernyataan Kebenaran Laporan Keuangan Tahunan *61*

IX. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola *62*

Kata Pengantar

Laporan Tahunan 2025 ini merupakan dokumen komprehensif yang menampilkan kinerja PT BPR Chandra Muktiartha selama satu tahun, mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Dokumen ini mencakup Laporan Keuangan Tahunan serta data umum Bank, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Tahun 2025 menandai fase penuh tantangan bagi industri perbankan, termasuk bagi PT BPR Chandra Muktiartha. Meski begitu, perusahaan ini berhasil melewati periode tersebut dengan cukup baik.

Secara kinerja keuangan, Perseroan mencatatkan pertumbuhan total aset sebesar -15.01%. Penyaluran Kredit Yang Diberikan (KYD) mengalami penurunan sebesar -25.61%, yang menunjukkan upaya ekspansi kredit perlu perhatian khusus. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan tabungan meningkat sebesar 11.15% dan deposito turun sebesar -19.91%.

Permodalan Perseroan berada pada tingkat yang memadai, terlihat dari penurunan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 1.17% dari 15.31% menjadi 14.14%. Laba tahun berjalan juga menunjukkan penurunan -2.28% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sudut pandang kualitas aset, rasio kredit bermasalah (Non- Performing Loan/ NPL) menunjukkan kenaikan sebesar 15.31% dari tahun 2024 sebesar 25.31 %menjadi 40.62% per 31 Desember 2025. NPL masih memerlukan perhatian khusus agar secara bertahap dapat diturunkan ke tingkat yang lebih sehat sesuai ketentuan regulator.

Perseroan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dinamis dengan melaksanakan langkah strategis guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. *(Good Corporate Governance)*, memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menegakkan efektivitas manajemen risiko, serta mempraktikkan prinsip kehati- hatian dalam perbankan prudensial *(prudential banking)*. PT BPR Chandra Muktiartha juga terus merangsang inovasi, menambah efisiensi operasional, dan memperkuat kolaborasi di semua lini organisasi untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan.

Semua langkah strategis yang diambil ditujukan untuk memaksimalkan peluang yang tersedia, mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, dan menambah nilai bagi seluruh pemangku kepentingan PT BPR Chandra Muktiartha.

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Laporan Ikhtisar Keuangan — 2025

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Pendapatan Operasional	**Rp 42.961.265.971**
Beban Operasional	**Rp 40.990.275.307**
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**Rp 1.637.497.017**

Rasio Keuangan

KPMM **14,14%**	NPL Neto **34,63%**	NPL Gross **40,62%**	ROA **0,54%**
BOPO **95,43%**	NIM **3,60%**	LDR **85,97%**	Cash Ratio **8,61%**

I. Laporan Manajemen

1. Laporan Direksi

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya, sehingga PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA berhasil melalui tahun 2025 yang terus berkembang dinamis dan penuh ketidakpastian dengan pertumbuhan dan kinerja yang cukup baik. Pencapaian ini sejalan dengan visi dan misi BPR CHANDRA MUKTIARTHA untuk menyediakan solusi perbankan bagi masyarakat khususnya nasabah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendorong sektor usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Strategi dan Kebijakan Strategis BPR

Sepanjang 2025, BPR CHANDRA MUKTIARTHA tetap optimis namun berhati- hati dalam meningkatkan portofolio pinjaman sejalan dengan dinamika lingkungan usaha. Kami senantiasa disiplin dalam melakukan ekspansi kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank di tengah kondisi tantangan Industri BPR yang mengalami penurunan kualitas kredit.

Dalam mendukung pertumbuhan, BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga memperkuat penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui peningkatan kepuasaan nasabah, keunggulan dan inovasi produk dan optimalisasi program marketing dana. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas melalui peningkatan kompetensi di bidang pemasaran dan analisis kredit, layanan prima serta manajemen risiko. BPR CHANDRA MUKTIARTHA terus memperkuat penerapan tata kelola (GCG), kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan pemahaman terhadap model bisnis calon debitur yang hendak diakuisisi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan usaha BPR Digital tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan strategis BPR CHANDRA MUKTIARTHA pada tahun 2025 difokuskan pada pencapaian pertumbuhan yang berkualitas *(quality growth),* memperluas basis nasabah dan penetrasi pasar secara selektif, menjaga rasio kredit bermasalah pada level yang terkendali, peningkatan efisiensi operasional melalui optimalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi, serta penguatan daya saing melalui inovasi produk dan layanan prima. BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga tetap mengedepankan prinsip kehati- hatian dan memperkuat tata kelola perusahaan dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator.

Direksi memainkan peran sentral dalam membentuk strategi dan kebijakan BPR CHANDRA MUKTIARTHA untuk memastikan keselarasan dengan Visi dan Misi Bank. Direksi menetapkan arah strategis yang jelas dan berkolaborasi dengan semua unit bisnis untuk mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif, serta didukung oleh perangkat pendukung utama seperti kepegawaian, teknologi, infrastruktur, dan manajemen risiko. Implementasi strategi dipantau melalui monitoring berkala dan komunikasi berkelanjutan dengan unit kerja bisnis, fungsi pendukung, cabang, dan kantor kas. Penyesuaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar. Direksi juga mendorong budaya dan nilai-nilai perusahaan untuk memperkuat kerja sama tim dan memastikan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang efektif.

Pada tahun 2025, total portofolio pinjaman turun sebesar -25.61% tetapi kami optimis bahwa pertumbuhan kredit dan skala usaha BPR CHANDRA MUKTIARTHA dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui penerapan strategi yang tepat sasaran melalui eksekusi bisinis yang disiplin**.**

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sepanjang tahun buku 2025, PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA menunjukkan kinerja profitabilitas yang cukup baik. Hal ini tercermin dari pencapaian rasio keuangan utama, yaitu *Return on Assets* (ROA) sebesar 0,54% dan *Return on Equity* (ROE) sebesar 4,77%. Pertumbuhan kredit sebesar -25,61%, *Non- Performing Loan* (NPL) *Gross* sebesar 40,62%. Dari sisi efisiensi operasional, BPR CHANDRA MUKTIARTHA berhasil mengendalikan biaya dengan baik, sebagaimana tercermin pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 95,43%.

Pada akhir tahun 2025, PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga berhasil memenuhi dan melampaui sebagian besar target keuangan utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan kinerja manajemen yang solid dalam mengeksekusi strategi bisnis secara disiplin, serta kemampuan BPR CHANDRA MUKTIARTHA beradaptasi dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

Indikator Keuangan	Target 2025	Realisasi
Pertumbuhan Kredit	2,23%	(25,61%)
NPL *(Gross)*	5,00%	40,62%
NPL *(Net)*	2,55%	34,63%
BOPO	83,20%	95,43%
Return on Asset (ROA)	2,16%	0,54%
Return on Equity (ROE)	19,34%	4,77%

Kendala, Tantangan dan Antisipasinya

Sepanjang tahun 2025, BPR CHANDRA MUKTIARTHA masih menghadapi dinamika perekonomian global, domestik dan regional serta Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandai oleh ketidakpastian kebijakan moneter, serta meningkatnya persaingan likuiditas dan iklim usaha yang belum kondusif. Dalam kondisi tersebut, BPR CHANDRA MUKTIARTHA memfokuskan strategi penyaluran kredit pada pertumbuhan yang berkualitas melalui pendalaman ekosistem bisnis, penguatan disiplin risiko, serta optimalisasi kapabilitas yang telah dibangun pada periode sebelumnya.

Sebagai langkah antisipasi, BPR CHANDRA MUKTIARTHA menjalankan beberapa inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penyempurnaan *end-to-end credit process* dengan melakukan perbaikan seluruh rangkaian proses kredit dari awal sampai selesai, mulai dari calon debitur mengajukan pinjaman hingga kredit tersebut lunas atau ditutup. untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit melalui penguatan manajemen risiko dan penerapan disiplin risiko yang konsisten di seluruh segmen.
2. Meningkatkan kualitas kredit eksisting dengan melakukan monitoring kredit yang ketat serta melakukan penanganan dini terhadap potensi kredit bermasalah.
3. Meningkat marketing funding untuk pertumbuhan DPK dalam rangka menopang ekspansi kredit, mempertebal NIM *(Net Interest Margin)* serta memperkuat likuiditas BPR CHANDRA MUKTIARTHA.
4. Pengembangan Kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pegawai dan direksi mengikuti pelatihan teknis perbankan dan seminar yang relevan dengan ekonomi dan perbankan
5. Peningkatan Kepatuhan dan Tata Kelola dengan memastikan seluruh kebijakan dan prosedur telah selaras dengan regulasi yang berlaku serta memperkuat fungsi pengawasan internal.

Penerapan Tata Kelola

Pada tahun 2025 BPR CHANDRA MUKTIARTHA menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) secara konsisten sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan GCG diarahkan untuk memastikan pengelolaan Perseroan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar.

Direksi menjalankan fungsi pengelolaan operasional secara efektif dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja Perseroan, sementara Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara independen guna memastikan kebijakan dan strategi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mendukung hal tersebut, BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga memperkuat fungsi pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil *Self Assessment* terhadap 12 Faktor Penerapan Tata Kelola berada pada **Peringkat Komposit 2 (Baik).** Hal ini menunjukan Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip

tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR CHANDRA MUKTIARTHA berupaya menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Penerapan Manajemen Risiko

BPR CHANDRA MUKTIARTHA menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha. Penerapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan prinsip kehati- hatian (*prudential banking*) dan ketentuan regulator.

Manajemen risiko di BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencakup seluruh jenis risiko utama, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan, risiko . Dalam implementasinya, BPR CHANDRA MUKTIARTHA mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas pengendalian risiko yang selaras dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Untuk mendukung hal tersebut, BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga memperkuat fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk melalui penerapan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) serta pemantauan profil risiko secara berkala.

Dalam pengelolaan risiko kredit, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses analisis kredit yang komprehensif, pemantauan kualitas aset, serta upaya penanganan dini terhadap potensi kredit bermasalah. Sementara itu, dalam pengelolaan risiko operasional, BPR CHANDRA MUKTIARTHA terus meningkatkan efektivitas sistem dan prosedur kerja guna meminimalkan potensi kesalahan dan gangguan operasional. Sedangakan dari sisi mitigasi risiko kepatuhan, BPR CHANDRA MUKTIARTHA tunduk pada regulasi OJK, memenuhi kewajiban pelaporan dan komitmen yang telah dibuat dengan OJK.

Hasil Penilaian Profil Risiko pada Semester II 2025 menunjukkan bahwa Profil Risiko BPR CHANDRA MUKTIARTHA termasuk dalam **peringkat 3 (sedang**) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.

2. Rata- rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan, BPR CHANDRA MUKTIARTHA optimis dapat menjaga kinerja yang sehat, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Tingkat Kesehatan Bank

Bank Chandra Muktiartha secara rutin melakukan penilaian terhadap risiko dan kinerja Bank melalui pelaksanaan *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko *(Risk-Based Bank Rating)* dan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko *(risk profile)* , penerapan tata kelola *(good corporate governance),* rentabilitas *(earning)* dan permodalan *(capital).*

Self-Assessment TKB dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 3/ POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dan Surat Edaran OJK No. 11/ SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, dengan hasil akhir berupa Peringkat Komposit (PK).

Hasil *Self-Assessment* Tingkat Kesehatan BPR CHANDRA MUKTIARTHA secara Individu posisi 31 Desember 2025 berada pada **Peringkat Komposit 3 (PK-3).** Hal ini mencerminkan BPR Chandra Muktiartha secara umum Cukup Sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis, faktor intern dan faktor eksternal, tercermin dari faktor-faktor penilaian Profil Risiko (peringkat 3), Penerapan Tata Kelola (peringkat 2), Rentabilitas (peringkat 4) dan Permodalan (peringkat 4). Terdapat kelemahan baik dari faktor intern maupun faktor ekstern namun kelemahan tersebut masih dapat diatasi oleh BPR dan BPR akan berusaha memperbaiki supaya menjadi lebih baik lagi.

Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

BPR CHANDRA MUKTIARTHA melaksanakan sistem pengendalian internal dalam proses Pelaporan Keuangan Bank untuk meningkatkan integritas pelaporan keuangan Bank sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No. 15 Tahun 2024. Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan BPR CHANDRA MUKTIARTHA bertujuan untuk : (1) memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; (2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; (3) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan (4) Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan (PIPKu) dilaksanakan agar Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan semakin berintegritas. Terselenggaranya sistem

pengendalian internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab Direksi. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko *(risk awareness)* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi serta melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan pasal 8 ayat (3) POJK No. 15 Tahun 2024.

BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga telah menyusun Laporan PIPKu Tahun 2025 dan melaporkannya ke OJK sebagai bagian dari Laporan Tahunan 2025. Laporan PIPKu BPR CHANDRA MUKTIARTHA dimaksud memuat:

1. Laporan Pengujian Atas Pos-pos pada Laporan Keuangan apakah sudah wajar dan dicatat sesuai dengan POJK yang mengatur tentang Pencatatan Transaksi dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)
2. *Self Assessment* Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank menggunakan 5 Komponen COSO dalam ICoFR *(Internal Control over Financial Reporting)* yaitu penilaian sendiri *(self assessment)* terhadap 5 (lima) komponen pengendalian COSO *(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)* yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Aktivitas Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan.

Apresiasi dan Penutup

Direksi BPR CHANDRA MUKTIARTHA menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan, arahan, dan pengawasan yang diberikan dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham dan nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan, yang memungkinkan BPR CHANDRA MUKTIARTHA untuk terus tumbuh secara signifikan dan berkelanjutan, serta mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang solid di tengah tantangan dan ketidakpastian. Kami juga berterima kasih kepada regulator serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik sepanjang 2025.

Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja kerasnya, yang memungkinkan BPR CHANDRA MUKTIARTHA untuk terus berkembang dan mewujudkan visi serta misi yang kita emban bersama. Kinerja baik pada tahun 2025 menjadi landasan bagi pencapaian yang semakin kokoh di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kepada seluruh nasabah dan mitra kerja, merupakan suatu kebanggaan bagi kami, keluarga besar PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA, untuk senantiasa dapat melayani serta memenuhi harapan Anda. BPR CHANDRA MUKTIARTHA berkomitmen untuk terus menyediakan produk dan layanan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit, yang selaras dengan perkembangan skala usaha serta memenuhi pembiyaan untuk kebutuhan konsumtif nasabah.

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Kepada Pemegang Saham serta Para Pemangku Kepentingan yang kami hargai,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pengawasan atas pengelolaan Bank untuk tahun buku 2025. Di tengah kondisi ekonomi dan dunia usaha yang belum kondusif, BPR Chandra Muktiartha cukup mampu menjaga ketahanan kinerja dan stabilitas usaha melalui disiplin eksekusi strategi serta pengelolaan risiko yang pruden.

Laporan Dewan Komisaris mencakup penilaian atas kinerja Direksi dalam mengelola perusahaan serta pengawasan terhadap perumusan dan pelaksanaan strategi oleh Direksi; pandangan atas prospek usaha BPR Chandra Muktiartha; dan pengawasan penerapan tata kelola perusahaan serta kinerja struktur organ tata kelola.

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Pada tahun buku 2025, Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan terhadap Direksi, antara lain:

1. Memonitor pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), menilai pencapaian kinerja keuangan serta operasional, dan memberikan arahan strategis guna pengembangan usaha
2. Pengawasan atas penerapan Tata Kelola (GCG) dilakukan dengan memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran diterapkan, serta menilai sejauh mana fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko dilaksanakan secara efektif.
3. Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko, meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan, sekaligus menilai secara berkala laporan profil risiko BPR Chandra Muktiartha.
4. Pengawasan atas Sistem Pengendalian Internal meliputi pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank, menilai kelengkapan sistem pengendalian internal *(internal control)* serta memantau tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal sampai selesai secara menyeluruh
5. Menjamin kesesuaian dengan peraturan serta pelaksanaan kewajiban kepatuhan *(comply with)* pembuatan laporan memenuhi semua ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penyelesaian setiap komitmen yang diambil BPR bersama regulator.

Frekuensi serta Cara Rapat

Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris PT BPR Chandra Muktiartha secara rutin mengadakan rapat sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan proses pengurusan Perseroan.

Selama periode tersebut, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 5 **(lima) kali Rapat Dewan Komisaris**. Selain itu, dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Direksi,

telah diadakan 4 **(empat) kali Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi**.

Rapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan agenda yang meliputi evaluasi kinerja, pembahasan strategi bisnis, pengawasan penerapan tata kelola, serta pemantauan profil risiko Perseroan.

Dewan Komisaris menilai pelaksanaan rapat sepanjang tahun 2025 berlangsung cukup efektif, rapat dilaksanakan secara berkelanjutan, pembahasan agenda yang komprehensif dan relevan dengan kondisi Perseroan, pencapaian pengambilan keputusan tepat waktu dan berkualitas, serta tindak lanjut memadai atas setiap rekomendasi dan hasil rapat.

Dengan demikian, rapat Dewan Komisaris berfungsi secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT BPR Chandra Muktiartha.

Agenda rapat mencakup:

1. Menilai kembali performa keuangan serta operasional
2. Analisis dan evaluasi atas laporan audit dan kinerja BPR
3. Pengawasan risiko serta kepatuhan
4. Penyetujuan kebijakan strategis tertentu

Anggota Dewan Komisaris secara rata-rata hadir sepanjang 100% (seratus persen).

Saran kepada Direksi

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyampaikan berbagai saran kepada Direksi, di antaranya:

1. Peningkatan mutu kredit serta penurunan tingkat NPL
2. Penguatan mekanisme pengendalian internal
3. Pengembangan kualitas SDM dan peningkatan kompetensi
4. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
5. Penguatan Manajemen Risiko dan Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi

Direksi telah menindaklanjuti semua rekomendasi secara memadai.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tugas Direksi

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan PT BPR Chandra Muktiartha dengan baik, serta menunjukkan komitmen tinggi dalam menindaklanjuti saran dan nasihat yang diberikan Dewan Komisaris. Upaya ini tercermin dalam kinerja perusahaan yang tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Dewan Komisaris mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Direksi dalam mempertahankan serta meningkatkan kinerja Bank secara optimal, meskipun kondisi perekonomian masih diwarnai ketidakpastian baik di tingkat nasional maupun regional.

Ke depan, Dewan Komisaris menekan Direksi agar terus menambah performa lewat penguatan strategi bisnis, penerapan manajemen risiko yang lebih efektif, serta pemanfaatan optimalisasi peluang pertumbuhan yang ada, untuk memastikan kelangsungan usaha PT BPR Chandra Muktiartha.

Penilaian serta Evaluasi Dewan Komisaris tentang Prospek Bisnis

Dewan Komisaris menilai prospek usaha BPR ke depan cukup menantang, mengingat kondisi ekonomi makro dan regional belum mengalami pertumbuhan signifikan. Fokus utama harus pada penjualan kredit berkualitas, peningkatan kolektibilitas kredit, pengembangan DPK, peningkatan kompetensi pegawai, serta penguatan permodalan secara organik.

Dewan Komisaris menyatakan dukungan terhadap prospek bisnis tahun 2026 yang disampaikan oleh Direksi, yang diakui mencerminkan pendekatan seimbang antara pengoptimalan peluang usaha dan penerapan mitigasi risiko yang memadai.

Dewan Komisaris turut mendukung kebijakan Direksi dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan memakai asumsi yang realistis dan terukur, sehingga sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal sambil tetap memelihara prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya bagi Direksi untuk terus memelihara kecukupan permodalan dan likuiditas sebagai landasan utama dalam menanggapi dinamika lingkungan usaha yang terus berubah, guna menjamin kelangsungan dan kesehatan operasional Bank secara berkelanjutan.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Salah satu tanggung jawab Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, adalah memastikan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik-transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran-dalam setiap aktivitas usaha BPR Chandra Muktiartha di semua tingkatan dan jenjang organisasi.

Bisnis perbankan didasari oleh kepercayaan *(trust)* nasabah, sehingga penerapan tata kelola yang baik sangat penting untuk menjaga dan memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan penilaian internal terhadap 12 Faktor Tata Kelola pada posisi 31 Desember 2025, BPR Chandra Muktiartha memperoleh Peringkat Komposit 3 (Cukup Baik).

Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

Berdasarkan POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Pasal 9 ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa Dewan Komisaris BPR harus melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan serta prosedur pengendalian internal

dalam proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan pengawasan Dewan Komisaris atas penerapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank Tahun 2025, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi telah menjalankan tugasnya dengan menyusun serta menyajikan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku serta ketentuan OJK tentang pencatatan transaksi keuangan;
2. Mengacu pada Laporan Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Integritas Pelaporan Keuangan (PIPKu) Bank tahun 2025 yang diterima oleh Dewan Komisaris, berisi hal: a) Hasil Penilaian Sendiri Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPKu) yang dilaksanakan oleh Direksi dengan Peringkat **2 (Cukup Memadai)** serta b) Laporan Hasil Pengujian atas Pos-Pos Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2025 yang telah disiapkan oleh Unit atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank (hasil pengolahan data dan analisis dari SI-PIPKu),
3. BPR telah dilaporkan oleh Dewan Komisaris, yang menegaskan bahwa pengendalian internal berjalan efektif selama proses pelaporan Keuangan Bank pada tahun 2025;
4. Tidak ada tindakan yang disengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain;
5. Tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun terhadap Bank yang menimbulkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank, maupun kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.

Pengawasan Implementasi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris harus menjamin bahwa fungsi kepatuhan bank dilaksanakan sesuai Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah dengan cara yang aktif, yakni:

1. Evaluasi rutin penerapan fungsi kepatuhan dilakukan, salah satunya melalui diskusi di rapat Dewan Komisaris;
2. memberikan saran dan arahan kepada Direksi guna meningkatkan mutu penerapan fungsi kepatuhan;
3. mendorong Direksi untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan serta memastikan pemenuhan komitmen kepada otoritas.

Pengawasan Pelaksanaan Program APU PPPT serta PPPSPM

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPSPM) harus diimplementasikan saat berhubungan usaha dengan calon nasabah maupun pengguna jasa Bank (Nasabah atau Walk In Customer) sesuai pedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 14 Juni 2023.

Dewan Komisaris memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM di BPR Chandra Muktiartha berjalan optimal dengan upaya pencegahan dan mitigasi risiko penyalahgunaan Bank oleh pelaku TPPU, TPPT, serta PPSPM untuk kegiatan kriminal secara langsung maupun tidak langsung. Dalam operasionalnya, Unit Kerja dan semua pegawai di BPR mengikuti Standar Operasional Prosedur APU PPT dan PPPSPM.

Pengawasan Pelaksanaan Strategi Anti Penipuan

Mengacu pada POJK No. 12 Tahun 2024 mengenai Penerapan Strategi *Anti Fraud* (SAF) Bagi Lembaga Jasa Keuangan, PT BPR Chandra Muktiartha sebagai Lembaga Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan Standar Prosedur Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024. SOP ini mencerminkan komitmen manajemen PT BPR Chandra Muktiartha untuk mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan sistem pengendalian fraud yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Sistem pengendalian *fraud* ini membantu BPR Chandra Muktiartha dalam merumuskan langkah- langkah untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau kejadian *fraud.*

Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan keempat pilar strategi Anti Fraud *Anti Fraud*, yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, serta Sanksi, bersama dengan Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut, melalui Laporan Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester I dan II Tahun 2025 yang mencakup Self Assessment *Self Assessment* terhadap keempat pilar tersebut yang dilaporkan setiap semester ke OJK dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan evaluasi laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan empat pilar Strategi Anti Fraud secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan memadai, namun masih dapat dioptimalkan lebih lanjut. *Anti Fraud* secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun perlu lebih dioptimalkan.

Berkenaan dengan isu ini, Dewan Komisaris menyampaikan saran/ nasihat kepada Direksi untuk:

1. Seluruh Kepala Unit Kerja dimohon untuk terus menerapkan fungsi pengawasan/ kontrol, mulai dari maker, checker hingga approval, dengan ketat dan penuh tanggung jawab guna memperkuat pengendalian internal. Hal ini penting agar BPR Chandra Muktiartha terhindar dari risiko fraud.
2. Sosialisasi serta peningkatan kesadaran risiko guna mencegah terjadinya potensi risiko Fraud menjadi fokus utama. BPR harus berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi atau kampanye kesadaran anti fraud, termasuk anti penyuapan dan anti korupsi, melalui penyelenggaraan pertemuan rutin internal minimal dua kali setahun.

Akhir Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT BPR Chandra Muktiartha mengungkapkan apresiasi tertinggi kepada Direksi serta seluruh karyawan atas kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah ditampilkan sepanjang tahun buku 2025.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan Perseroan dengan baik, tetap menegakkan prinsip kehati-hatian, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta mengelola risiko secara efektif dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

Ke depan, Dewan Komisaris bertekad untuk terus memperkuat fungsi pengawasan secara independen dan objektif, memastikan setiap kebijakan serta strategi yang diimplementasikan Perseroan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

1. Data Direksi dan Dewan Komisaris

1.	Nama	**CICILIA WIWIK**
	Alamat	**MOJAYAN RT 002 RW 003 MOJAYAN KLATEN TENGAH JAWA TENGAH**
	Jabatan	**Direktur**
	Tanggal Mulai Menjabat	**30 Juni 2025**
	Tanggal Selesai Menjabat	**30 Juni 2028**
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	**S-350/KO.134/2025**
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	**24 Juni 2025**
	Pendidikan Terakhir	**S1**
	Tanggal Kelulusan	**31 Juli 2004**
	Nama Lembaga Pendidikan	**UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA**
	Pendidikan Non Formal Terakhir	**PEMBAHASAN KEBUJAKAN PEMBENTUKAN CKPN**
	Tanggal Pelatihan	**09 Januari 2025**
	Lembaga Penyelenggara	**PERBARINDO**
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	**Ya**
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	**06 Oktober 2027**

2.	Nama	**FX SOEWARDI WP BSC**
	Alamat	**JL. TANGGUL MAS IV/47 RT 004 RW 009 PANGGUNG LOR SEMARANG UTARA SEMARANG JAWA TENGAH**
	Jabatan	**Komisaris Utama**
	Tanggal Mulai Menjabat	**09 Juli 2025**
	Tanggal Selesai Menjabat	**09 Juli 2028**
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	**83**
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	**21 Agustus 2025**
	Pendidikan Terakhir	**S1**
	Tanggal Kelulusan	**19 Oktober 2001**
	Nama Lembaga Pendidikan	**UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA**
	Pendidikan Non Formal Terakhir	**PERAN STRATEGI DEKOM DALAM MENINGKATKAN KINERJA BP**
	Tanggal Pelatihan	**01 Agustus 2025**
	Lembaga Penyelenggara	**LPPM WIDYAPRATAMA**
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	**Ya**
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	**21 November 2027**

3.	Nama	**CH. BAGUS ANGGARA JITA**
	Alamat	**JL. EMPU BARADA NO. 31 RT 01 RW 05 SONGGOLANGIT GENTAN BAKI SUKOHARJO JAWA TENGAH**
	Jabatan	**Komisaris**
	Tanggal Mulai Menjabat	**09 Juli 2025**
	Tanggal Selesai Menjabat	**09 Juli 2028**
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	**84**
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	**21 Agustus 2025**
	Pendidikan Terakhir	**S1**
	Tanggal Kelulusan	**29 Februari 1996**
	Nama Lembaga Pendidikan	**UNIVERSTIAS GAJAH MADA**
	Pendidikan Non Formal Terakhir	**LEADERSHIP JOURNEY DEVELOPMENT PROGRAM**
	Tanggal Pelatihan	**04 September 2019**
	Lembaga Penyelenggara	**DAYA DIMENSI INDONESIA**
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	**Ya**
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	**02 April 2027**

2. Data Pejabat Eksekutif

1.	Nama	**ATIK WARSITARINI**
	Alamat	**KRUWET RT 1 RW 5 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**11 Juni 2018**
	Surat Pengangkatan No.	**180/HR/SD-SKD/CMA/VII/2025**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**09 Mei 2018**
2.	Nama	**ADHITYA AZIZ NUR SYAIFUDIN**
	Alamat	**SERUT RT01 RW25 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**22 Juli 2024**
	Surat Pengangkatan No.	**219/HR/LP/CMA/VII/2024**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**22 Juli 2024**
3.	Nama	**APRILIA INAYANTI**
	Alamat	**PERUM GRIYA MULIA ASRI SALAKAN RT007 POTORONO BANGUNTAPAN BANTUL**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**16 Mei 2024**
	Surat Pengangkatan No.	**028/CMA/OJK/V/2024**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**16 Mei 2024**
4.	Nama	**RETSY LITAAY**
	Alamat	**KERGAN RT 002 RW 000 TIRTOMULYO KRETEK BANTUL YOGYAKARTA**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**03 Juni 2024**
	Surat Pengangkatan No.	**315/HR/STK-SPK/CMA/XI/2025**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**06 November 2025**

5.	Nama	**ANGGA NOVANDRIAN**
	Alamat	**JL AFFANDI GG KUWARA I NO 2 MRICAN RT 009 RW 004 CATURTUNGGAL CATURTUNGGAL SLEMAN**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**08 September 2018**
	Surat Pengangkatan No.	**180/HR/SD-SKD/CMA/VII/2025**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**22 Juli 2024**
6.	Nama	**SUKMA DEWA**
	Alamat	**PANJEN PUCANGANOM RT 007 RW 028 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Audit Intern**
	Tanggal Mulai Menjabat	**05 Agustus 2024**
	Surat Pengangkatan No.	**230/HR/SD-SKD/CMA/VII/20**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**31 Juli 2024**
7.	Nama	**AGI FEBRIYANTO**
	Alamat	**BODEH RT 003 RW 024 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**18 November 2024**
	Surat Pengangkatan No.	**134/HR/SD-SKD/CMA/VII/2025**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**15 November 2024**
8.	Nama	**ROLIYATI PURWANINGRUM**
	Alamat	**ONGGOMERTAN NAYAN RT 7 RW 26 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**20 Januari 2025**
	Surat Pengangkatan No.	**021/HR/LP/CMA/I/2025**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**20 Januari 2025**

9.	Nama	**MELLYANNA KURNIAWATI**
	Alamat	**KEMBARAN RT 007 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**08 Juli 2025**
	Surat Pengangkatan No.	**151/HR/SK-SKD/CMA/VII/2025**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**07 Juli 2025**
10.	Nama	**ADJI HENDARTO**
	Alamat	**GONDANGAN PENEN RT 05 RW 028 SENDANGADI MLATI SLEMAN**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**06 November 2025**
	Surat Pengangkatan No.	**316/HR/STK-SPK/CMA/XI/2025**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**06 November 2025**
11.	Nama	**YENNY KUSUMANINGRUM**
	Alamat	**TEMPEL NGIPIK RT 003 BATURETNO BANGUNTAPAN BANTUL**
	Jabatan	**Pejabat Eksekutif Lainnya**
	Tanggal Mulai Menjabat	**06 November 2025**
	Surat Pengangkatan No.	**319/HR/STK-SPK/CMA/XI/2025**
	Surat Pengangkatan Tanggal	**06 November 2025**

III. Kepemilikan

Daftar Kepemilikan		
1.	Nama	**AGUS PRAMONO**
	Alamat	**JL. TENTARA PELAJAR NO 12 TR 001 RW 007 TEMANGGUNG**
	Jenis Pemilik	**Perorangan**
	Status Pemegang Saham	**PSP**
	Jumlah Nominal	**Rp9133000000**
	Persentase Kepemilikan	**45.67%**
2.	Nama	**HALIM SUSANTO**
	Alamat	**JL. TENTARA PELAJAR NO 12 RT 001 RW 007 TEMANGGUNG**
	Jenis Pemilik	**Perorangan**
	Status Pemegang Saham	**Non PSP**
	Jumlah Nominal	**Rp6867000000**
	Persentase Kepemilikan	**34.33%**
3.	Nama	**PT.MERDEKA JAYA SENTOSA**
	Alamat	**SEMARANG**
	Jenis Pemilik	**Pemerintah Daerah / Pemerintah Pusat**
	Status Pemegang Saham	**Non PSP**
	Jumlah Nominal	**Rp4000000000**
	Persentase Kepemilikan	**20.00%**

Daftar Ultimate Shareholder		
1.	Nama Ultimate Shareholder	**AGUS PRAMONO**

IV. Perkembangan Usaha

1. Riwayat Pendirian BPR

Informasi Umum Pendirian BPR	
Nomor akta pendirian	**73**
Tanggal akta pendirian	**13 April 1993**
Tanggal mulai beroperasi	**19 Juli 1993**
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	**38**
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	**15 Januari 2026**
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	**AHU-AH.01.09-0064111**
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	**18 Februari 2026**
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	**PERBANKAN**
Tempat kedudukan	**BANTUL**

Hasil Audit Akuntan Publik	
Opini Akuntan Publik	**01. Wajar Tanpa Pengecualian**
Nama Akuntan Publik	**INDARTO WALUYO**

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Nominal
Pendapatan Operasional	42.961.266
Beban Operasional	40.990.275
Pendapatan Non Operasional	77.481
Beban Non Operasional	60.975
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	1.987.497
Taksiran Pajak Penghasilan	350.000
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.637.497

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat Pendapatan Operasional sebesar Rp42.961.265.971 dan Beban Operasional Rp40.990.275.307, menghasilkan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak sebesar Rp1.987.497.017 (puluhan miliaran). Pendapatan Non Operasional tercatat Rp77.481.453, sementara Beban Non Operasional Rp60.975.100, memberikan kontribusi positif bersih sebesar Rp16.506.353.
Setelah memperhitungkan Taksiran Pajak Penghasilan Rp350.000.000 (miliaran), Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan menjadi Rp1.637.497.017 (puluhan miliaran), menegaskan posisi keuangan yang kuat dan profitabilitas yang konsisten.

3. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

Kualitas Aset Produktif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	319.266.556	-	-	-	-	319.266.556
Kredit yang Diberikan	286.920.682	-	25.826.897	14.527.629	39.547.436	403.545.263
a. Kepada BPR	-	-	-	-	-	-

b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait	-	-	-	-	-	-
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait	286.920.682	-	25.826.897	14.527.629	39.547.436	403.545.263
Jumlah Aset Produktif	**893.107.919**	**-**	**51.653.794**	**29.055.259**	**79.094.871**	**1.126.357.081**

Rasio Keuangan

Keterangan	Nilai Rasio
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	14,14
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100
NPL Neto	34,63
NPL Gross	40,62
Return on Assets (ROA)	0,54
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,43
Net Interest Margin (NIM)	3,60
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,97
Cash Ratio	8,61

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat total aset produktif sebesar Rp1,126 triliun, dengan mayoritas berada pada kategori lancar (Rp893,1 miliar) dan kredit yang diberikan sebesar Rp403,5 miliar. Penempatan pada bank lain menyumbang Rp319,3 miliar, sedangkan kredit kepada non-bank mencapai Rp286,9 miliar, dengan komponen kurang lancar Rp25,8 miliar, diragukan Rp14,5 miliar, dan macet Rp39,5 miliar.
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tercatat 14,14%, memenuhi standar regulator. NPL Gross sebesar 40,62% dan NPL Neto 34,63% menunjukkan tekanan kualitas aset yang signifikan. Meskipun ROA hanya 0,54% dan BOPO tinggi pada 95,43%, bank berhasil mempertahankan NIM 3,60% dan LDR 85,97% yang masih dalam batas wajar. Cash Ratio sebesar 8,61% menandakan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

4. Penjelasan NPL

Penjelasan, Penyebab, dan Langkah Penyelesaian NPL	
NPL Gross (%)	**40,62**

NPL Neto (%)	**34,63**

Penyebab Utama Kondisi NPL:

Dalam periode 1 (satu) tahun terakhir, peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada BPR Chandra Muktiartha dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berasal dari sisi debitur maupun kondisi eksternal.
Dari aspek pihak/ debitur, NPL didominasi oleh debitur pada segmen usaha mikro dan kecil yang memiliki ketahanan usaha relatif terbatas terhadap perubahan kondisi ekonomi. Beberapa debitur mengalami penurunan kemampuan bayar akibat penurunan pendapatan dan arus kas usaha.
Berdasarkan sektor ekonomi, kredit bermasalah terutama berasal dari sektor perdagangan kecil, jasa, dan usaha konsumtif, yang sangat sensitif terhadap fluktuasi daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi lokal.
Ditinjau dari siklus usaha debitur, sebagian debitur berada pada fase penurunan usaha, khususnya akibat melemahnya permintaan pasar serta meningkatnya biaya operasional, yang berdampak pada terganggunya kemampuan pembayaran kewajiban kredit.
Dari sisi faktor internal bank, NPL dipengaruhi oleh masih perlunya penguatan pada proses analisis kredit, khususnya dalam penilaian kemampuan bayar debitur, monitoring pasca pencairan kredit, serta ketepatan dalam segmentasi dan mitigasi risiko kredit.
Sementara itu, dari sisi faktor eksternal, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, dunia usaha yang masih mengalami penurunan penjualan, serta penurunan daya beli masyarakat turut memberikan dampak terhadap kinerja usaha debitur. Selain itu, faktor force majeure dan kondisi tertentu pada wilayah operasional juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko kredit.
BPR Chandra Muktiartha secara berkelanjutan melakukan upaya mitigasi melalui penguatan manajemen risiko kredit, perbaikan proses end- to- end credit, serta peningkatan kualitas monitoring dan penagihan guna menekan rasio NPL ke depan.

Langkah Penyelesaian:

Angka pencapaian NPL Gross pada Desember 2025 sebesar 40,62%. Angka NPL ini sangat menantang dan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah selama tahun 2025 masih belum maksimal dan optimal sehingga memerlukan tindakan perbaikan kolektibitas dengan terlebih dahulu memetakan kemauan dan kemampuan bayar debitur yang menunggak untuk mengintensifkan penagihan, menjajaki penjualan agunan secara sukarela milik debitur yang bermasalah dan melakukan lelang jaminan.

5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan

Selama tahun 2025 terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan terutama pada pertumbuhan tabungan yaitu sebesar 11.15%. Pendapatan operasional yang merupakan pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional lainnya turun sebesar -13.44% serta Beban operasional yang merupakan beban diluar beban bunga turun sebesar -13.59% juga pertumbuhan kredit turun sebesar -25.61%

V. Analisis dan Pembahasan Manajemen

1. Tinjauan Perekenomian

Tinjauan Perekenomian

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif cukup stabil, meskipun dihadapkan pada dinamika ketidakpastian global yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga pada kisaran ±5%, dengan realisasi tahun 2025 sekitar 5,1% dan proyeksi tahun 2026 berada pada rentang 4,9%–5,7%.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat. Peningkatan daya beli masyarakat, dukungan belanja pemerintah, serta berbagai program stimulus dan bantuan sosial turut memperkuat permintaan domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi industri perbankan, termasuk BPR Chandra Muktiartha, kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pertumbuhan kredit diproyeksikan meningkat pada kisaran 3**%**, sejalan dengan pemulihan sektor riil. Namun di sisi lain, kehati-hatian tetap diperlukan dalam pengelolaan risiko kredit, likuiditas, dan kualitas aset di tengah ketidakpastian global yang berimbas ke perekonomian nasional dan di tingkat regional.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2025, industri BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit secara selektif dan produktif, memperkuat manajemen risiko, khususnya risiko kredit dan likuiditas, mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan wilayan pemasaran untuk pembiayaan pada sektor produktif dan UMKM.

Langkah-langkah tersebut penting diambil oleh BPR Chandra Muktiartha untuk meningkatkan penjualan kredit dan menjaga kualitas kredit serta memupuk DPK di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian daerah.

2. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi dan Kebijakan Dalam Pengembangan Usaha

Kinerja PT. BPR Chandra Muktiartha tahun 2025 merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan secara menyeluruh meliputi pelayanan, sistem kerja dan peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia. Beberapa Strategi dan Kebijakan guna mewujudkan pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan aktivitas operasional selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan praktek terbaik dalam perbankan lainnya yang ditetapkan manajemen

2. Meningkatkan integritas, kemampuan, pengetahuan, kedisiplinan, Jujur dan berdedikasi tinggi kepada perusahaan serta mentaati aturan dan kode etik perusahaan
3. Meningkatkan kinerja secara tim yang solid serta menciptakan hubungan kekeluargaan yang kuat pada seluruh karyawan
4. Terus melakukan pengembangan sistem dan aplikasi serta perangkat keras dalam upaya untuk mengikuti cepatnya perkembangan teknologi informasi.
5. Peningkatan efisiensi dalam segala aktifitas operasional dengan tidak mengurangi nilai nilai pelayanan kepada nasabah dan tetap berpedoman pada prinsip kehati –hatian
6. Mengupayakan secara konsisten peningkatan DPK (Dana Pihak Ketiga) khususnya dana Tabungan untuk menciptakan struktur pendanaan yang ideal dengan fokus pada dana murah (LCD - *Low Cost Deposit*) melalui strategi marketing dan membangun hubungan baik dengan nasabah serta akuisisi terhadap penabung- penabung baru melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah untuk meningkatkan saldo tabungan.
7. Meningkatkan penjualan kredit kepada nasabah baru dan juga eksisting yang layak dengan *top up* kredit. Meminta *referral* dari nasabah debitur yang memiliki rekan bisnis yang membutuhkan bantuan modal kerja.

Strategi dan Kebijakan Dalam Manajemen Risiko

1. Memiliki kebijakan manajemen risiko yang menekankan pada pembentukan tata kelola manajemen risiko yang sehat dan menata penetapan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance).* Limit risiko dievaluasi kembali sekali dalam 1 satu tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor- faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
2. Strategi untuk memitigasi kredit perlu dibuat panduan dan peta portofolio *(portfolio guidance)* sektor ekonomi yang memiliki prospek yang bagus dan yang sedang mengalami penurunan.
3. Melakukan analisa risiko pada beberapa sektor usaha yang dibiayai dan mengalami penurunan kinerja sehingga dapat dilakukan tindakan- tindakan preventif untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.
4. Untuk mengelola risiko operasional perlu dilakukan kajian dan pemantauan secara berkala atas sistem dan prosedur di BPR untuk menjaga serta mendukung kesinambungan operasional usaha Bank.

3. Struktur Organisasi

Diagram / Gambar Struktur Organisasi

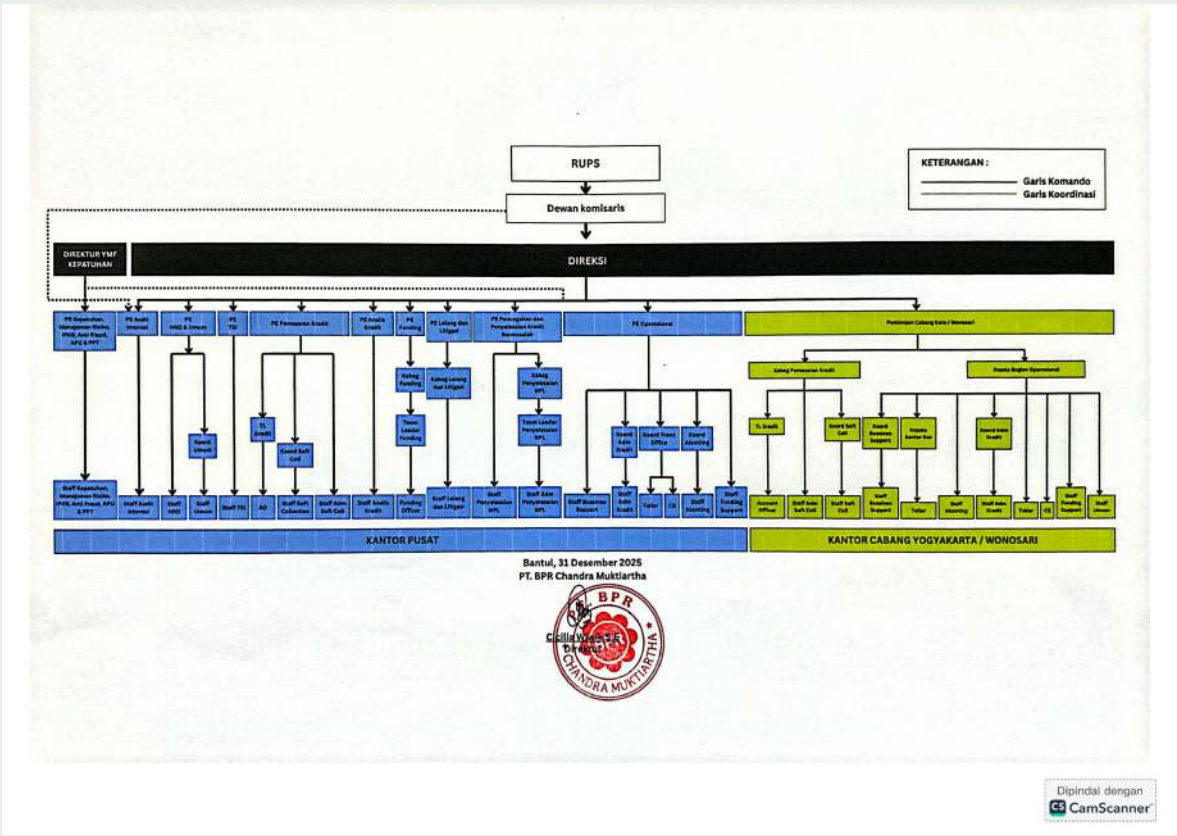

Penjelasan Struktur Organisasi

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya telah mencerminkan penerapan Tata kelola yang baik antara lain:

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalisasi tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Direksi bertanggung jawab atas setiap keputusan untuk pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS.
3. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
4. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.

6. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu.
7. Keputusan- keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui .

4. Bidang Usaha

Bidang Usaha dan Produk BPR/BPRS		
1.	Kategori Kegiatan Usaha	**01. Penghimpunan Dana**
	Jenis Produk	**01. Produk dasar**
	Nama Produk	**Tabungan**
	Uraian	**Tabungan**
2.	Kategori Kegiatan Usaha	**01. Penghimpunan Dana**
	Jenis Produk	**01. Produk dasar**
	Nama Produk	**Deposito**
	Uraian	**Deposito**
3.	Kategori Kegiatan Usaha	**02. Penyaluran Dana**
	Jenis Produk	**01. Produk dasar**
	Nama Produk	**Kredit Modal Kerja**
	Uraian	**Kredit Modal Kerja**
4.	Kategori Kegiatan Usaha	**02. Penyaluran Dana**
	Jenis Produk	**01. Produk dasar**
	Nama Produk	**Kredit Investasi**
	Uraian	**Kredit Investasi**
5.	Kategori Kegiatan Usaha	**02. Penyaluran Dana**
	Jenis Produk	**01. Produk dasar**
	Nama Produk	**Kredit Konsumsi**
	Uraian	**Kredit Konsumsi**

5. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi untuk Sistem Operasional

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada otoritas, kehandalan tehnologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting:

1. Sistem Operasional
   a. Sistem operasional menggunakan Core Banking PT BPR Chandra Muktiartha bekerja sama dengan vendor PT. USSI Primasoftware
   b. Sistem Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan meliputi :
      - SiPeduli untuk pengaduan Nasabah, Self Assesment, edukasi dan Inklusi
      - SLIK untuk Sistem Informasi Layanan Keuangan
      - APOLO untuk pelaporan kepada OJK
      - Sigap untuk pelaporan APU PPT dan Judi Online
      - Aplikasi Sipesat Grips dan Sipendar untuk PPATK

   c. Sharing bandwith Perbarindo

Sistem Keamanan Teknologi Informasi

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada otoritas, kehandalan tehnologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting.

6. Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan dan Target Pasar

Guna mendukung rencana pengembangan usaha yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis harus didukung adanya suatu target yang terukur dan target pasar yang jelas. Langkah-langkah untuk pengembangan target pasar dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan jumlah nasabah dari beberapa wilayah yang selama ini sudah menjadi pasar BPR.
2. Memperluas wilayah pemasaran baru disekitar wilayah yang sudah ada.
3. Target pengembangan usaha dengan mencari peluang sektor ekonomi potensial yang ada di wilayah kerja.

7. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Daftar Jaringan Kantor

1.	Nama Kantor	**KANTOR PUSAT**
	Alamat	**JL.GEDONGKUNING NO.150A BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAK**
	Desa/Kecamatan	**BANGUNTAPAN**
	Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**
	Kode Pos	**55171**
	Nama Pimpinan	**CICILIA WIWIK**
	Nomor Telepon	**(0274)385 192**
	Jumlah Kantor Kas	**2**
2.	Nama Kantor	**KANTOR CABANG WONOSARI**
	Alamat	**JL. MGR SUGIYO PRANOTO NO.76, PURWOSARI, BALEHARJO**
	Desa/Kecamatan	**BALEHARJO**
	Kabupaten/Kota	**Kab. Gunung Kidul**
	Kode Pos	**55881**
	Nama Pimpinan	**ANGGA NOVANDRIAN**
	Nomor Telepon	**(0274)391 566**
	Jumlah Kantor Kas	**2**
3.	Nama Kantor	**KANTOR CABANG YOGYAKARTA**
	Alamat	**JL. LETJEN SUPRAPTO NO.48 NGAMPILAN YOGYAKARTA**
	Desa/Kecamatan	**NGAMPILAN**
	Kabupaten/Kota	**Kota Yogyakarta**
	Kode Pos	**55244**
	Nama Pimpinan	**ATIK WARSITA RINI**
	Nomor Telepon	**(0274)530 4727**
	Jumlah Kantor Kas	**0**

8. Kerja Sama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain

Kerja Sama BPR/BPRS dengan Bank atau Lembaga Lain

1.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	**Kantor Hukum Berry and Partners**
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	**2. Lembaga Lain**
	Tanggal Kerja Sama	**11 November 2024**
	Jenis Kerja Sama	**Penanganan kredit bermasalah PKS No. 006/ SPK/BPRCMA/XI/2024**
	Uraian Kerja Sama	**PPenyelesaian kredit bermasalah dengan cara pelunasan kewajiban (tidak termasuk melalui AYDA)**

9. Penanganan Pengaduan Nasabah

Strategi p emasaran yang efektif, *engagement* kepada nasabah perlu terus dijaga dan ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan nasabah *(customer satisfaction)* terhadap layanan yang diberikan, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis.

PT BPR Chandra Muktiartha terus berupaya menjaga konsistensi layanan yang fokus pada pelanggan melalui standarisasi kualitas layanan di *front liner* termasuk pada layanan penanganan keluhan pelanggan *(complaint handling)* yang siap memberikan pelayanan bisnis maupun *support* bisnis bagi unit kerja hingga penyelesaian keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan OJK yang diatur dalam POJK No. 22 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pengaduan nasabah akan diproses sebagaimana alur berikut:

Pada penyampaian hasil penyelesaian, nasabah dapat menyepakati ataupun tidak menyepakati hasil penyelesaian pengaduan sehingga di SOP Pelindungan Konsumen PT BPR Chandra Muktiartha diatur bahwa:

1. Jika sepakat, maka pengaduan dianggap selesai.
2. Apabila tidak sepakat, nasabah dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui tahapan banding ke PT BPR Chandra Muktiartha.
3. Apabila nasabah tetap tidak dapat menerima hasil penyelesaian pengaduan setelah tahap banding, nasabah dapat mengajukan permohonan penyelesaian pengaduan di pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian pengaduan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi maupun arbitrase kepada Regulator, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), atau lembaga lainnya.

Dalam penanganan pengaduan nasabah, PT BPR Chandra Muktiartha telah memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk memberikan solusi yang cepat, tepat, dan memuaskan bagi nasabah. Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) pengaduan nasabah.

Tabel Publikasi Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Pesentase	Jumlah	Pesentase	Jumlah	Pesentase	
1	Produk/Jasa Bank Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%	0
2	Simpanan	0	0	0	0	0	0.00%	0
3	Kredit Tanpa Angunan	0	0	0	0	0	0.00%	0
4	Pinjaman (Modal Kerja, Investasi, Konsumer)	0	0	2	100	0	0.00%	2
	Grand Total	0	0		100.00%	0	0.00%	2

10. Tingkat Kesehatan Bank

BPR Chandra Muktiartha secara rutin melakukan penilaian terhadap risiko dan kinerja Bank melalui pelaksanaan *self- assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk- Based Bank Rating*) dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Hasil akhir *self-assessment* TKB metode RGEC berupa Peringkat Komposit (PK), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Tabel Tingkat Kesehatan PT BPR Chandra Muktiartha *(Self Assessment)*

Faktor Penilaian	Penilaian Per Semester II 2025	Penilaian Per Semester II 2024
	Peringkat	Peringkat
Profil Risiko *(Risk Profile)*	3	3
Tata Kelola *(Good Corporate Governance)*	2	3
Rentabilitas *(Earnings)*	4	4
Permodalan *(Capital)*	4	3
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	3	3

Peringkat Tingkat Kesehatan PT BPR Chandra Muktiartha dengan metode penilaian berbasis risiko (RBBR - *Risk Based Bank Rating*) berada pada Peringkat Komposit 3 (PK 3) – CUKUP SEHAT dengan rincian untuk masing-masing faktor penilaian yaitu Profil Risiko berada pada Peringkat 3 (Sedang), GCG berada pada Peringkat 2 (Baik), Rentabilitas berada pada Peringkat 4 (Kurang

Sehat) dan Permodalan berada pada Peringkat 4 (Kurang Sehat).

VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Sumber Daya Manusia

Statistik Komposisi Karyawan Per Kantor	
Jumlah Pegawai Pemasaran	**47 orang**
Jumlah Pegawai Pelayanan	**12 orang**
Jumlah Pegawai Lainnya	**87 orang**
Jumlah Pegawai Tetap	**122 orang**
Jumlah Pegawai Tidak Tetap	**24 orang**
Jumlah Pegawai Pendidikan S3	**0 orang**
Jumlah Pegawai Pendidikan S2	**2 orang**
Jumlah Pegawai Pendidikan S1/D4	**0 orang**
Jumlah Pegawai Pendidikan D3	**22 orang**
Jumlah Pegawai Pendidikan SMA	**26 orang**
Jumlah Pegawai Pendidikan Lainnya	**87 orang**
Jumlah Pegawai Laki-laki	**81 orang**
Jumlah Pegawai Perempuan	**65 orang**
Jumlah Pegawai Usia <=25	**10 orang**
Jumlah Pegawai Usia >25-35	**68 orang**
Jumlah Pegawai Usia >35-45	**57 orang**
Jumlah Pegawai Usia >45-55	**10 orang**
Jumlah Pegawai Usia >55	**1 orang**

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPR/BPRS		
1.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Penilaian dan Pelaporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko dan Tata Kelola**
	Tanggal Pelaksanaan	**17 Januari 2025**
	Jumlah Peserta	**4 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai komponen- komponen penilaian tingkat kesehatan bank, termasuk aspek risiko, permodalan, rentabilitas, likuiditas, dan tata kelola.**
2.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Aplikasi Digital SI PIPKu (Sistem Informasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan) untuk Meningkatkan Integritas Pelaporan Keuangan BPR-BPRS sesuai POJK No 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank**
	Tanggal Pelaksanaan	**23 Januari 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman teknis dan praktis dalam penggunaan SI PIPKu, sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk memperkuat sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan di BPR dan BPRS.**
3.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan How To Achieve Peak Performance In 2025**
	Tanggal Pelaksanaan	**17 Januari 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**

	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali peserta dengan strategi praktis dalam mencapai performa kerja terbaik di tengah tantangan dan dinamika organisasi.**
4.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Sosialisasi Pedoman Akuntansi BPR**
	Tanggal Pelaksanaan	**05 Februari 2025**
	Jumlah Peserta	**9 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai ketentuan dan prinsip yang tertuang dalam pedoman akuntansi yang berlaku di BPR.**
5.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Keterampilan Komunikasi dan Motivasi untuk Memulai 2025 dengan Penuh Semangat**
	Tanggal Pelaksanaan	**15 Januari 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan membangun motivasi kerja yang berkelanjutan.**
6.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Proses Akuntansi Amortisasi Kredit di BPR Konvensional**
	Tanggal Pelaksanaan	**06 Februari 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh**

		mengenai konsep amortisasi kredit dan penerapannya dalam pencatatan akuntansi.
7.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Aplikasi Digital SI INSAF (Sistem Informasi Strategi Anti Fraud) APOLO untuk Meningkatkan Pengendalian Risiko Fraud pada BPR BPRS sesuai POJK No 12 Tahun 2024**
	Tanggal Pelaksanaan	**11 Februari 2025**
	Jumlah Peserta	**1 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan diselenggarakan untuk memberikan pembekalan teknis kepada peserta mengenai penggunaan aplikasi APOLO sebagai alat bantu dalam menyusun, melaporkan, dan memantau implementasi strategi anti fraud di BPR/ BPRS. Materi pelatihan mencakup pemahaman terhadap POJK No. 12 Tahun 2024, pengenalan fitur dan fungsi utama aplikasi APOLO, serta simulasi langsung penggunaan aplikasi untuk pelaporan dan monitoring strategi anti fraud.**
8.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Tatap Muka Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di BPR**
	Tanggal Pelaksanaan	**23 Februari 2025**
	Jumlah Peserta	**1 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, metodologi perhitungan, serta penerapan CKPN sesuai dengan ketentuan regulator dan standar akuntansi yang berlaku.**
9.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Warrior Spirit Memimpin Tim Elit untuk Memenangkan Peperangan Bisnis Bersama Coach Humprey Rusli**
	Tanggal Pelaksanaan	**22 Februari 2025**

	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut bertujuan untuk membangun karakter kepemimpinan tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan dunia bisnis yang dinamis.**
10.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Penyusunan Rencana Audit Kredit Individual**
	Tanggal Pelaksanaan	**19 Februari 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor dalam menyusun rencana audit kredit individual yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan berbasis risiko**
11.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Sosialisasi POJK Nomor 1 Tahun 2024 dan Risiko Kredit**
	Tanggal Pelaksanaan	**14 Februari 2025**
	Jumlah Peserta	**19 orang**
	Pihak Pelaksana	**01. Internal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Tujuan pelatihan tersebut adalah untuk menyamakan pemahaman seluruh peserta terhadap kebijakan regulator terbaru dan memperkuat penerapan manajemen risiko kredit secara efektif dan berkelanjutan di lingkungan BPR.**
12.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Professional Service Excellence**
	Tanggal Pelaksanaan	**17 Maret 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**

	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Tujuan pelatihan tersebut adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai standar profesionalisme dan kebutuhan nasabah.**
13.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur Tingkat 1**
	Tanggal Pelaksanaan	**10 Februari 2025**
	Jumlah Peserta	**1 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut sebagai bagian dari program pengembangan kepemimpinan dan pemenuhan standar kompetensi bagi calon direksi BPR.**
14.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur Tingkat 1**
	Tanggal Pelaksanaan	**10 Februari 2025**
	Jumlah Peserta	**1 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut sebagai bagian dari program pengembangan kepemimpinan dan pemenuhan standar kompetensi bagi calon direksi BPR.**
15.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Aplikasi Digital SIPETA (Sistem Informasi Pelaporan Tahunan) untuk Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan BPR ke OJK One Click melalui APOLO dan Penyediaan Aplikasi Digital SIP-WEB (Sistem Informasi Pengelolaan Website) BPR**
	Tanggal Pelaksanaan	**21 Maret 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**

	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut meliputi alur input data, teknis unggah dokumen, serta pengelolaan konten informasi publik.**
16.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Etika Bisnis Perbankan**
	Tanggal Pelaksanaan	**12 Maret 2025**
	Jumlah Peserta	**22 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut sebagai bagian dari upaya pembentukan integritas dan profesionalisme dalam dunia perbankan, khususnya di lingkungan BPR. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip- prinsip etika dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, termasuk sikap profesional, tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap peraturan, serta pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.**
17.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Pengelolaan Off Balansheet sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan**
	Tanggal Pelaksanaan	**15 Mei 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan strategis dalam mengelola transaksi off-balance sheet (OBS) di lingkungan BPR.**
18.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Penggunaan IBS TKS System USSI**
	Tanggal Pelaksanaan	**15 Mei 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**

	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut sebagai bagian dari implementasi dan pemahaman teknis sistem informasi perbankan.**
19.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Tindakan SK/PE Manajemen Risiko BPR Terhadap Pelaksanaan SAKEP CKPN Aktiva Produktif sesuai SEPOJK 21/2024, POJK 09/2024 dan POJK 13/2015 Direksi,PE-MR, Kepatuhan, Audit, dan Pejabat Lainnya**
	Tanggal Pelaksanaan	**09 Mei 2025**
	Jumlah Peserta	**4 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan terkini dari POJK.**
20.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Analisa Kredit Tahap Dasar**
	Tanggal Pelaksanaan	**18 Juni 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan tersebut sebagai program pengembangan kompetensi dasar bagi analis kredit di lingkungan BPR.**
21.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Remunerasi Pejabat dan Karyawan BPR/S**
	Tanggal Pelaksanaan	**13 Juni 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Kegiatan tersebut dirancang untuk membantu BPR/ S menciptakan kebijakan remunerasi yang mendukung produktivitas dan retensi SDM**

22.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur TK 2**
	Tanggal Pelaksanaan	**27 April 2025**
	Jumlah Peserta	**1 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan ini bertujuan untuk membekali calon direktur dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai standar kompetensi jabatan, mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengambilan keputusan strategis**
23.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Break The Wall Bangun Komunikasi, Satukan Arah**
	Tanggal Pelaksanaan	**26 April 2025**
	Jumlah Peserta	**140 orang**
	Pihak Pelaksana	**01. Internal BPR**
	Kategori Peserta	**01. Seluruh Pegawai**
	Uraian Kegiatan	**Kegiatan ini dirancang untuk mendorong keterbukaan, membangun kepercayaan, serta menyelaraskan visi dan arah kerja seluruh pegawai. Pelatihan dilakukan secara interaktif dengan pendekatan partisipatif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan sesi motivasi, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih solid dan produktif.**
24.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Talkshow Forum Governance, Risk, And Compliance (GRC) Volume. 1 Penguatan Kinerja Sektor Jasa Keuangan Implementasi GRC**
	Tanggal Pelaksanaan	**07 Juli 2025**
	Jumlah Peserta	**5 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemahaman terkait tata kelola yang baik bagi BPR dengan memperhatikan unsur**

		Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola itu sendiri.
25.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Aplikasi Digital Sippatuh (Kepatuhan)**
	Tanggal Pelaksanaan	**11 Juli 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 9 tahun 2024 tentang Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan SE OJK No. 8/ SE.OJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR.**
26.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Manajemen Kredit Bpr-s Di Tengah Pelemahan Dan Ketidakpastian Ekonomi Serta Regulasi Kualitas Kredit (Ckpn)**
	Tanggal Pelaksanaan	**15 Juli 2025**
	Jumlah Peserta	**32 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 1 tahun 2024 tentang Aset Produktif BPR.**
27.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Manajemen Resiko Utk Modul 3 Dan 4**
	Tanggal Pelaksanaan	**20 Juli 2025**
	Jumlah Peserta	**1 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.**
28.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Cabang Merger di BPR (Hybrid)**

	Tanggal Pelaksanaan	**17 Juli 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Overview tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang untuk pengelolaan dan pertumbuhan bisnis serta pengelolaan SDM.**
29.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Proses Pengajuan Penghapusan / Pengurangan Sanksi Administratif Spt Tahunan Badan Di System Coretax**
	Tanggal Pelaksanaan	**28 Juli 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Proses Pengajuan Penghapusan / Pengurangan Sanksi Administratif Spt Tahunan Badan Di System Coretax.**
30.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Credit Intelligence Risk Management & Compliance Made Smarter (Manajemen Resiko & Kepatuhan Menjadi Lebih Cerdas)**
	Tanggal Pelaksanaan	**05 Agustus 2025**
	Jumlah Peserta	**1 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan satuan kerja Manajemen Resiko & Kepatuhan.**
31.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Standar Akuntansi Entitas Privat (Sak-ep) Di Semarang**
	Tanggal Pelaksanaan	**15 Agustus 2025**
	Jumlah Peserta	**4 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**

	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemaparan terkait Standar Akuntansi Entitas Privat (Sak- ep) untuk menyusun laporan keuangan.**
32.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Strategi Pengurusan Legalitas Bpr Paska Merger (Hybrid)**
	Tanggal Pelaksanaan	**22 Agustus 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pembahasan terkait Pengurusan Legalitas di BPR.**
33.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Tanggungjawab&penyusunan Sop Serta Lap Fungsi Kepatuhan**
	Tanggal Pelaksanaan	**26 Oktober 2025**
	Jumlah Peserta	**4 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh pejabat, pengurus dan pelaksana Fungsi Kepatuhan BPR agar mampu menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan konsep dan prinsip fungsi kepatuhan dan regulasi yang berlaku (POJK No. 9 tahun 2024 tentang Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan SE OJK No. 8/ SE.OJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR).**
34.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Digital Sippena Versi.2 untuk Menyampaikan Lap Self Assesment Edukasi & Perlindungan Konsumen Th 2025 Ke Ojk Satu Klik Ke Sipeduli**
	Tanggal Pelaksanaan	**16 September 2025**
	Jumlah Peserta	**4 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**

	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Memahami langkah- langkah dalam menyusun laporan Self Assesment Edukasi & Perlindungan Konsumen Th 2025 Ke Ojk Satu Klik Ke Sipeduli.**
35.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Manajemen Kepatuhan Yang Efektif, Kunci Sukses Organisasi**
	Tanggal Pelaksanaan	**04 September 2025**
	Jumlah Peserta	**20 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan terkait pemaparan Manajemen Kepatuhan Yang Efektif sebagai salah satu Kunci Sukses Organisasi.**
36.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Meningkatkan Budaya Apu Ppt, Ppt, Pppspm Dan Anti Fraud**
	Tanggal Pelaksanaan	**20 September 2025**
	Jumlah Peserta	**158 orang**
	Pihak Pelaksana	**01. Internal BPR**
	Kategori Peserta	**01. Seluruh Pegawai**
	Uraian Kegiatan	**Kegiatan dilaksanakan sebagai wujud komitmen dalam membangun integritas, kepatuhan dan pencegahan risiko dalam aktivitas operasional perbankan dan sosialosasi POJK No 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM.**
37.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Penggunaan Core Tax System**
	Tanggal Pelaksanaan	**22 Oktober 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemahaman terkait Penggunaan Core Tax System.**
38.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Perlindungan Konsumen Dan**

		Masyarakat Disektor Jasa Keuangan
	Tanggal Pelaksanaan	**18 Oktober 2025**
	Jumlah Peserta	**30 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan dan sosialisasi Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan sesuai regulasi yang ada (POJK No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.**
39.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Membuat Rencana Bisnis**
	Tanggal Pelaksanaan	**04 November 2025**
	Jumlah Peserta	**25 orang**
	Pihak Pelaksana	**01. Internal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemahaman dalam menyusun rencana bisnis BPR.**
40.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Praktik Audit**
	Tanggal Pelaksanaan	**19 November 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemahaman terkait praktik audit.**
41.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Pengikatan Kredit Dan Jaminan Untuk Janda/duda**
	Tanggal Pelaksanaan	**21 November 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemahaman terkait Pengikatan Kredit Dan Jaminan Untuk Janda/duda.**

42.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Awareness Terhadap Tata Kelola Bpr Mengacu Pd Pojk 2025 Utk Kntor Pusat**
	Tanggal Pelaksanaan	**27 November 2025**
	Jumlah Peserta	**14 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemahaman terkait Awareness Terhadap Tata Kelola BPR mengacu pada POJK 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola untuk BPR/S.**
43.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Direksi & Komisaris Dalam Eksekusi Rbb**
	Tanggal Pelaksanaan	**08 Desember 2025**
	Jumlah Peserta	**3 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan terkait strategi dalam mewujudkan RBB.**
44.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Siap Tks Bpr/bprs**
	Tanggal Pelaksanaan	**30 Desember 2025**
	Jumlah Peserta	**5 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pelatihan dilakukan untuk menyusun dan menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan BPR ke OJK Satu Klik ke APOLO.**
45.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Team Work Yang Berintegritas Dan Zero Fraud**
	Tanggal Pelaksanaan	**27 Desember 2025**
	Jumlah Peserta	**144 orang**
	Pihak Pelaksana	**01. Internal BPR**
	Kategori Peserta	**01. Seluruh Pegawai**

	Uraian Kegiatan	**Kegiatan work shop dan pelatihan untuk mewujudkan zero fraud dan meningkatkan integritas karyawan.**
46.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Resiko Kredit Umkm Bagi Bpr**
	Tanggal Pelaksanaan	**12 November 2025**
	Jumlah Peserta	**20 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemaparan terkait Resiko Kredit UMKM Bagi BPR**
47.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Fundamental Sdm It**
	Tanggal Pelaksanaan	**25 November 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemahaman untuk Fundamental SDM IT.**
48.	Nama Kegiatan Pengembangan	**Pelatihan Kekuatan Hukum Buku Paksa Objek Ayda**
	Tanggal Pelaksanaan	**05 Desember 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**
	Pihak Pelaksana	**02. Eksternal BPR**
	Kategori Peserta	**03. Pejabat Eksekutif**
	Uraian Kegiatan	**Pemahaman terkait kekuatan hukum untuk buka paksa objek AYDA.**

VII. Laporan Keuangan Tahunan

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Kas dalam Rupiah	650.804	816.382
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	58.569.599	47.152.013
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Lain	84.861	123.512
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	250.915.633	333.530.804
Provisi yang belum diamortisasi	893.838	1.196.272
Biaya Transaksi Belum diamortisasi	74.480	186.518
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	2.232.289	2.838.938
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan	9.419.825	13.700.848
Penyertaan Modal	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyertaan Modal	0	0
Agunan yang diambil alih	21.925.550	12.425.315
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	6.446.846	6.297.660
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	4.252.936	3.905.457
Aset Tidak Berwujud	756.400	746.400
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	261.076	166.839
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Lainnya	0	0
Aset Lainnya	6.782.988	7.827.478

TOTAL ASET	**328.977.476**	**387.050.704**
Liabilitas Segera	943.831	933.332
Tabungan	37.811.803	34.017.323
Biaya Transaksi Tabungan Belum Diamortisasi	0	0
Deposito	254.039.166	317.190.710
Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	0	0
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	1.158.252	1.554.101
TOTAL LIABILITAS	**293.953.052**	**353.695.467**
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000
Modal yang Belum Disetor -/-	30.000.000	30.000.000
Tambahan Modal Disetor	0	0
Agio	0	0
Modal Sumbangan	0	0
Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
Ekuitas Lainnya	0	0
Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan	0	0
Umum	4.000.000	4.000.000
Tujuan	0	0
Laba (Rugi)	0	0
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	9.386.927	7.711.192
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.637.497	1.644.046
TOTAL EKUITAS	**35.024.424**	**33.355.238**

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat total aset sebesar Rp328,98 miliar pada 2025, turun

dari Rp387,05 miliar pada 2024, dipengaruhi penurunan kredit yang diberikan dari Rp333,53 miliar menjadi Rp250,92 miliar serta penurunan cadangan kerugian penurunan nilai kredit menjadi Rp9,42 miliar dari Rp13,70 miliar. Penempatan pada bank lain meningkat menjadi Rp58,57 miliar dibandingkan Rp47,15 miliar tahun sebelumnya, sementara agunan yang diambil alih naik signifikan menjadi Rp21,93 miliar dari Rp12,43 miliar. Kas dalam rupiah tetap rendah di kisaran Rp0,65 miliar, dan aset tidak berwujud serta aset tetap bersih tetap stabil di sekitar Rp0,76 miliar dan Rp2,19 miliar masing- masing setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset lainya menurun menjadi Rp6,78 miliar dari Rp7,83 miliar, menandakan restrukturisasi portofolio non-kredit.
Total liabilitas pada 2025 tercatat Rp293,95 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp353,70 miliar pada 2024, didorong oleh penurunan deposito yang turun menjadi Rp254,04 miliar dari Rp317,19 miliar serta tabungan yang naik menjadi Rp37,81 miliar. Liabilitas lainnya juga berkurang menjadi Rp1,16 miliar dari Rp1,55 miliar, sementara liabilitas segera tetap stabil di sekitar Rp0,94 miliar. Ekuitas meningkat menjadi Rp35,02 miliar pada 2025, naik dari Rp33,36 miliar tahun sebelumnya, didukung oleh laba tahun berjalan sebesar Rp1,64 miliar dan akumulasi laba tahun lalu sebesar Rp9,39 miliar. Dengan profitabilitas yang konsisten dan penurunan risiko kredit, PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA berada pada posisi keuangan yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Pendapatan Operasional	**42.961.266**	**49.597.775**
1. Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		
Surat Berharga	0	0
Giro	490.369	825.225
Tabungan	7	45
Deposito	1.859.498	1.385.886
Sertifikat Deposito	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	33.172.772	40.523.378
b. Provisi Kredit		
Kredit Kepada Bank Lain	0	0
Kredit Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	1.256.662	2.331.682
c. Biaya Transaksi -/-		
Surat Berharga	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0

KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	141.100	130.879
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		**63.606**
2. Pendapatan Lainnya		
a. Pendapatan Jasa Transaksi	0	597.619
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d. Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	23.689	1.200
e. Pemulihan CKPN	4.475.234	1.619.719
f. Dividen	0	0
g. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
h. Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j. Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0
k. Lainnya	1.824.135	2.507.505
Beban Operasional	**40.990.275**	**47.438.311**
1. Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
Tabungan	756.086	1.099.473
Deposito	19.588.230	21.711.979
Simpanan dari Bank Lain	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Indonesia	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Lain	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
Pinjaman yang Diterima Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
Beban Bunga Lainnya	708.701	762.036
b. Biaya Transaksi		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	**0**	**0**
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	155.560	114.693
c. KYD Kepada Bank Lain	0	0

d. KYD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	3.373.470
e. Penyertaan Modal	0	0
f. Aset Keuangan Lainnya	0	0
4. Beban Pemasaran	**685.746**	**611.744**
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	**0**	**0**
6. Beban Administrasi dan Umum		
a. Beban Tenaga Kerja		
Gaji dan Upah	8.666.705	9.641.283
Honorarium	0	0
Lainnya	4.066.657	4.718.088
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	340.293	458.048
c. Beban Sewa		
Gedung Kantor	530.101	491.233
Lainnya	540.835	551.227
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	347.479	359.198
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	94.237	65.797
f. Beban Premi Asuransi	479.194	11.660
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	172.042	173.841
h. Beban Barang dan Jasa	3.515.281	2.987.894
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	0
j. Kerugian terkait risiko operasional		
Kecurangan internal	0	0
Kejahatan eksternal	0	0
k. Pajak-pajak	8.983	41.036
7. Beban lainnya		
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d. Kerugian penjualan AYDA	0	0
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f. Lainnya	334.146	265.611
Laba (Rugi) Operasional	**1.970.991**	**2.159.464**
Pendapatan Non Operasional	**77.481**	**133.902**
1. Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0

2. Pemulihan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Pemulihan Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	77.481	133.902
Beban Non Operasional	**60.975**	**176.676**
1. Kerugian Penjualan/Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2. Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	60.600
3. Kerugian Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	60.975	116.076
Laba (Rugi) Non Operasional	**16.506**	**-42.774**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	**1.987.497**	**2.116.690**
Taksiran Pajak Penghasilan	350.000	472.644
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**1.637.497**	**1.644.046**
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat penurunan pendapatan operasional menjadi Rp42,96 ratusan miliar pada 2025 dibandingkan Rp49,60 ratusan miliar pada 2024. Penurunan utama berasal dari penurunan KYD kepada pihak ketiga bukan bank sebesar Rp33,17 ratusan miliar dan penurunan kredit kepada pihak ketiga bukan bank sebesar Rp1,26 ratusan miliar. Di sisi lain, beban operasional juga menurun menjadi Rp40,99 ratusan miliar dari Rp47,44 ratusan

miliar, didorong oleh penurunan beban bunga deposito dan beban tenaga kerja. Akibatnya, laba operasional tetap positif sebesar Rp1,97 puluhan miliar.
Pendapatan non operasional menurun menjadi Rp77,48 juta, sementara beban non operasional turun menjadi Rp60,98 juta, menghasilkan laba non operasional positif Rp16,51 juta. Setelah memperhitungkan taksiran pajak penghasilan sebesar Rp350 juta, laba bersih tahun berjalan tercatat Rp1,64 puluhan miliar.

3. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan Rekening Administratif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Tagihan Komitmen		
Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	27.810.469	23.856.911
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	0
4) Lainnya	0	0
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	8.764.306	8.787.995
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	1.828.874	1.831.570
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	4.462.650	126.000
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat peningkatan signifikan pada pendapatan bunga kredit, yaitu dari Rp23.856.910.968 pada 2024 menjadi Rp27.810.469.016 pada 2025. Kenaikan

sebesar hampir Rp3,9 miliar mencerminkan pertumbuhan portofolio kredit yang lebih produktif. Aset produktif yang dihapusbuku mengalami penurunan marginal, dari Rp8.787.995.051 menjadi Rp8.764.305.880. Pendapatan bunga atas aset yang dihapusbuku tetap stabil di sekitar Rp1,83 miliar, menunjukkan pengelolaan risiko yang konsisten.
Pada sisi kewajiban kontinjensi, tagihan kontinjensi lainnya meningkat tajam dari Rp126.000.000 menjadi Rp4.462.650.235. Lonjakan ini menandakan adanya peningkatan eksposur terhadap penyelesaian kredit bermasalah. Semua pos lain dalam rekening administratif tetap nol, menegaskan bahwa tidak ada kewajiban komitmen atau fasilitas yang belum ditarik. Dengan demikian, PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA berada pada posisi keuangan yang kuat meskipun menghadapi peningkatan kontinjensi yang perlu dipantau secara ketat.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan
Saldo per 31 Des Tahun 2023
Dividen
Pembentukan Cadangan
DSM Ekuitas
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi
Revaluasi Aset 2025etap
Laba/Rugi Periode Berjalan
Pos Penambah/Pengurang Lainnya
Saldo per 31 Des Tahun 2024
Dividen
Pembentukan Cadangan
DSM Ekuitas
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi
Revaluasi Aset 2025etap
Laba/Rugi Periode Berjalan
Pos Penambah/Pengurang Lainnya
Saldo Akhir (per 31 Des)

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Saldo 2025	Saldo 2024
Penerimaan pendapatan bunga	32.708.560	42.766.223
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	1.115.562	2.200.803
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	6.323.059	4.128.424
Pembayaran beban bunga	19.601.149	23.573.488
Beban gaji dan tunjangan	12.733.362	14.359.371
Beban umum dan administrasi	6.237.486	5.342.849
Beban operasional lainnya	297.146	236.537
Pendapatan non operasional lainnya	2.734.773	3.118.586
Beban non operasional lainnya	2.718.267	3.161.361
Pembayaran pajak penghasilan	0	0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penempatan pada bank lain	58.569.599	47.152.013
Kredit yang diberikan	247.863.986	329.682.112
Agunan yang diambil alih	21.925.550	12.425.315
Aset lain-lain	6.782.988	7.859.167
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Liabilitas segera	943.831	933.332
Tabungan	37.811.803	34.017.323
Deposito	254.039.166	317.190.710
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	1.059.702	1.444.901
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	713.465.989	849.592.516
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	2.193.910	2.392.203
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	495.324	579.561
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	2.689.234	2.971.764

Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	0	0
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	**716.155.223**	**852.564.280**
Kas dan setara Kas awal periode	**0**	**0**
Kas dan setara Kas akhir periode	**716.155.223**	**852.564.280**

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp713,5 miliar pada 2025 dibandingkan Rp849,6 miliar pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pendapatan bunga menjadi Rp32,7 miliar dari Rp42,8 miliar serta penurunan pendapatan provisi menjadi Rp1,1 miliar dari Rp2,2 miliar, sementara pendapatan operasional lainnya meningkat menjadi Rp6,3 miliar. Beban bunga juga menurun menjadi Rp19,6 miliar dari Rp23,6 miliar, namun beban gaji dan tunjangan serta beban umum dan administrasi tetap tinggi masing-masing Rp12,7 miliar dan Rp6,2 miliar. PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp2,7 miliar pada 2025, sedikit lebih rendah dibandingkan Rp3,0 miliar pada 2024, didominasi oleh pembelian aset tetap dan inventaris sebesar Rp2,2 miliar.

Tidak ada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan selama kedua tahun, sehingga total peningkatan (penurunan) arus kas bersih berakhir pada Rp716,2 miliar pada 2025, turun dari Rp852,6 miliar pada 2024. Kas dan setara kas akhir periode mencerminkan penurunan tersebut, yaitu Rp716,2 miliar pada 2025 dibandingkan Rp852,6 miliar pada 2024. Di sisi aset, kredit yang diberikan menurun menjadi Rp247,9 miliar dari Rp329,7 miliar, sementara deposito berkurang menjadi Rp254,0 miliar dari Rp317,2 miliar. Tabungan tetap tumbuh menjadi Rp37,8 miliar, dan agunan yang diambil alih meningkat menjadi Rp21,9 miliar, menunjukkan pergeseran struktur likuiditas dan jaminan.

VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik

Ringkasan Opini Akuntan Publik

Laporan Tahunan kami sampaikan sesuai dengan data hasil pemeriksaan Auditor Independen Akuntan Publik Indarto dan Yudhika Nomor. 00098A/2.1358/ AU.8/07/0906-3/1/ IV/2026 yang diterbitkan tanggal 02 April 2026 dengan opini Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan PT BPR Chandra Muktiartha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Website: www.bprcma.co.id. Telepon: 0274 385192.

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Posisi Tanggal 31 Desember 2025
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Cicilia Wiwik
   Alamat Kantor : Jl. Gedong Kuning 150A Banguntapan Bantul
   Alamat Domisili : Mojayan RT. 002 RW. 003 Klaten Tengah Klaten Jawa Tengah
   Nomor Telepon : 0274 385192
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Laporan Keuangan PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA telah disusun untuk laporan' keuangan posisi tanggal 31 Desember 2025 dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku,
2. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi tanggal 31 Desember 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar,
3. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi tanggal 31 Desember 2025 sesuai POJK mengenai integritas pelaporan keuangan Bank,
4. Hasil Penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal dalam proses' pelaporan keuangan BPR sesuai dengan dokumen Penilaian Sendiri Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bantul, 23 April 2026
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Cicilia Wiwik
Direktur

IX. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	**PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA**
Alamat	**Jalan Gedong Kuning No. 150A Banguntapan Bantul DIY**
Nomor Telepon	**(0274) 385192**

Penjelasan Umum:

PT. BPR Chandra Muktiartha melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang perbankan dan wajib menerapkan Tata Kelola yang baik. Penerapan Tata Kelola yang baik wajib dilaksanakan demi menjaga kelangsungan usaha BPR jangka panjang serta memaksimalkan nilai perusahaan. Kebijakan Tata Kelola BPR yang mengacu pada ketentuan POJK No 9/ POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dimana setiap BPR membuat Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menerapkan Tata Kelola yang baik, BPR menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR yaitu Keterbukaan, Akuntanbilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kewajaran. Manajemen BPR berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada POJK No 9/ POJK.03/2024 dan SEOJK No 12/ SEOJK.03/2024 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat . Berikut adalah pokok-pokok Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2025:

A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi.
B. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.
H. Rasio Gaji Tertinggi & Gaji Terendah.
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
K. Jumlah Penyimpangan Internal (internal fraud).
L. Permasalahan Hukum yang dhadapi
M. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.
N. Pemberian Dana untuk Kegiatan sosial dan Kegiatan Lain

Penerapan Tata Kelola yang cukup baik di PT. BPR Chandra Muktiartha pada tahun 2025, menunjukan keberlanjutan BPR yang cukup positif meskipun kinerja BPR belum optimal dan belum sepenuhnya tercapai target-target di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi

perekonomian dan sektor usaha yang belum sepenuhnya pulih.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	**2. Baik**

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Secara umum manajemen BPR telah menerapkan tata kelola yang cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	**Cicilia Wiwik**
	Jabatan	**Direktur**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Bertanggungjawab penuh pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai kewenangan, tugas & tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar BPR, keputusan RUPS & Peraturan UU yang berlaku
3. Menjalankan peran & tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen & sesuai prinsip kehati-hatian
4. Memiliki wewenang mewakili BPR sesuai ketentuan peraturan UU, anggaran dasar dan keputusan RUPS
5. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan organisasi BPR antara lain Manajemen Risiko, Kepatuhan terintegrasi & terkoordinasi & meningkatkan kemampuan antar satuan kerja
6. Menyusun & menetapkan kebijakan remunerasi serta mengevaluasi secara berkala kebijakan remunerasi bagi PE & Pegawai
7. Menindaklajuti temuan audit & rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan AI BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan & Otoritas lainnya
8. Menunjuk PE yang melaksanakan Fungsi AI, Manajemen Risiko, Kepatuhan, APU PPT, SAF, Integritas Pelaporan Keuangan Bank
9. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai
10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS
11. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
12. Menyediakan data & informasi yang akurat, relevan & tepat waktu kepada Dewan Komisaris
13. Menyusun Rencana Bisnis BPR yang mencakup rencana strategis dengan persetujuan Dewan Komisaris & menyampaikan Rencana Bisnis BPR kepada Otoritas Jasa

Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis BPR
14. Memastikan BPR telah memiliki & menerapkan semua Kebijakan & Prosedur dalam menunjang kegiatan operasional BPR
15. Bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian BPR yang disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian dalam menjalankan tugasnya
16. Bertanggungjawab atas ketaatan pelaksanaan Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi yang dievaluasi secara berkala

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Penerapan Tata Kelola yang baik telah diupayakan serta penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Direksi telah membuat ketentuan internal BPR perihal cleansing debitur DPK dan NPL dari Bagian Pemasaran Kredit ke Bagian Pencegahan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (tim Remedial).
3. Direksi telah membuat ketentuan internal BPR perihal penyesuaian suku bunga kredit di bawah BLR sesuai risiko kredit.
4. Direksi telah melakukan review terhadap ketentuan- ketentuan internal BPR, dan telah dilakukan pembaruan ketentuan-ketentuan internal BPR terkait dengan kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga dan operasional BPR secara proper dan sesuai dengan SOP (mereview SOP/SK DIR/ Memo yang terkait termasuk SOP Operasional itu sendiri.
5. Upaya penguatan fungsi Kepatuhan dan Audit Internal masih terus dilakukan.
6. Direksi telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk PE Remedial/ Collection untuk menangani akun T3 dan NPL.
7. Direksi telah membentuk PIC AYDA dan Lelang yang bertugas penuh mengelola AYDA secara fokus guna accountability jelas dan percepatan keputusan.
8. Direksi mengupayakan pengelolaan SDM sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu evaluasi dan kajian terhadap SDM di unit kerja masing- masing secara berkesinambungan dan penyempurnaan struktur organisasi atas dasar jalinan jabatan yang lebih realistis dengan orientasi hasil dan tingkat efisiensi biaya.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	**FX Soewardi WP**
	Jabatan	**Komisaris Utama**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
b. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS.
c. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

serta memberikan nasihat kepada Direksi.
e. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pada huruf c, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
f. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR, kecuali terkait dengan :
1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
g. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap :
• Pelaksanaa fungsi kepatuhan pada BPR
• Penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
h. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya.
i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
• Pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/ atau
• Keadaan atau perkiraan kadaaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

2.	Nama	**CH Bagus Anggara Jita**
	Jabatan	**Komisaris**

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
b. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS.
c. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
e. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pada huruf c, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
f. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR, kecuali terkait dengan :
1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

g. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap :
• Pelaksanaa fungsi kepatuhan pada BPR
• Penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
h. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya.
i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
• Pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/ atau
• Keadaan atau perkiraan kadaaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Melaksanakan penerapan Tata Kelola yang baik dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Direksi agar menetapkan Account T3 (>61-90 hari) digabung ke tim NPL/ Remedial disetiap jaringan kantor.
3. Direksi agar memberlakukan penyesuaian suku bunga kredit di bawah BLR sesuai risiko kredit.
4. Direksi agar melakukan review terhadap semua perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang proper dan sesuai dengan SOP (mereview SOP/ SK DIR/ Memo yang terkait serta perbaikan SOP Operasional.
5. Penguatan fungsi Kepatuhan dan Audit Internal.
6. Direksi agar melakukan perubahan struktur organisasi untuk PE Remedial/ Collection untuk menangani akun T3 dan NPL.
7. Direksi agar membentuk PIC AYDA dan Lelang yang bertugas penuh mengelola AYDA secara fokus guna accountability jelas dan percepatan keputusan.
8. Evaluasi dan kajian terhadap SDM di unit kerja masing- masing secara berkesinambungan dan penyempurnaan struktur organisasi atas dasar jalinan jabatan yang lebih realistis dengan orientasi hasil dan tingkat efisiensi biaya.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

PT. BPR Chandra Muktiartha dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) belum wajib membentuk komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

PT. BPR Chandra Muktiartha dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) belum wajib membentuk komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	**Cicilia Wiwik**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	**FX Soewardi WP**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
2.	Nama	**CH Bagus Anggara Jita**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**

Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS		
1.	Nama	**Agus Pramono**
	Nama Kelompok Usaha BPR	**BPR Saudara**
	Persentase Kepemilikan (%)	**45,67**
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**45,67**
2.	Nama	**Halim Susanto**
	Nama Kelompok Usaha BPR	**BPR Saudara**
	Persentase Kepemilikan (%)	**34,33**
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**34,33**
3.	Nama	**PT. Merdeka Jaya Sentosa**

	Nama Kelompok Usaha BPR	**BPR Saudara**
	Persentase Kepemilikan (%)	**20,00**
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	**20,00**

Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR. Seluruh pemegang saham memiliki saham pada kelompok usaha BPR yaitu BPR Saudara.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain		
1.	Nama	**Cicilia Wiwik**
	Nama Bank/Perusahaan Lain	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain		
1.	Nama	**FX Soewardi WP**
	Nama Bank/Perusahaan Lain	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**
2.	Nama	**CH Bagus Anggara Jita**
	Nama Bank/Perusahaan Lain	**Tidak Ada Kepemilikan Saham**
	Persentase Kepemilikan (%)	**0,00**

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	**Cicilia Wiwik**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**

	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	**FX Soewardi WP**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**
2.	Nama	**CH Bagus Anggara Jita**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	**Agus Pramono**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Ada**
2.	Nama	**Halim Susanto**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Ada**

3.	Nama	**PT. Merdeka Jaya Sentosa**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Ada**

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham pada BPR
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain maupun Pemegang Saham pada BPR
Pemegang saham Agus Pramono dan Pemegang saham Halim Susanto memiliki hubungan keuangan dengan PT. Merdeka Jaya Sentosa, keduanya sebagai pemegang saham pada PT Merdeka Jaya Sentosa

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	**Cicilia Wiwik**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	**FX Soewardi WP**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**
2.	Nama	**CH Bagus Anggara Jita**

	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Tidak ada**

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	**Agus Pramono**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Agus Pramono memiliki hubungan keluarga dengan Halim Susanto**
2.	Nama	**Halim Susanto**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Halim Susanto memiliki hubungan keluarga dengan Agus Pramono**
3.	Nama	**PT. Merdeka Jaya Sentosa**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	**Tidak ada**
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	**Agus Pramono dan Halim Susanto pemegang saham di PT. Merdeka Jaya Sentosa saling memiliki hubungan keluarga satu sama lain.**

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham pada BPR
Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain maupun Pemegang Saham pada BPR
Pemegang saham Agus Pramono dengan Halim Susanto memiliki hubungan keluarga dan keduanya pemegang saham di PT. Merdeka Jaya Sentosa

11. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	**1 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	**Rp300.000.000**
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	**2 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	**Rp444.000.000**

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	**1 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	**Rp30.000.000**
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	**1 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	**Rp2.850.000**

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tantiem	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	**Rp0**

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	**0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	**Rp0**

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	**0 orang**
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	**1 orang**
Jumlah Nominal Transportasi Direksi	**Rp0**

(Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	**Rp0**

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	**Rp0**
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	**0 orang**
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	**Rp0**

Kebijakan remunerasi berupa gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS
Jumlah gaji, tunjangan dan transportasi Direksi sampai dengan 31 Desember 2025 diterima oleh 1 orang Direksi.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	**5,66 : 1**

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	**1,00 : 1**

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	**1,06 : 1**

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	**1,32 : 1**

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	**1,67 : 1**

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	**06 Agustus 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir Juli 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur
4. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

2.	Tanggal Rapat	**04 September 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir Agustus 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur

4. Pemantauan laporan keuangan
5. Pengendalian risiko operasional
6. Review pelaksanaan sosialisasi Literasi dan Inklusi keuangan Bank kepada masyarakat
7. Review pelayanan pengaduan nasabah
8. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

3.	Tanggal Rapat	**08 Oktober 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir September 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur
4. Penerapan APU PPT
5. Standard penyelenggaraan teknologi informasi BPR
6. Akses pembiayaan UMKM
7. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

4.	Tanggal Rapat	**06 November 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir Oktober 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur
4. Pemantauan laporan keuangan
5. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

5.	Tanggal Rapat	**05 Desember 2025**
	Jumlah Peserta	**2 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan akhir November 2025
3. Pemantauan pemenuhan kewajiban debitur
4. Strategi upaya pencegahan dan penyelesaian NPL
5. Pemantauan laporan keuangan
6. Rencana Bisnis BPR
7. Akses pembiayaan UMKM
8. Rencana penggabungan BPR
9. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk Direksi

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 5 (lima) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2025.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	**FX Soewardi WP**
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	**5 kali hadir**
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	**0 kali hadir**
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	**CH Bagus Anggara Jita**
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	**5 kali hadir**
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	**0 kali hadir**

Pada tahun 2025 terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris, diantaranya Imron Fauzie dan Subagyo Nugroho digantikan oleh FX Soewardi WP dan CH Bagus Anggara Jita pada bulan Juli berdasarkan RUPS.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	**0 kasus**
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	**0 kasus**
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	**0 kasus**

Selama tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan internal/internal fraud (nihil).

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	**0 kasus**
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	**0 kasus**

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	**2 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	**0 kasus**

Permasalahan hukum yang dihadapi selama tahun 2025 sebanyak 2 kasus untuk Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian.
2 kasus tersebut terdiri dari 1 kasus nasabah Kantor Cabang Wonosari dan 1 kasus nasabah Kantor Cabang Yogyakarta.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2025.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	**24 Maret 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan Takbir Keliling Ngampilan**
	Jumlah (Rp)	**Rp250.000**
2.	Tanggal Pelaksanaan	**19 Mei 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan Idul Adha Ngampilan**
	Jumlah (Rp)	**Rp250.000**
3.	Tanggal Pelaksanaan	**14 Juni 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan Event Kesenian Ngampilan**
	Jumlah (Rp)	**Rp250.000**
4.	Tanggal Pelaksanaan	**12 Agustus 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**

	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan HUT RI Ngampilan**
	Jumlah (Rp)	**Rp400.000**
5.	Tanggal Pelaksanaan	**20 Agustus 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan Kegiatan Lomba Mancing Ngampilan**
	Jumlah (Rp)	**Rp100.000**
6.	Tanggal Pelaksanaan	**29 November 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan Kegiatan Acara Kitab Bakpia Ngampilan**
	Jumlah (Rp)	**Rp150.000**
7.	Tanggal Pelaksanaan	**23 Juli 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan Untuk Paroko Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kemetiran**
	Jumlah (Rp)	**Rp200.000**
8.	Tanggal Pelaksanaan	**12 Desember 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Donasi Peduli Bencana Alam Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh**
	Jumlah (Rp)	**Rp1.000.000**
9.	Tanggal Pelaksanaan	**20 Maret 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan Kegiatan Takbir Keliling Forum**

		Remaja Islam Baleharjo
	Jumlah (Rp)	**Rp250.000**
10.	Tanggal Pelaksanaan	**23 Mei 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan Penyelenggaraan Rasul Kelurahan Baleharjo 2025**
	Jumlah (Rp)	**Rp250.000**
11.	Tanggal Pelaksanaan	**30 Juli 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan bersih desa dan HUT Kelurahan Gedangrejo Karangmojo**
	Jumlah (Rp)	**Rp250.000**
12.	Tanggal Pelaksanaan	**13 Agustus 2025**
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	**01. Kegiatan Sosial**
	Penerima Dana	**Panitia**
	Penjelasan Kegiatan	**Sumbangan Sponsorship Turnamen Voli Kelurahan Sidorejo Cup III 2025**
	Jumlah (Rp)	**Rp250.000**

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Website: www.bprcma.co.id. Telepon: 0274 385192.

Lembar Pernyataan
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Posisi Tanggal 31 Desember 2025
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keuangan Posisi Tanggal 31 Desember 2025 PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA telah ditinjau dan dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bantul, 23 April 2026
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

FX Soewardi WP
Komisaris Utama

CH Bagus Anggara Jita
Komisaris

Cicilia Wiwik
Direktur

LAPORAN KEBERLANJUTAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
TAHUN 2025

JL. GEDONGKUNING NO.150A BANGUNTAPAN BANTUL

TELP : 0274 385192

Daftar Isi

Daftar Isi *i*

Kata Pengantar *ii*

1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan *7*

2.1. Kinerja Ekonomi *7*

2.2. Kinerja Lingkungan Hidup *10*

2.3. Kinerja Sosial *11*

2.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan *13*

3. Profil Bank *15*

4. Penjelasan Direksi *18*

5. Tata Kelola Keberlanjutan *25*

Umpan Balik *28*

Kata Pengantar

Di tahun 2025, BPR CHANDRA MUKTIARTHA telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR CHANDRA MUKTIARTHA menerapkan program- program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat)*, profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST). Sebagai konsekuensinya,bank harus bersikap cermat dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon debitur, menghindari aktivitas bisnis yang merusak lingkungan.

BPR CHANDRA MUKTIARTHA berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP),khususnya dalam hal keberlanjutan oprasional bank. Mengabaikan aspek sosial dan lingkungan dapat meningkatkan resiko yang dihadapi perbankan,terutama resiko kredit akibat potensi gagal bayar dari debitur yang bisnisnya dapat merugikan lingkungan dan menghambat usaha t peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR - *Sustainability Report*) BPR CHANDRA MUKTIARTHA Tahun 2025 imenyajikan data mengenai kinerja keberlanjutan Bank,dengan mencakup bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. BPR CHANDRA MUKTIARTHA dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk pertama kali menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2025 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 dan wajib disampaikan ke OJK secara luring *(offline)* paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Dengan demikian BPR CHANDRA MUKTIARTHA menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.

1.
Pendahuluan dan Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan

Berdasarkan POJK No. 51 / POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 mengenai Keuangan Berkelanjutan,khususnya pasal 10 mewajibkan BPR/BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/BPRS wajib menyusun dan **menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR *(Sustainability Report)* Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026** bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik *(feedback)* untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Penyusunan Laporan Keberlanjutan BPR CHANDRA MUKTIARTHA tahun 2025 mengacu standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. BPR CHANDRA MUKTIARTHA membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2025 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BPR CHANDRA MUKTIARTHA tahun 2025 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/ POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Latar belakang berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Bank sehingga diyakini akurasinya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik-topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu- isu yang berpengaruh signifkan bagi BPR CHANDRA MUKTIARTHA serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan

berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPR CHANDRA MUKTIARTHA adalah:

1. **Investasi yang bertanggung jawab;** adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisi potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan BPR CHANDRA MUKTIARTHA dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup**; Kami telah memiliki prinsip kehati- hatian *(Prudential Banking)* dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko-risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. **Prinsip Tata Kelola;** Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip- prinsip penerapan GCG *(Good Corporate Governance),* yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif;** Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR CHANDRA MUKTIARTHA https:// www.bprgodital.co.id
6. **Prinsip Inklusif;** Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan BPR CHANDRA MUKTIARTHA.
7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas** ; Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi;** Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan- kegiatan yang memberdayakan masyarakat.

Sedangkan **tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)** adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lainmenyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.

Strategi Keberlanjutan

BPR Chandra Muktiartha menerapkan strategi keuangan berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi Bank tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Fokus pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Tujuan keuangan berkelanjutan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .

Implementasi dilakukan melalui rencana kerja dan pengembangan RAKB,serta penerapan prinsip go green dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Menjalankan program hemat air.
2. Penggunaan tumbler
3. Pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.

1.

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan			
Total Aset	328.977.475.569	387.082.393.256	399.542.633.644
Aset Produktif	306.571.146.171	380.682.816.469	402.682.807.769
Dana Pihak Ketiga	291.850.969.241	351.208.033.100	332.002.635.486
Pendapatan Operasional	42.961.265.971	49.629.463.291	50.345.865.621
Beban Operasional	40.990.275.307	47.438.310.554	49.566.794.537
Laba Bersih	1.637.497.017	1.675.734.310	800.419.961
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	14,14	15,31	15,85
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	48,97	24,64	13,95
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	32,87	22,17	13,81
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	307	3,63	0
NPL gross	40,62	25,31	15,93
NPL nett	34,63	21,98	12,65
Return on Asset (ROA)	0,54	0,54	0,24
Return on Equity (ROE)	4,77	5,02	2,52
Net Interest Margin (NIM)	3,60	5,46	6,41
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,01	94,97	95,77

Terdapat penurunan laba BPR CHANDRA MUKTIARTHA di sepanjang tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 dan mengalami kenaikan di banding tahun 2023.Sedangkan aset di tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024 dan di tahun 2023.

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	300.377.677.748	291.850.969.241	351.208.033.100	364.566.536.736
a.1. DPK	300.377.677.748	291.850.969.241	351.208.033.100	364.566.536.736
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	248.769.519.730	248.101.986.403	333.530.803.590	349.135.266.374
b.1. Kredit / Pembiayaan	248.769.519.730	248.101.986.403	333.530.803.590	349.135.266.374
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	300.377.677.748	291.850.969.241	351.208.033.100	364.566.536.736
a.1. DPK	300.377.677.748	291.850.969.241	351.208.033.100	364.566.536.736
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	248.769.519.730	248.101.986.403	333.530.803.590	349.135.266.374
b.1. Kredit / Pembiayaan	248.769.519.730	248.101.986.403	333.530.803.590	349.135.266.374
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	300.377.677.748	291.850.969.241	351.208.033.100	364.566.536.736
Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	248.769.519.730	248.101.986.403	333.530.803.590	349.135.266.374
Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-

Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	100%	100%	100%	100%
a.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. Kredit / Pembiayaan	100%	100%	100%	100%
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-

Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	248.769.519.730	248.101.986.403	333.530.803.590	349.135.266.374
Total outstanding kredit/ pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a - l)	248.769.519.730	248.101.986.403	333.530.803.590	349.135.266.374

Penghimpunan dana mengalami penurunan di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dan 2023

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL

BPR CHANDRA MUKTIARTHA telah memulai inisiatif dalam upaya efisiensi penggunaan kebutuhan operasional bank. Sosialiasi ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional BPR CHANDRA MUKTIARTHA tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan- bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan tumbler yang disiapkan pegawai masing-masing.

Penggunaan Energi (antara lain Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar (Liter)	51.000	49.781	565.341	55.119
b. Penggunaan Listrik (kWh)	40.000	36.803	39.534	37.098
c. Penggunaan Air (m3)	320	330	348	424
d. Penggunaan Kertas (kg)	300	288	311	364

Total Emisi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Scope 1 (Ton CO2)	-	-	-	-
b. Scope 2 (Ton CO2)	-	-	-	-
c. Scope 3 (Ton CO2)	-	-	-	-
c.1. Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
c.2. Non-Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
d. Pengurangan Emisi (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Emisi Scope 1,2,3 (a + b + c - d)	-	-	-	-
Total Limbah Dibuang (Ton CO2)	-	-	-	-
Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Satuan Rupiah)	-	-	-	-

3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan, Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi

Komitmen Perusahaan dan Kinerja Keuangan Inklusi

BPR berkomitmen pada inklusivitas keuangan serta memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di Kabupaten Bantul.

Perkembangan Laku Pandai

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Jumlah Agen Laku Pandai	-	-	-	-
b. Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan (Basic Saving Account)	-	-	-	-
c. Jumlah Kepemilikan Rekening Kredit yang melalui referal Agen Laku Pandai	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

BPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di Kabupaten Bantul.

Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	130	146	162	171
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	4	3	5	6
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	2	2	4	5
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita	1	1	1	1
Jumlah Pegawai Difable	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

BPR CHANDRA MUKTIARTHA ikut berkontribusi memberikan sebagian dari laba yang disisihkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial Serta Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	10.000.000	9.550.000	9.000.000	17.650.000
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	1	1	1	1

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR CHANDRA MUKTIARTHA berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan produk dan layanan ygng optimal dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, BPR CHANDRA MUKTIARTHA melakukannya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Selain itu, BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga mengembangkan program *Credit Scoring*, Aplikasi Monitoring Kredit, dan Laporan Tahunan Berbasis WEB bekerja sama dengan Vendor.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

BPR CHANDRA MUKTIARTHA menjamin bahwa produk-produk dan layanan yang ditawarkan telah resmi dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Jasa Keuangan sehingga memberikan keamanannya bagi nasabah. Untuk mengurangi risiko kerugian yang terkait atas produk dan jasa tersebut, BPR CHANDRA MUKTIARTHA secara kontinyu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Informasi tersebut dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, diharapkan mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR CHANDRA MUKTIARTHA telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPR CHANDRA MUKTIARTHA akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPR CHANDRA MUKTIARTHA pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPR CHANDRA MUKTIARTHA maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Meskipun BPR Chandra Muktiartha belum melaksanakan survei kepuasan pelanggan terkait produk dan/ jasa Keuangan Berkelanjutan, selama tahun 2025 tidak tercatat adanya keluhan dari nasabah maupun masyarakat mengenai produk dan jasa Bank yang berpotensi merusak lingkungan hidup atau berdampak buruj pada kesejahtraan sosial.

3. Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	**PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA**
Alamat	**JL.GEDONG KUNING NO.150 A BANGUNTAPAN BANTUL**
Nomor Telepon	**0274376276**
Email	**bprcma@gmail.com**
Website	**www.bprcma.co.id**

Skala Usaha Bank

Total Aset dan Kewajiban

Jumlah aset di tahun 2025 sebesar Rp 329 Milyar . Dan kewajiban tahun 2025 Rp 294 Milyar.

Jumlah pegawai

Sepanjang tahun 2025 Bank memiliki SDM total 149 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai dengan besaran gaji minimal sesuai upah minimum Pemerintah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta. Demografi secara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Persentasi Kepemilikan Saham

NO	NAMA	JUMLAH LEMBAR SAHAM	NOMINAL	PROPORSI
1	AGUS PRAMONO	9.133	9.133.000.000	45,67%
2	HALIM SUSANTO	6.867	6.867.000.000	34,33%
3	PT.MERDEKA JAYA SENTOSA	4.000	4.000.000.000	20,00%

Produk dan Layanan

Produk yang disediakan oleh BPR CHANDRA MUKTIARTHA sesuai informasi pada tabel berikut ini.

JENIS PRODUK	DESKRIPSI
TABUNGAN	1. MUKTI
	2. WISATA PLUS
	3.TABUNGANKU
	4.RISMA
	5.TAMASYA PLUS
	6. CMA PRIORITAS
DEPOSITO	1.DEPOSITO 1 BULAN
	2.DEPOSITO 3 BULAN
	3.DEPOSITO 6 BULAN
	4.DEPOSITO 12 BULAN
KREDIT	1.KREDIT MODAL KERJA
	2.KREDIT INVESTASI
	3.KREDIT KONSUMTIF
	4.KREDIT KARYAWAN

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

b. Misi Keberlanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)

Penjelasan Lainnya

BPR CHANDRA MUKTIARTHA mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan.

4.
Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank berkomitmen untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adengan menerapkan nilai keberlanjutan melalui peningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta pembiayaan usaha berwawasan lingkungan,hususnya sektor UMKM usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai agian dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), BPR menyusun RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dengan rencana 5 (lima) tahun dan Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2025.

Targetnya mencakup sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapakan

operasional Perbankan Hijau *(green banking).*

Laporan Keberlanjutan memuat komitmen dan strategi bank,termasuk prinsip kehati-hatian ,efisiensi operasional yang ramah lingkungan.pengembangan kompetensi staf dalam aspek sosial dan lingkungan,inklusi keuangan serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pencapaian Target

BPR Chandra Muktiartha senantiasa meningkatkan strategi keberlanjutan dengan memitigasi risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

Tantangan utama adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan keberlanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjtuan.

Selama tahun 2025, BPR CHANDRA MUKTIARTHA berkomitmen untuk belajar dan berinovasi dalam layanan keuangan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BPR CHANDRA MUKTIARTHA kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan

pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Apresiasi

BPR Chandra Muktiartha mengapresiasi dukungan seluruh karyawan dalam penerapan keuangan berkelanjutan dan berharap kerjasama terus berlanjut untuk menciptakan pertumbuhan dan pengelolaan isu berkelanjutan.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal

1. Fokus Bisnis Bank

Kendala dalam implementasi **keuangan berkelanjutan** di BPR CHANDRA MUKTIARTHA seringkali berhubungan dengan kemampuan internal organisasi untuk beradaptasi dari fokus laba instan menjadi perkembangan yang menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Triple bottom line).

2. Operasional Bank

Kesulitan utama dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan terletak pada bagaimana prinsip-prinsip LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pemberian kredit, pelayanan kepada nasabah, hingga penyusunan laporan. Seringkali, terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan yang tertulis dan implementasinya di lapangan.

3. Kebijakan Internal

BPR CHANDRA MUKTIARTHA belum sepenuhnya memiliki pedoman internal yang secara jelas dan komprehensif untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, maupun Kebijakan Penerapan Tata kelola.

4. Keahlian SDM Bank

1. **BPR CHANDRA MUKTIARTHA menyadari bahwa belum ada SDM yang ditugaskan sebagai** spesialis LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola. Fungsi ini biasanya dirangkap oleh Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang juga memiliki beban kerja besar dan perangkapan jabatan.
2. **Kemampuan identifikasi risiko lingkungan dan sosial.** Analis kredit umumnya dilatih untuk membaca laporan keuangan dan arus kas, namun belum terbiasa menilai potensi pencemaran, keselamatan kerja, konflik sosial, atau kepatuhan usaha terhadap regulasi lingkungan hidup.

5. Lainnya

Tantangan lainnya yang tidak kalah beratnya adalah adalah profil dan kesiapan debitur,karena nasabah BPR kebanyakan dari segmen mikro dan kecil yang umumnya belum memiliki kesadaran atau kemampuan untuk menerapkan praktik usaha ramah lingkungan. Banyak usaha masih informal, sehingga sulit menyediakan dokumen legalitas, izin lingkungan, atau bukti pengelolaan limbah.

Upaya yang dilakukan

BPR CHANDRA MUKTIARTHA menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bukan sekedar memenuhi POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, tetapi bagaimana bisa dijalankan dengan kapasitas Bank yang relatif terbatas.

Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan komitmen manajemen**
   Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan arah strategis melalui kebijakan, rencana aksi, serta penyediaan sumber daya. Penetapan tesebut penting agar seluruh unit memahami bahwa keberlanjutan adalah bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar proyek tambahan
2. **Penyusunan kebijakan dan prosedur yang sederhana**
   Membuat implementasi lebih mudah diterapkan agar account officer memahami Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
3. **Peningkatan kapasitas SDM**
   Dilakukan melalui pelatihan mengenai kondisi di lapangan tentang UMKM.

4. **Integrasi ke proses kredit**
   Aspek keberlanjutan mulai dimasukkan dalam tahap analisis, persetujuan, hingga monitoring. Tidak harus rumit, tetapi cukup memastikan adanya pertimbangan dampak lingkungan dan sosial.
5. **Pengembangan produk**
   Misalnya pemberian suku bunga rendah untuk usaha yang berkaitan dengan ramah lingkungan, pengelolaan limbah, atau efisiensi energi.
6. **Peningkatan kualitas data dan pelaporan**
   Walaupun sistem IT terbatas, BPR dapat memulai dengan *template* manual atau penandaan portofolio untuk memudahkan kompilasi data secara bertahap.
7. **Kerja sama dengan pihak eksternal**
   BPR dapat menggandeng dinas pemerintah, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping guna membantu penilaian maupun pembinaan debitur.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal

1. Kebijakan Pemerintah

BPR CHANDRA MUKTIARTHA sering menghadapi dinamika yang tidak sederhana dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Walaupun arah kebijakan nasional mendorong praktik ESG, penerjemahannya pada bank berskala kecil seperti BPR membutuhkan penyesuaian yang cukup besar.

Beberapa tantangan yang umum dirasakan antara lain berikut.

1. **Perubahan dan perkembangan regulasi yang cepat.**
   BPR perlu waktu untuk memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan proses internalnya.
2. **Kebutuhan pelaporan yang semakin detail.**
   Permintaan data portofolio berkelanjutan sering memerlukan pemetaan sektor dan informasi debitur yang belum tentu tersedia dan menjadi beban bagi BPR.
3. **Standar yang cenderung mengacu pada praktik bank umum.**
   Sebagian pedoman dirancang dengan asumsi kapasitas bank besar, sehingga implementasinya pada BPR memerlukan penyederhanaan.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

Secara garis Besar BPR CHANDRA MUKTIARTHA menghadapi tantangan secara eksternal dan jika dipetakan menjadi hal-hal sebagai berikut sesuai pada gambaran pada masing-masing level di bawah ini.

Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, isu utama biasanya berkaitan dengan struktur ekonomi dan kesiapan pelaku usaha.

1. Ketergantungan pada sektor tertentu yang belum sepenuhnya ramah lingkungan karena memerlukan biaya yang besar.
2. Sebagian besar pelaku usaha masih fokus pada keberlangsungan bisnis jangka pendek sehingga investasi pada teknologi atau proses yang lebih berkelanjutan belum menjadi prioritas.

Tingkat Regional (daerah/wilayah)

Prioritas pembangunan daerah sering masih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja cepat, sehingga aspek lingkungan belum selalu menjadi pertimbangan utama.

Kualitas data dan pengawasan lingkungan antar daerah juga bisa berbeda, menyulitkan lembaga keuangan untuk melakukan penilaian yang seragam.

Tingkat Global

Ada tuntutan terhadap transparansi dan standar ESG internasional, yang terus berkembang dan memerlukan penyesuaian.

Fluktuasi ekonomi dunia, perubahan harga komoditas, dan risiko perubahan iklim menimbulkan ketidakpastian investasi.

Secara keseluruhan, tantangan pada tiga level ini saling terkait. Kondisi global memengaruhi kebijakan nasional, lalu diterjemahkan secara berbeda di tiap daerah. Lembaga keuangan, termasuk BPR, berada di tengah dinamika tersebut.

3. Lainnya

1. Sebagian besar debitur BPR datang dari kalangan usaha mikro dan kecil yang pemahaman lingkungannya masih terbatas. Banyak bisnis yang belum berizin, belum memiliki standar pengelolaan limbah, atau praktik kerja yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyulitkan bank dalam mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi aspek keberlanjutan.
2. Persyaratan tambahan atau pertanyaan terkait pengaruh terhadap lingkungan dapat dianggap sebagai penghalang dalam mendapatkan pinjaman. Apabila tidak diatasi dengan tepat, hal ini berpotensi mengurangi ketertarikan calon debitur.

Upaya yang dilakukan

Untuk menghadapi tantangan eksternal dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR Chandra Muktiartha menempuh langkah seperti meningkatkan komunikasi dengan regulator, mengikuti forum industri/ perbarindo, serta menerapkan prinsip kehati- hatian dengan pendekatan yang paling realistis sesuai kapasitas,antara lain edukasi dan literasi kepada nasabah,pendampingan UMKM,membangun kemitraan lokal,mengembangkan produk yang sesuai dengan pasar.

5.
Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di Bank mencakup lima pilar utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. GCG menjadi dasar pengelolaan perusahaan yang sesuai regulasi dan etika perbankan. Di BPR CHANDRA MUKTIARTHA, struktur tata kelola terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi dengan tugas masing-masing.

Dalam penerapan GCG, bank menggunakan kerangka kerja yang mencakup struktur, proses, dan hasil tata kelola. Dewan Komisaris bertugas menyetujui dan mengawasi implementasi kebijakan serta laporan Keuangan Berkelanjutan, sedangkan Direksi menyusun dan mengusulkannya.

Sebagai BPR dengan modal inti di bawah Rp50 miliar, BPR CHANDRA MUKTIARTHA berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan sesuai POJK No.51/POJK.03/2017. Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaannya, dibantu Direktur YMF Kepatuhan sebagai Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan. Tim ini menyusun, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan. Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko bertindak sebagai koordinator yang mengatur pelaksanaan teknis dan pelaporan kepada pihak internal serta OJK.

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	-	-	-
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	2	2	1

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	4	4	4
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	6	6	6
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	48	48	46
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	184	192	195

Tim berupaya melakukan sosialisasi, adapun materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan kategori kegiatan yang tergolong sebagai KUB. Dengan demikian, Bank berharap dapat mengembangkan portofolio produk yang termasuk dalam kategori KUB di masa mendatang.

- Sosialisasi program kerja implementasi keuangan berkelanjutan kepada seluruh SDM pada tanggal 29 Desember 2025 yang diikuti seluruh karyawan.

Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2025.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

Pemegang Saham

Menekan manajemen agar menerapkan praktik berkelanjutan.

Pemerintah

Memastikan lembaga keuangan dan perusahaan mematuhi aturan

Otoritas

Memastikan keuangan tidak hanya mengejar profit, tapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Akademisi

Mengembangkan alat ukur keberlanjutan indeks ESG dan mengkaji resiko perubahan iklim pada sektor keuangan.

Praktisi

Perusahaan menerapkan standar ramah lingkungan dalam operasional

Pegawai

Pegawai operasional mengurangi penggunaan energi/kertas.

Nasabah

UMKM mengajukan pembiayaan untuk usaha ramah lingkungan.

Lainnya

Keuangan berkelanjutan melibatkan ekosistem luas, bukan hanya lembaga keuangan, tapi juga investor, perusahaan, masyarakat, hingga organisasi global yang saling memengaruhi.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPR CHANDRA MUKTIARTHA yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPR CHANDRA MUKTIARTHA menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

BPR CHANDRA MUKTIARTHA memberikan akses informasi seluas- luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik *(feedback)* mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL.GEDONG KUNING NO.150 A
BANGUNTAPAN BANTUL
Telephone (0274) 376276
Email : bprcma@gmail.com

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang pertama kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Telepon: 0274 385192
Website: www.bprcma.co.id, Email: bprcma@bprcma.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025 PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan **bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BANTUL, 23 April 2026

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

CICILIA WIWIK
DIREKTUR

FX. Soewardi WP
Komisaris Utama

Ch. Bagus Anggara Jita, S.I.P
Komisaris

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL.Gedong Kuning No.150 A Banguntapan Bantul
LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI
PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
TAHUN 2025

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Status

NO	Status Kepegawaian	K.Pusat	KC Wonsa	KC Kota	Jumlah
1	Tetap	66	38	16	**120**
2	Kontrak	18	0	8	**26**
3	**Jumlah**	**84**	**38**	**24**	**146**

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PUSAT	Cabang Wonosari	Cabang Kota	Jumlah
Laki-laki	52	17	12	81
Perempuan	32	21	12	65
Jumlah	**84**	**38**	**24**	**146**

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PUSAT	Cabang Wonosari	Cabang Kota	Jumlah
SD/MI	0	0	0	0
SMP/MTS	1	1	0	2
SMA/SMK/MAN	15	8	3	26
D1	2	1	0	3
D2	0	0	0	0
D3	11	6	5	22
S1	53	22	16	91
S2	2	0	0	2
Jumlah				**146**

4. Demografi Pegawai Berdasarkan Usia

Usia	PUSAT	Cabang Wonosari	Cabang Kota	Jumlah
>55	1			**1**
45≤ usia <55	9	0	1	**10**
35≤ usia <45	35	18	4	**57**
25≤ usia <35	35	18	15	**68**
Usia <=25	4	2	4	**10**
Jumlah	**84**	**38**	**24**	**146**

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Website: www.bprcma.co.id. Telepon: 0274 385192.

Terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA ini. Guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang kami berharap kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan di bawah ini, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA dalam pemenuhan kewajiban terhadap pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank.

   ☑ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

2. Materi Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai aspek kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pada PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA.

   ☑ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

3. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap.

   ☑ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

4. Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.

   ☑ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

5. Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.

   ☑ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

6. Laporan Keberlanjutan ini menarik dan mudah dibaca.

   ☑ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu

7. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan di masa mendatang?
   Informasi sudah cukup lengkap

8. Mohon berikan saran dan komentar terhadap Laporan Keberlanjutan ini.
   -

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Website: www.bprcma.co.id. Telepon: 0274 385192.

Profil Anda

Nama : Eko Wahyu Sujono Putro
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Institusi/Perusahaan : Moladin
Kontak (telepon, *e-mail*) : 081328067033

Kategori Pemangku Kepentingan

- ( ) Pemerintah
- ( ) Nasabah
- (✓) Karyawan
- ( ) Mitra Usaha
- ( ) Media
- ( ) Masyarakat
- ( ) LSM
- ( ) Lain-Lain

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirim ke:

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Telepon : 0274 385192
Website : www.bprcma.co.id
E-mail : bprcma@bprcma.co.id

LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Per 31 Desember 2025

JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
TELEPON: 0274 385192

LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK

Posisi Keuangan	:	31 Desember 2025
Nama BPR	:	PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
Alamat	:	JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Nomor Telepon	:	0274 385192
Modal Inti	:	Rp26.710.394.791
Total Aset	:	Rp328.977.475.569

PT BPR Chandra Muktiartha melaksanakan sistem pengendalian internal dalam proses Pelaporan Keuangan Bank untuk meningkatkan integritas pelaporan keuangan Bank sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No. 15 Tahun 2024. Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan PT BPR Chandra Muktiartha bertujuan untuk : (1) memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; (2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; (3) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan (4) Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan (PIPKu) dilaksanakan agar Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan semakin berintegritas. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab Direksi. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di s **etiap jenjang organisasi serta melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan pasal 8 ayat (3) POJK No. 15 Tahun 2024.**

Dasar Penetapan

Bank mengimplementasikan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
2. POJK No. 9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

I. Pendahuluan

PT BPR Chandra Muktiartha melaksanakan penilaian sendiri terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank menggunakan Kerangka Kerja COSO dengan 5 (lima) Komponen Pengendalian Internal sesuai informasi sebagai berikut:

1. Metodologi

COSO *framework* adalah kerangka kerja yang dapat membantu BPR menghubungkan pengendalian internal dengan proses bisnis. Caranya yaitu dengan melaksanakan pengendalian internal pada aktivitas sehari- hari. Jika digunakan secara efektif, COSO mampu menjamin pemenuhan standar etika dan keamanan bagi para pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Kerangka

Penilaian sendiri terhadap 5 (lima) komponen pengendalian COSO yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Aktivitas Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan.

2.1. Lingkungan Pengendalian *(Control Environment)*

Pengendalian lingkungan mencakup integritas dan nilai- nilai etika serta nilai- nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian internal di seluruh jenjang organisasi.

2.2. Penilaian Risiko

Bank mengidentifikasi, menilai atau mengukur risiko- risiko untuk menyakini kecukupan pengendalian internal bahwa risiko dikelola sesuai dengan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank.

2.3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk memitigasi risiko dalam rangka penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas.

2.4. Informasi dan Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan agar terdapat pendistribusian informasi secara cepat, akurat dan tepat waktu guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Unit Kerja terkait hingga Pegawai

2.5. Pemantauan

Pemantauan merupakan evaluasi yang sedang berlangsung *(on going monitoring)* di Unit Kerja, evaluasi secara terpisah yang dilakukan oleh Audit Internal maupun kombinasi dari keduanya untuk memastikan apakah masing-masing dari 5 (lima) komponen pengendalian internal telah berjalan dengan baik.

II. Profil BPR

No	Informasi	Deskripsi / Keterangan
1	Dasar Hukum Pendirian BPR dan Ijin Operasional dari Regulator	PT. BPR Chandra Muktiartha adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 73 tanggal 13 April 1993 yang dibuat dihadapan Raden Mas Surjanto Partaningrat, SH. Notaris di Yogyakarta. Kemudian dirubah dengan Akta perubahan Nomor 75 oleh Notaris yang sama pada tanggal 12 Juli 1993 untuk mendapat persetujuan/ pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat KeputusanNomor C2-7869.HT.01.01.TH.93 dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 1993. PT. BPR Chandra Muktiartha berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan- perubahannya yang terakhir dalam Akta No. 38 tanggal 15 Januari 2026 dibuat dihadapan Notaris Stefanus Yuwono Tedjo Saputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH di Semarang yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0064111 tanggal 18 Februari 2026.
2	Pemegang Saham	1. Drs. Agus Pramono (45.67%) - Pemegang Saham Pengendali (PSP) 2. Halim Susanto (34.33%) - Non PSP 3. PT. Merdeka Jaya Sentosa (20%) - Non PSP
3	Dewan Komisaris	FX Soewardi WP BSC (Komisaris Utama) CH Bagus Anggara Jita (Komisaris)
4	Direksi	Cicilia Wiwik (Direktur)
5	Jumlah Pegawai	1. Kantor Pusat : 84 2. Cabang Wonosari : 38 3. Cabang Yogyakarta : 24
6	Jaringan Kantor	Jaringan Kantor PT. BPR Chandra Muktiartha terdiri dari :

		1. Kantor Pusat, beralamat di Jl. Gedongkuning No. 150A Banguntapan Bantul 2. Kantor Cabang Wonosari, beralamat di Jl. MGR Soegiyopranoto No. 76 Baleharjo Wonosari 3. Kantor Cabang Yogyakarta, beralamat di Jl. Letjen Suprapto No. 48 Ngampilan Yogyakarta 4. Kantor Kas terdapat 2 yaitu : a. Kantor Kas Karangmojo beralamat di Jl. Wonosari Karangmojo KM 0.5 Gedangrejo Gunungkidul b. Kantor Kas Playen beralamat di Jl. Manthous Jatisari RT 016 RW 004 Playen Gunungkidul

III. Hasil Penilaian Sendiri *Self Assessment* Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan

No	Informasi	Deskripsi / Keterangan
1	Periode Self Assessment	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
2	Total Nilai	62
3	Jumlah Indikator	37
4	Rata-rata Nilai	1.68
5	**Peringkat Self Assessment**	**2**
6	**Predikat Self Assessment**	**Peringkat 2 (Cukup Memadai)**

Analisa dan Penjelasan

Kualitas 5 (lima) Komponen COSO pengendalian internal yaitu (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi & Komunikasi; (5) Pemantauan, secara umum cukup memadai dan membutuhkan perbaikan cukup signifikan agar dapat memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal pada level yang dapat diterima.

IV. Analisa dan Mitigasi Risiko

Untuk **memperkuat pengendalian internal** dalam Pelaporan Keuangan Bank maka PT BPR Chandra Muktiartha konsisten untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengendalian lingkungan yang mencakup integritas dan nilai-nilai etika serta nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian internal di seluruh jenjang organisasi. Direksi dan Pejabat Eksekutif diharapkan memberikan teladan *(role model)* dalam menjalankan pengendalian internal.

2. Implementasi pengendalian internal yang efektif yang dilaksanakan mulai lini terdepan pada saat *posting* atau pencatatan transaksi, penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta POJK yang mengatur tentang pencatatan transaksi.
3. Melaksanakan sistem *approval* transaksi secara berjenjang dan konsisten menjalankan prosedur untuk memastikan bahwa transaksi keuangan telah dijalankan dan disetujui oleh pihak yang berwenang
4. Menjalankan prosedur untuk mencegah atau mendeteksi secara tepat waktu transaksi tidak sah *(unauthorized transactions)* yang dapat menimbulkan dampak material dalam Laporan Keuangan Bank.
5. Melakukan sistem cek dan *re-check* serta verifikasi dalam pencatatan dan pemeliharaan catatan atas transaksi keuangan sehingga merefleksikan transaksi keuangan yang wajar dan akurat;
6. Memperkuat fungsi deteksi dengan melakukan pengujian terhadap akun-akun dalam laporan keuangan.
7. Menghindarkan diri dari larangan bagi setiap orang, termasuk direksi, dewan komisaris, dan pegawai bank, antara lain untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan Bank, menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan Bank, serta mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan Bank.

V. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Peringkat Pengendalian Internal PT BPR Chandra Muktiartha berada pada peringkat 2 (Cukup Memadai). Selanjutnya PT BPR Chandra Muktiartha hendak memperkuat pengendalian internal agar berada pada Peringkat 1 (Sangat Memadai) dengan melakukan perbaikan pada komponen 5 (lima) COSO dengan tindak lanjut:

1. Direksi dan Dewan Komisaris konsisten untuk meningkatkan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
2. Memastikan konsistensi pelaksanaan prosedur pencatatan transaksi keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat dipersiapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;
3. Meningkatkan peran bagian Manajemen Risiko untuk membantu Direksi mengawasi penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank agar Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan merepresentasikan secara tepat kondisi Bank.

Penutup

Demikianlah Laporan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan PT BPR Chandra Muktiartha disusun sebagai pemenuhan atas POJK No. 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank pasal 8 ayat 2 dan 3 yang secara substantif menyatakan **bahwa Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.**

Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank wajib paling sedikit

memuat:

1. pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; **dan**
2. **hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.**

Dengan adanya pengujian atas pos-pos dalam laporan keuangan dan pelaksanaan *self assessment* 5 (lima) Komponen COSO Pengendalian Internal dalam proses penyusunan Laporan Keuangan memberikan keyakinan bagi Direksi bahwa dari hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal **dalam proses pelaporan keuangan Bank** pada PT BPR Chandra Muktiartha **telah berjalan pada tingkat cukup memadai (Peringkat 2)** dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR Chandra Muktiartha.

Bantul, 23 April 2026

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Cicilia Wiwik
Direktur

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Telepon: 0274 385192
Website: www.bprcma.co.id, Email: bprcma@bprcma.co.id

LAPORAN HASIL PENGUJIAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA Posisi 31 Desember 2025

Nama BPR	:	PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
Alamat	:	JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Nomor Telepon	:	0274 385192
Posisi Keuangan	:	31 Desember 2025
Modal Inti	:	Rp26.710.394.791
Total Aset	:	Rp328.977.475.569

1. Pengujian Atas Pos-pos Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

1.1. Pengujian Atas Pos-pos Aset pada Laporan Posisi Keuangan

Tabel 1. Aset pada Laporan Posisi Keuangan

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Kas dalam Rupiah	816.381.950	*650.803.500*	-165.578.450	*-20,28%*
Penempatan pada Bank Lain	47.152.012.879	*58.569.599.071*	11.417.586.192	*24,21%*
-/- CKPN/PPKA Penempatan pada Bank Lain	-123.512.497	*-84.861.078*	38.651.419	*-31,29%*
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	333.530.803.590	*248.101.547.099*	-85.429.256.491	*-25,61%*
-/- Provisi Belum Diamortisasi	-1.196.271.786	*-893.838.113*	302.433.673	*-25,28%*
Biaya Transaksi Kredit Belum Diamortisasi	186.517.855	*74.480.175*	-112.037.680	*-60,07%*
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	-2.838.937.776	*-2.232.288.590*	606.649.186	*-21,37%*
-/- CKPN/PPKA Kredit yang Diberikan	-13.700.847.547	*-9.419.824.564*	4.281.022.983	*-31,25%*
Agunan yang diambil alih (AYDA)	12.425.315.455	*21.925.550.004*	9.500.234.549	*76,46%*
Aset Tetap dan Inventaris	6.297.660.131	*6.446.846.131*	149.186.000	*2,37%*
-/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	-3.905.457.301	*-4.252.936.193*	-347.478.892	*8,90%*
Aset Tidak Berwujud	746.400.000	*756.400.000*	10.000.000	*1,34%*
-/- Akumulasi Penyusutan Aset	-166.838.554	*-261.076.052*	-94.237.498	*56,48%*

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	*YoY*
Tidak Berwujud				
Aset Lainnya	7.859.166.857	*9.597.074.178*	1.737.907.321	*22,11%*
TOTAL ASET	**387.082.393.256**	***328.977.475.568***	**-58.104.917.688**	***-15,01%***

1. Kas dalam Rupiah

Kas dalam Rupiah di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp650.803.500, turun sebesar - Rp165.578.450 atau -20,28%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp816.381.950 pada 31 Desember 2024.
meningkatnya beban operasional dan penurunan laba yang menyebabkan kas dalam rupiah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

2. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp58.569.599.071, tumbuh sebesar Rp11.417.586.192 atau 24,21%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp47.152.012.879 pada 31 Desember 2024.
menjaga kelancaran operasional dan untuk mengoptimalisasi pengelolaan likuditas bank

3. -/- CKPN/PPKA Penempatan pada Bank Lain

-/- CKPN/ PPKA Penempatan pada Bank Lain di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar - Rp84.861.078, tumbuh sebesar Rp38.651.419 atau -31,29%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar -Rp123.512.497 pada 31 Desember 2024.
peningkatan risiko kredit sehingga bank mencadangkan dana sebagai upaya mitigasi

4. Kredit yang Diberikan (Baki Debet)

Kredit yang Diberikan (Baki Debet) di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp248.101.547.099, turun sebesar -Rp85.429.256.491 atau -25,61%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp333.530.803.590 pada 31 Desember 2024.
terjadinya peningkatan kredit bermasalah (NPL) yang disebabkan oleh dampak pandemi covid 19 yang melemahkan kemampuan bayar nasabah umkm dan perseorangan.

5. -/- Provisi Belum Diamortisasi

-/- Provisi Belum Diamortisasi di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar - Rp893.838.113, tumbuh sebesar Rp302.433.673 atau -25,28%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar -Rp1.196.271.786 pada 31 Desember 2024.
penyaluran kredit baru yang sepenuhnya diakui sebagai pendapatan

6. Biaya Transaksi Kredit Belum Diamortisasi

Biaya Transaksi Kredit Belum Diamortisasi di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp74.480.175, turun sebesar - Rp112.037.680 atau -60,07%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp186.517.855 pada 31 Desember 2024.
peningkatan jumlah amortisasi yang diakui sebagai beban pada periode berjalan yang di sebabkan oleh restrukturisasi kredit dan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo kredit.

7. -/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi

-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar - Rp2.232.288.590, tumbuh sebesar Rp606.649.186 atau -21,37%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar - Rp2.838.937.776 pada 31 Desember 2024.
disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit bermasalah (NPL) sehingga jumlah pendapatan bunga yang ditangguhkan meningkat.

8. -/- CKPN/PPKA Kredit yang Diberikan

-/- CKPN/ PPKA Kredit yang Diberikan di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.419.824.564, turun sebesar - Rp4.281.022.983 atau -31,25%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp13.700.847.547 pada 31 Desember 2024.
Penurunan yang signifikan terhadap PPKA kredit disebabkan oleh penyelesaian kredit bermasalah pasca berakhirnya kebijakan restrukturisasi Covid 19.

9. Agunan yang diambil alih (AYDA)

Agunan yang diambil alih (AYDA) di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.925.550.004, tumbuh sebesar Rp9.500.234.549 atau 76,46%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp12.425.315.455 pada 31 Desember 2024.
meningkatnya jumlah kredit macet , debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupu bunga

10. Aset Tetap dan Inventaris

Aset Tetap dan Inventaris di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.446.846.131, tumbuh sebesar Rp149.186.000 atau 2,37%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp6.297.660.131 pada 31 Desember 2024.

11. -/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

-/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.252.936.193, tumbuh sebesar Rp347.478.892 atau 8,90%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp3.905.457.301 pada 31 Desember 2024.

12. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp756.400.000, tumbuh sebesar Rp10.000.000 atau 1,34%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp746.400.000 pada 31 Desember 2024.

13. -/- Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud

-/- Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar - Rp261.076.052, turun sebesar - Rp94.237.498 atau 56,48%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar -Rp166.838.554 pada 31 Desember 2024.
turunnya nilai aset tidak berwujud dibandingkan posisi laporan keuangan sebelumnya disebabkan oleh pengakuan beban atau penurunan nilai pasar sebagai jaminan kredit

14. Aset Lainnya

Aset Lainnya di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.782.988.346, turun sebesar -Rp1.076.178.511 atau -13,69%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp7.859.166.857 pada 31 Desember 2024.
Penurunan aset lain- lain dikarenakan adanya penurunan pendapatan yang akan diterima atas kredit yang diberikan.

15. TOTAL ASET

TOTAL ASET di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp328.977.475.568, turun sebesar - Rp58.104.917.689 atau -15,01%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp387.082.393.257 pada 31 Desember 2024.

1.2. Pengujian Atas Pos-pos Liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2. Liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	*YoY*
Liabilitas Segera	933.332.452	*943.830.664*	10.498.212	*1,12%*
Tabungan	34.017.322.941	*37.811.803.260*	3.794.480.319	*11,15%*
Deposito	317.190.710.159	*254.039.165.981*	-63.151.544.178	*-19,91%*
Liabilitas Lainnya	1.554.101.004	*1.059.701.947*	-494.399.057	*-31,81%*
TOTAL LIABILITAS	**353.695.466.556**	***293.953.051.852***	**-59.742.414.704**	***-16,89%***

1. Liabilitas Segera

Liabilitas Segera di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp943.830.664, tumbuh sebesar Rp10.498.212 atau 1,12%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp933.332.452 pada 31 Desember 2024.

2. Tabungan

Tabungan di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.811.803.260, tumbuh sebesar Rp3.794.480.319 atau 11,15%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp34.017.322.941 pada 31 Desember 2024.

3. Deposito

Deposito di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp254.039.165.981, turun sebesar - Rp63.151.544.178 atau -19,91%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp317.190.710.159 pada 31 Desember 2024.

4. Liabilitas Lainnya

Liabilitas Lainnya di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.059.701.947, turun sebesar -Rp385.199.057 atau -26,66%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp1.444.901.004 pada 31 Desember 2024.
penyebab penurunan liabilitas lainnya dibandingkan dengan posisi sebelumnya di karenakan pembayaran utang atau memenuhi kewajiban yang dicatat sebelumnya telah berubah sifat menjadi pendapatan atau telah di selesaikan melalui arus kas keluar.

5. TOTAL LIABILITAS

TOTAL LIABILITAS di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp293.953.051.852, turun sebesar - Rp59.742.414.704 atau -16,89%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp353.695.466.556 pada 31 Desember 2024.

1.3. Pengujian Atas Pos-pos Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan

Tabel 3. Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	*YoY*
Modal Dasar	50.000.000.000	*50.000.000.000*	0	*0,00%*
Modal yang Belum Disetor -/-	-30.000.000.000	*-30.000.000.000*	0	*0,00%*
Cadangan Umum	4.000.000.000	*4.000.000.000*	0	*0,00%*
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	7.711.192.391	*9.386.926.701*	1.675.734.310	*21,73%*
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.675.734.310	*1.637.497.017*	-38.237.293	*-2,28%*
TOTAL EKUITAS	**33.386.926.701**	***35.024.423.717***	**1.637.497.016**	***4,90%***

1. Modal Dasar

Modal Dasar di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp50.000.000.000, tumbuh sebesar Rp0 atau 0,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp50.000.000.000 pada 31 Desember 2024.

2. Modal yang Belum Disetor -/-

Modal yang Belum Disetor -/- di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar - Rp30.000.000.000, tumbuh sebesar Rp0 atau 0,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar -Rp30.000.000.000 pada 31 Desember 2024.

3. Cadangan Umum

Cadangan Umum di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.000.000.000, tumbuh sebesar Rp0 atau 0,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp4.000.000.000 pada 31 Desember 2024.

4. Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu

Laba (Rugi) Tahun- Tahun Lalu di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.386.926.701, tumbuh sebesar Rp1.675.734.310 atau 21,73%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp7.711.192.391 pada 31 Desember 2024.
pertumbuhan laba (rugi) Tahun- tahun lalu dibandingkan periode sebelumnya di sebabkan perubahan atau penurunan biaya pencadangan CKPN/ PPKA Kredit Yang Diberikan yang secara langsung berdampak pada penambahan laba bersih sebelum pajak.

5. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba (Rugi) Tahun Berjalan di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.637.497.017, turun sebesar - Rp38.237.293 atau -2,28%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp1.675.734.310 pada 31 Desember 2024.

6. TOTAL EKUITAS

TOTAL EKUITAS di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35.024.423.717, tumbuh sebesar Rp1.637.497.016 atau 4,90%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp33.386.926.701 pada 31 Desember 2024.

2. Pengujian Atas Pos-pos Laporan Laba Rugi

Tabel 4. Laporan Laba Rugi

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Pendapatan Bunga Kontraktual Penempatan Pada Bank Lain	2.211.156.405	*2.349.873.311*	138.716.906	*6,27%*
Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit yang Diberikan	40.555.066.644	*30.358.686.386*	-10.196.380.258	*-25,14%*
Pendapatan Provisi Kredit	2.331.681.857	*1.256.661.573*	-1.075.020.284	*-46,10%*
Biaya Transaksi -/-	-130.878.633	*-141.099.680*	-10.221.047	*7,81%*
Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	534.012.923	*0*	-534.012.923	*-100,00%*
Pendapatan Lainnya	4.128.424.095	*9.137.144.382*	5.008.720.287	*121,32%*
Total Pendapatan Operasional	**49.629.463.291**	***42.961.265.972***	**-6.668.197.319**	***-13,44%***
Beban Bunga Kontraktual	23.573.487.968	*21.053.016.370*	-2.520.471.598	*-10,69%*
Beban Kerugian Penurunan Nilai	3.488.162.875	*155.559.848*	-3.332.603.027	*-95,54%*
Beban Pemasaran	611.743.544	*685.746.177*	74.002.633	*12,10%*
Beban Administrasi dan Umum	19.528.379.341	*18.798.806.424*	-729.572.917	*-3,74%*
Beban Lainnya	236.536.826	*297.146.489*	60.609.663	*25,62%*
Total Beban Operasional	**47.438.310.554**	***40.990.275.308***	**-6.448.035.246**	***-13,59%***
Laba (Rugi) Operasional	**2.191.152.737**	***1.970.990.664***	**-220.162.073**	***-10,05%***

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Total Pendapatan Non Operasional	3.118.586.486	*2.734.773.358*	-383.813.128	*-12,31%*
Total Beban Non Operasional	3.161.360.731	*2.718.267.005*	-443.093.726	*-14,02%*
Laba (Rugi) Non Operasional	**-42.774.245**	***16.506.353***	**59.280.598**	***138,59%***
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	**2.148.378.492**	***1.987.497.017***	**-160.881.475**	***-7,49%***
Taksiran Pajak Penghasilan	472.644.182	*350.000.000*	-122.644.182	*-25,95%*
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Setelah Pajak)	**1.675.734.310**	***1.637.497.017***	**-38.237.293**	***-2,28%***

1. Pendapatan Bunga Kontraktual Penempatan Pada Bank Lain

Pendapatan Bunga Kontraktual Penempatan Pada Bank Lain di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.349.873.311, tumbuh sebesar Rp138.716.906 atau 6,27%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp2.211.156.405 pada 31 Desember 2024.

2. Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit yang Diberikan

Pendapatan Bunga Kontraktual Kredit yang Diberikan di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.358.686.386, turun sebesar - Rp10.599.514.548 atau -25,88%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp40.958.200.934 pada 31 Desember 2024.
Bank sedang mengurangi penyaluran kredit pada sektor ekonomi berisiko tinggi dan beralih ke sektor ekonomi yang lebih aman , pada kredit bermasalah NPL yang meningkat dapat menurunkan pendapatan bunga secara perhitungan akuntansi

3. Pendapatan Provisi Kredit

Pendapatan Provisi Kredit di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.256.661.573, turun sebesar - Rp1.075.020.284 atau -46,10%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp2.331.681.857 pada 31 Desember 2024.
penyaluran kredit baru dengan sektor ekonomi yang berisiko tinggi menurun yang berdampak pada pendapatan provisi kredit, serta pengurangan biaya provisi pada kredit restrukturisasi agar nasabah dapat kembali lancar

4. Biaya Transaksi -/-

Biaya Transaksi -/- di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar -Rp141.099.680, turun sebesar -Rp10.221.047 atau 7,81%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar -Rp130.878.633 pada 31 Desember 2024.

5. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-

Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/- di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, turun sebesar - Rp534.012.923 atau -100,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp534.012.923 pada 31 Desember 2024.
tidak ada koreksi pendapatan bunga pada akhir desember 2025

6. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.323.058.550, tumbuh sebesar Rp2.194.634.455 atau 53,16%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp4.128.424.095 pada 31 Desember 2024.
pendapatan lainnya pada posisi 31 desember 2025 tumbuh dibandingkan pada posisi sebelumnya terdapat pendapatan dari penerimaan aset produktif hapus buku, pemulihan CKPN / PPAP, dan pendapatan operasional lainnya seperti denda, adm tabungan, penalti deposito, bunga debius, admistrasi kredit dan POL lainnya

7. Total Pendapatan Operasional

Total Pendapatan Operasional di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp42.961.265.971, turun sebesar -Rp6.668.197.320 atau -13,44%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp49.629.463.291 pada 31 Desember 2024.

8. Beban Bunga Kontraktual

Beban Bunga Kontraktual di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.053.016.370, turun sebesar -Rp2.520.471.598 atau -10,69%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp23.573.487.968 pada 31 Desember 2024.

9. Beban Kerugian Penurunan Nilai

Beban Kerugian Penurunan Nilai di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.419.824.564, tumbuh sebesar Rp5.931.661.689 atau 170,05%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp3.488.162.875 pada 31 Desember 2024.
beban kerugian penurunan nilai mengalami pertumbuhan dibandingkan posisi sebelum nya dikarenakan terjadi karena peningkatan kredit macet (NPL) sehingga bank wajib membentuk cadangan yang lebih besar

10. Beban Pemasaran

Beban Pemasaran di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp685.746.177, tumbuh sebesar Rp74.002.633 atau 12,10%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp611.743.544 pada 31 Desember 2024.

11. Beban Administrasi dan Umum

Beban Administrasi dan Umum di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.798.806.424, turun sebesar -Rp729.572.917 atau -3,74%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp19.528.379.341 pada 31 Desember 2024.

12. Beban Lainnya

Beban Lainnya di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp297.146.489, tumbuh sebesar Rp60.609.663 atau 25,62%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp236.536.826 pada 31 Desember 2024.
beban operasional lainnya mengalami kenaikan dibandingkan posisi sebelumnya dikarenakan rasio BOPO meningkat yaitu dengan kenaikan cadangan kerugian pununrunan nilai (CKPN), tingginya biaya operasional dan administrasi bank

13. Total Beban Operasional

Total Beban Operasional di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.990.275.307, turun sebesar - Rp6.448.035.247 atau -13,59%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp47.438.310.554 pada 31 Desember 2024.

14. Laba (Rugi) Operasional

Laba (Rugi) Operasional di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.970.990.664, turun sebesar - Rp220.162.073 atau -10,05%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp2.191.152.737 pada 31 Desember 2024.

15. Total Pendapatan Non Operasional

Total Pendapatan Non Operasional di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.734.773.358, turun sebesar - Rp383.813.129 atau -12,31%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp3.118.586.487 pada 31 Desember 2024.

16. Total Beban Non Operasional

Total Beban Non Operasional di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.718.267.005, turun sebesar - Rp443.093.726 atau -14,02%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp3.161.360.731 pada 31 Desember 2024.

17. Laba (Rugi) Non Operasional

Laba (Rugi) Non Operasional di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.506.353, tumbuh sebesar Rp59.280.597 atau 138,59%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar -Rp42.774.244 pada 31 Desember 2024.
laba (rugi) non operasional lebih besar dibandingkan posisi sebelumnya dikarenakan pendapatan non operasional lebih besar di bandingkan beban non operasional

18. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.987.497.017, turun sebesar - Rp160.881.476 atau -7,49%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp2.148.378.493 pada 31 Desember 2024.

19. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp350.000.000, turun sebesar - Rp122.644.182 atau -25,95%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp472.644.182 pada 31 Desember 2024.
taksiran pajak penghasilan turun dibandingkan posisi sebelumnya dikarenakan adanya penurunan laba

20. Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Setelah Pajak)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Setelah Pajak) di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.637.497.017, turun sebesar - Rp38.237.294 atau -2,28%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp1.675.734.311 pada 31 Desember 2024.

3. Pengujian Atas Pos-pos Laporan Rekening Administratif

Tabel 5. Laporan Rekening Administratif

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (Rp)	Des 2025 (Rp)	Mutasi (Rp)	YoY
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	23.856.910.968	*34.185.549.246*	10.328.638.278	*43,29%*
Kredit yang Diberikan yang dihapusbuku	8.787.995.051	*8.764.305.881*	-23.689.170	*-0,27%*
Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	1.831.570.465	*1.912.429.990*	80.859.525	*4,41%*
Tagihan Kontinjensi Lainnya	126.000.000	*4.462.650.235*	4.336.650.235	*3.441,79%*

1. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian

Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.185.549.246, tumbuh sebesar Rp10.328.638.278 atau 43,29%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp23.856.910.968 pada 31 Desember 2024.
pendapatan bunga dalam penyelesaian tumbuh dibandingkan posisi sebelumnya adanya peningkatan bunga kredit yang dberikan

2. Kredit yang Diberikan yang dihapusbuku

Kredit yang Diberikan yang dihapusbuku di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.764.305.881, turun sebesar -Rp23.689.170 atau -0,27%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp8.787.995.051 pada 31 Desember 2024.

3. Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku

Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.912.429.990, tumbuh sebesar Rp80.859.525 atau 4,41%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp1.831.570.465 pada 31 Desember 2024.

4. Tagihan Kontinjensi Lainnya

Tagihan Kontinjensi Lainnya di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.462.650.235, tumbuh sebesar Rp4.336.650.235 atau 3.441,79%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar Rp126.000.000 pada 31 Desember 2024.
tagihan kontinjensi lainnya tumbuh dibandingkan posisi sebelumnya karena bank melakukan restrukturisasi kredit

4. Pengujian Atas Pos-pos Data Fluktuasi Rasio-rasio Keuangan

Tabel 6. Data Fluktuasi Rasio-rasio Keuangan

(Nominal Disajikan Dalam Satuan Rupiah Penuh)

Keterangan	Des 2024 (%)	Des 2025 (%)	Mutasi (%)	YoY
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	15,31%	*14,14%*	-1,17%	*-7,64%*

Keterangan	Des 2024 (%)	Des 2025 (%)	Mutasi (%)	YoY
Non Performing Loan (NPL) Neto	21,98%	*34,63%*	12,65%	*57,55%*
Non Performing Loan (NPL) Gross	25,31%	*40,62%*	15,31%	*60,49%*
Return on Assets (ROA)	0,54%	*0,54%*	0,00%	*0,00%*
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,58%	*95,43%*	-0,15%	*-0,16%*
Net Interest Margin (NIM)	5,32%	*3,60%*	-1,72%	*-32,33%*
Loan to Deposit Ratio (LDR)	94,97%	*85,97%*	-9,00%	*-9,48%*
Cash Ratio (CR)	10,09%	*8,61%*	-1,48%	*-14,67%*

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 14,14%, turun sebesar -1,17% atau -7,64%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 15,31% pada 31 Desember 2024.

2. Non Performing Loan (NPL) Neto

Non Performing Loan (NPL) Neto di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 34,63%, tumbuh sebesar 12,65% atau 57,55%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 21,98% pada 31 Desember 2024.
kredit yang sebelumnya restrukturisasi (keringanan pembayaran) selama pandemi telah berakhir dan debitur blm ada kemampuan membayar kembali sehingga kredit tersebut menjadi kredit NPL

3. Non Performing Loan (NPL) Gross

Non Performing Loan (NPL) Gross di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 40,62%, tumbuh sebesar 15,31% atau 60,49%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 25,31% pada 31 Desember 2024.
kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi berakhir dan debitur blm ada kemampuan membayar kewajibannya sehingga menjadi kredit NPL

4. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 0,54%, tumbuh sebesar 0,00% atau 0,00%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 0,54% pada 31 Desember 2024.

5. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 95,43%, turun sebesar -0,15% atau -0,16%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 95,58% pada 31 Desember 2024.

6. Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 3,60%, turun sebesar -1,72% atau -32,33%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 5,32% pada 31 Desember 2024.
NIM (net interest margin)turun dibandingkan posisi sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan suku bunga tinggi yang memicu adanya peningkatan biaya dibandingkan dengan pendapatan

7. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 85,97%, turun sebesar -9,00% atau -9,48%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 94,97% pada 31 Desember 2024.

8. Cash Ratio (CR)

Cash Ratio (CR) di PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar 8,61%, turun sebesar -1,48% atau -14,67%, dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 10,09% pada 31 Desember 2024.

Analisa dan Kesimpulan Akhir Hasil Pengujian Atas Pos-pos Laporan Keuangan

PT. BPR Chandra Muktiartha mengalami tekanan pada kinerja keuangannya di periode ini, yang tercermin dari beberapa indikator utama. Rasio Non- Performing Loan (NPL) mencatatkan peningkatan seiring dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit terkait pandemi COVID-19. Kondisi ini mengindikasikan adanya sejumlah debitur yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka pasca berakhirnya relaksasi kebijakan tersebut. Sebagai dampak dari meningkatnya NPL, bank perlu mengalokasikan dana lebih besar untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) guna mengantisipasi potensi kerugian kredit. Peningkatan beban pencadangan ini berkontribusi pada tekanan terhadap profitabilitas bank.

Di sisi pendapatan, bank mengalami penurunan pada pendapatan bunga yang turut mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut - kenaikan NPL, peningkatan beban CKPN, dan penurunan pendapatan bunga - mengakibatkan penurunan signifikan pada laba bank. Meski demikian, penurunan ini masih dapat dikategorikan wajar mengingat kondisi dan tantangan yang dihadapi.

Secara umum pengujian atas pos- pos laporan keuangan menunjukkan kondisi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bantul, 23 April 2026

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Cicilia Wiwik
Direktur

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Telepon: 0274 385192
Website: www.bprcma.co.id, Email: bprcma@bprcma.co.id

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK

Nama BPR : PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
Alamat : JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
Nomor Telepon : 0274 385192
Periode : 01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025
Modal Inti : Rp26.710.394.791
Total Aset : Rp328.977.475.569

Komponen 1. Lingkungan Pengendalian *(Control Environment)*

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika			
1	K1.LP.P01.01 **Komitmen terhadap Integritas** Manajemen BPR/ S menjadi role model (teladan) dengan menerapkan integritas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan menerapkan prinsip- prinsip kehati-hatian Bank.	**Nilai 1 (Memadai)**	Penilaian terhadap indikator Manajemen BPR menjadi role model (teladan) dengan menerapkan integritas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan menerapkan prinsip- prinsip kehati- hatian Bank, yang dimiliki BPR adalah nilai 1 (memadai).
2	K1.LP.P01.02 **Sosialisasi Meningkatkan Kepatuhan** BPR/ S melaksanakan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan dan tidak melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank.	**Nilai 1 (Memadai)**	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan dan tidak melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang digunakan sebagai dasar penyusunan Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank, dengan penilaian nilai 1 (memadai).
3	K1.LP.P01.03 **Pengenaan sanksi atas pelanggaran** Direksi / Pimpinan Unit Kerja memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar peraturan perusahaan dan kode etik dan/ atau aturan perilaku lainnya termasuk tindakan pelanggaran yang mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dan dokumen Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank.	**Nilai 1 (Memadai)**	Penilaian terhadap indikator Direksi / Pimpinan Unit Kerja memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar peraturan perusahaan dan kode etik dan/ atau aturan perilaku lainnya termasuk tindakan pelanggaran yang mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak pencatatan suatu transaksi atau informasi dalam pembukuan, dan dokumen Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank, yang dimiliki BPR adalah nilai 1 (memadai).

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
4	K1.LP.P01.04 **Pemegang Saham yang Berintegritas** Pemegang saham mendukung proses pelaporan keuangan Bank yang berkualitas dan andal serta tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.	**Nilai 1 (Memadai)**	BPR telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham mendukung proses pelaporan keuangan Bank yang berkualitas dan andal serta tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank dan/ atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank, dengan penilaian nilai 1 (memadai).
5	K1.LP.P01.05 **Pihak Terafiliasi** Pihak Terafiliasi mengetahui bahwa dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan/ atau Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan Bank. Dan Pihak Terafiliasi mematuhinya dan tidak melakukan intervensi dimaksud.	**Nilai 1 (Memadai)**	Penilaian terhadap indikator Pihak Terafiliasi mengetahui bahwa dilarang melakukan intervensi kepada Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan/ atau Pejabat Eksekutif dalam proses pelaporan keuangan Bank. Dan Pihak Terafiliasi mematuhinya dan tidak melakukan intervensi dimaksud, yang dimiliki BPR adalah nilai 1 (memadai).
B. Tanggung Jawab Pengawasan			
6	K1.LP.P02.01 **Pengawasan Direksi** Direksi bertanggung jawab memastikan kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ketentuan serta penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.	**Nilai 1 (Memadai)**	Indikator Direksi bertanggung jawab memastikan kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ketentuan serta penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, pada BPR indikator Direksi bertanggung jawab memastikan kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ketentuan serta penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, dinilai nilai 1 (memadai).
7	K1.LP.P02.02 **Pengawasan Dewan Komisaris** Dewan Komisaris BPR/S melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.	**Nilai 1 (Memadai)**	Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris BPR melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, yang dimiliki BPR adalah nilai 1 (memadai).
C. Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab			

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
8	K1.LP.P03.01 **Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab** BPR/ S memiliki dan menetapkan struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas pada pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank di masing- masing individu pegawai.	**Nilai 1 (Memadai)**	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR memiliki dan menetapkan struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas pada pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank di masing-masing individu pegawai, dengan penilaian nilai 1 (memadai).
9	K1.LP.P03.02 **Kecukupan SDM** Jumlah Direksi, Pejabat dan Pegawai sudah memadai dalam menegakkan Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan kompleksitas usaha BPR/S dan memenuhi struktur dalam penerapan Tata Kelola BPR/ BPRS sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/S.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Jumlah Direksi, Pejabat dan Pegawai sudah memadai dalam menegakkan Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan kompleksitas usaha BPR dan memenuhi struktur dalam penerapan Tata Kelola BPR/ BPRS sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/ S, berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
D. Komitmen Terhadap Kompetensi			
10	K1.LP.P04.01 **Komitmen Terhadap Kompetensi** Manajemen BPR/S memastikan bahwa penugasan Pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian internal dan kapasitas sesuai dengan tututan jabatan.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	BPR telah mengimplementasikan indikator Manajemen BPR memastikan bahwa penugasan Pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian internal dan kapasitas sesuai dengan tututan jabatan, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
11	K1.LP.P04.02 **Komitmen Terhadap Kompetensi** BPR/ BPRS menyelenggarakan pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengendalian internal Pelaporan Keuangan Bank bagi Pegawai terkait.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	BPR memiliki indikator BPR menyelenggarakan pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengendalian internal Pelaporan Keuangan Bank bagi Pegawai terkait, indikator BPR/ BPRS menyelenggarakan pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengendalian internal Pelaporan Keuangan Bank bagi Pegawai terkait, yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).
E. Menegakkan Akuntabilitas			
12	K1.LP.P05.01 **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengendalian Internal** Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal dalam pelaksanaan transaksi dan proses pelaporan keuangan Bank	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Implementasi indikator Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal dalam pelaksanaan transaksi dan proses pelaporan keuangan Bank, di BPR menunjukkan kondisi nilai 2 (cukup memadai).

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
13	K1.LP.P05.02 **Komitmen Terhadap Kompetensi** Wewenang pengendalian internal yang diberikan kepada pegawai telah tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan BPR/S.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Wewenang pengendalian internal yang diberikan kepada pegawai telah tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan BPR, berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		**18**	
Banyaknya Indikator		**13**	
Rata-rata Nilai		**1.38**	
Predikat Komponen		**Nilai 1 (Memadai)**	

Komponen 2. Penilaian Risiko *(Risk Assessment)*

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Menentukan Tujuan yang Cocok			
1	K2.PR.P06.01 **Tujuan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan** BPR/ BPRS telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang bertujuan untuk a. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan d. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang bertujuan untuk a. memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan d. memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
B. Mengidentifikasi dan Menganalisa Risiko			
2	K2.PR.P07.01 **Identifikasi Risiko** BPR/ S telah mengidentifikasi dan menganalisa risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan (antara lain salah saji, kecurangan atau manipulasi laporan, window dressing, penggelembungan pencatatan dll)	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR telah mengidentifikasi dan menganalisa risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan (antara lain salah saji, kecurangan atau manipulasi laporan, window dressing, penggelembungan pencatatan dll), BPR tergolong nilai 2 (cukup memadai).
C. Menilai Risiko Fraud			
3	K2.PR.P08.01 **Penilaian Risiko Fraud dalam Pelaporan Keuangan** BPR/ S telah melakukan penilaian yang terhadap risiko fraud (kecurangan) atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan BPR.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR telah melakukan penilaian yang terhadap risiko fraud (kecurangan) atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan BPR, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).
4	K2.PR.P08.02 **Pengujian yang dilakukan Audit Internal** Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal melakukan pengujian terhadap efektifivas pengendalian internal dalam memastikan tidak terdapat fraud (kecurangan) dalam pelaporan keuangan Bank	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pejabat Eksekutif / Satuan Kerja Audit Internal melakukan pengujian terhadap efektifivas pengendalian internal dalam memastikan tidak terdapat fraud (kecurangan) dalam pelaporan keuangan Bank, dengan pencapaian nilai 2 (cukup memadai).
D. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan			

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
5	K2.PR.P09.01 **Identifikasi dan Analisis Perubahan Signifikan** BPR/ BPRS telah mengindentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan yang dapat menimbulkan atau mengubah risiko antara lain misalnya perubahan sistem informasi, perubahan regulasi, terjadinya penggabungan usaha (merger) / akuisisi / konsolidasi, perubahan dalam sistem akuntansi yang berdampak pada integritas pelaporan keuangan Bank.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah mengindentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan yang dapat menimbulkan atau mengubah risiko antara lain misalnya perubahan sistem informasi, perubahan regulasi, terjadinya penggabungan usaha (merger) / akuisisi / konsolidasi, perubahan dalam sistem akuntansi yang berdampak pada integritas pelaporan keuangan Bank, pada BPR berada dalam kondisi nilai 2 (cukup memadai).
Total Nilai Komponen		**10**	
Banyaknya Indikator		**5**	
Rata-rata Nilai		**2**	
Predikat Komponen		**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	

Komponen 3. Aktivitas Pengendalian *(Control Activities)*

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian			
1	K3.AP.P10.01 **Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian** BPR/S melaksanakan kegiatan pengendalian yang melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan telah dipatuhi secara konsisten.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR melaksanakan kegiatan pengendalian yang melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan telah dipatuhi secara konsisten, BPR tergolong nilai 2 (cukup memadai).
2	K3.AP.P10.02 **Penjelasan kepada Direksi secara Berkala tentang Pengendalian Pelaporan Keuangan** Direksi meminta penjelasan secara berkala tentang Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan dari Kepala Unit Kerja / PE terkait untuk dapat segera mendeteksi permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian atau penyimpangan lainnya.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi meminta penjelasan secara berkala tentang Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan dari Kepala Unit Kerja / PE terkait untuk dapat segera mendeteksi permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian atau penyimpangan lainnya, dengan pencapaian nilai 2 (cukup memadai).
3	K3.AP.P10.03 **Peran UKK / PE yang Bertanggung jawab terhadap Pencegahan Kecurangan Pelaporan Keuangan** Unit kerja khusus / Pejabat Eksekutif (yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti fraud) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, melaksanakan analisis data keuangan dan melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan luaran (output) Laporan Keuangan.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Unit kerja khusus / Pejabat Eksekutif (yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti fraud) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, melaksanakan analisis data keuangan dan melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan luaran (output) Laporan Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi nilai 2 (cukup memadai).
B. Memilih dan mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi			
4	K3.AP.P11.01 **Verifikasi Transaksi** BPR/ S melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta prosedur otorisasi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta prosedur otorisasi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian nilai 2 (cukup memadai).

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
5	K3.AP.P11.02 **Pengendalian Teknologi** BPR/ S melakukan langkah-langkah pengendalian teknologi informasi agar sistem dan data terjaga integritas dan kerahasiaannya.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR melakukan langkah- langkah pengendalian teknologi informasi agar sistem dan data terjaga integritas dan kerahasiaannya, pada BPR dinilai nilai 2 (cukup memadai).
6	K3.AP.P11.03 **Audit Internal Memastikan Efektivitas Internal Kontrol Pengamanan Data** Pejabat Eksektutif / Satuan Kerja Audit Internal memastikan bahwa pengendalian terhadap pengamanan pusat data, pengembangan dan pemeliharaan sistem telah berjalan efektif.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pejabat Eksektutif / Satuan Kerja Audit Internal memastikan bahwa pengendalian terhadap pengamanan pusat data, pengembangan dan pemeliharaan sistem telah berjalan efektif, berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
C. Merinci ke dalam Kebijakan dan Prosedur			
7	K3.AP.P12.01 **Pemisahan Fungsi** BPR/ S telah mengatur pemisahan fungsi (segregation of duties) sesuai dengan kewenangan atas sistem dan aplikasi yang dimiliki dalam rangka mencegah/ mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/ informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan.	**Nilai 1 (Memadai)**	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah mengatur pemisahan fungsi (segregation of duties) sesuai dengan kewenangan atas sistem dan aplikasi yang dimiliki dalam rangka mencegah/ mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/ informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan, dengan pencapaian nilai 1 (memadai).
8	K3.AP.P12.02 **Mekanisme Jenjang Otorisasi** BPR/S telah memiliki mekanisme jenjang otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting untuk menjaga integritas pelapoan keuangan Bank.	**Nilai 1 (Memadai)**	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR telah memiliki mekanisme jenjang otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting untuk menjaga integritas pelapoan keuangan Bank, BPR tergolong nilai 1 (memadai).
9	K3.AP.P12.03 **Ketersediaan Job Description Pengendalian Internal** Pimpinan dan Pegawai BPR/ S telah memiliki uraian jabatan (job description) yang memuat fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal di masing-masing jabatan / posisi.	**Nilai 3 (Tidak Memadai)**	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pimpinan dan Pegawai BPR telah memiliki uraian jabatan (job description) yang memuat fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab pengendalian internal di masing-masing jabatan / posisi, pada BPR berada dalam kondisi nilai 3 (tidak memadai).
Total Nilai Komponen		**17**	
Banyaknya Indikator		**9**	
Rata-rata Nilai		**1.89**	
Predikat Komponen		**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	

Komponen 4. Informasi dan Komunikasi *(Information and Communication)*

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Gunakan Informasi yang Relevan			
1	K4.IK.P13.01 **Ketersediaan Sistem Informasi Keuangan** BPR/ BPRS memiliki sistem informasi yang mampu menyediakan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Informasi keuangan merupakan setiap informasi berupa angka dan rasio keuangan. Sedangkan Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh Bank.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memiliki sistem informasi yang mampu menyediakan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Informasi keuangan merupakan setiap informasi berupa angka dan rasio keuangan. Sedangkan Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh Bank, dengan pencapaian nilai 2 (cukup memadai).
2	K4.IK.P13.02 **Pengembangan Sistem Informasi yang menerapkan Sistem Pengendalian Internal** BPR/ S dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi dengan menerapkan pengendalian internal agar kegunaan dan keandalan informasi keuangan dan/ laporan keuangan terjaga integritasnya.	**Nilai 1 (Memadai)**	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi dengan menerapkan pengendalian internal agar kegunaan dan keandalan informasi keuangan dan/ laporan keuangan terjaga integritasnya, BPR tergolong nilai 1 (memadai).
B. Komunikasi Internal yang Efektif			
3	K4.IK.P14.01 **Memiliki Sistem Komunikasi yang Efektif** BPR/S memiliki sistem komunikasi yang efektif di setiap tingkatan organisasi untuk memastikan Manajemen dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki sistem komunikasi yang efektif di setiap tingkatan organisasi untuk memastikan Manajemen dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada BPR dinilai nilai 2 (cukup memadai).
4	K4.IK.P14.02 **Penyelenggaraan dan Akses Komunikasi Internal** BPR/ S menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar Informasi Keuangan dan / atau Laporan Keuangan dapat dijangkau atau diakses oleh pegawai yang berkepentingan.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar Informasi Keuangan dan / atau Laporan Keuangan dapat dijangkau atau diakses oleh pegawai yang berkepentingan, berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).
C. Komunikasi Eksternal yang Efektif			
5	K4.IK.P15.01 **Saluran Komunikasi yang Terbuka** BPR/ BPRS membuka saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan OJK, BPKP, Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik, Konsultan yang memberikan masukan yang signifikan terhadap peningkatan integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR membuka saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan OJK, BPKP, Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik, Konsultan yang memberikan masukan yang signifikan terhadap peningkatan integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan, berjalan dengan nilai 2 (cukup memadai).

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
Total Nilai Komponen		9	
Banyaknya Indikator		5	
Rata-rata Nilai		1.8	
Predikat Komponen		Nilai 2 (Cukup Memadai)	

Komponen 5. Pemantauan *(Monitoring)*

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
A. Melakukan Evaluasi yang sedang berjalan dan/atau Terpisah			
1	K5.PM.P16.01 **Evaluasi Sistem Pengendalian Pelaporan Keuangan Bank** BPR/ BPRS melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan teknologi informasi	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	BPR memiliki indikator BPR melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan teknologi informasi, indikator BPR/ BPRS melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan teknologi informasi, yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).
2	K5.PM.P16.02 **Integrasi Sistem Pengendalian Internal** BPR/BPRS mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan bisnis agar mampu menyediakan laporan rutin termasuk Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara akurat dan benar.	**Nilai 1 (Memadai)**	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan bisnis agar mampu menyediakan laporan rutin termasuk Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara akurat dan benar, dengan penilaian nilai 1 (memadai).
B. Mengevaluasi dan Mengkomunikasikan Kekurangan (defisiensi)			
3	K5.PM.P17.01 **Evaluasi Kekurangan Pengendalian Internal** BPR/ S melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul dalam penyusunan Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul dalam penyusunan Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, yang dimiliki BPR dinilai nilai 2 (cukup memadai).

No	Indikator	Penilaian	Keterangan
4	K5.PM.P17.02 **Pelaporan Kekurangan Pengendalian Internal** Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang diidentifikasi Unit kerja, Unit Kerja Khusus / PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, Audit Internal maupun Satuan Kerja lainnya segera dilaporkan ke Direksi. Sedangkan kelemahan pengendalian internal yang bersifat material dilaporkan ke Dewan Komisaris.	**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	BPR memiliki indikator Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang diidentifikasi Unit kerja, Unit Kerja Khusus / PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, Audit Internal maupun Satuan Kerja lainnya segera dilaporkan ke Direksi. Sedangkan kelemahan pengendalian internal yang bersifat material dilaporkan ke Dewan Komisaris, indikator Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pelaporan keuangan Bank yang diidentifikasi Unit kerja, Unit Kerja Khusus / PE yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank, Audit Internal maupun Satuan Kerja lainnya segera dilaporkan ke Direksi. Sedangkan kelemahan pengendalian internal yang bersifat material dilaporkan ke Dewan Komisaris, yang dinilai nilai 2 (cukup memadai).
5	K5.PM.P17.03 **Pelaporan ke OJK Jika Terdapat Kelemahan yang membahayakan Kondisi Bank** Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/ atau pihak lain telah memahami bahwa dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	**Nilai 1 (Memadai)**	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan/ atau pihak lain telah memahami bahwa dalam hal diketahui terdapat kelemahan yang signifikan atau kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dalam proses pelaporan keuangan Bank, harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian nilai 1 (memadai).
Total Nilai Komponen		**8**	
Banyaknya Indikator		**5**	
Rata-rata Nilai		**1.6**	
Predikat Komponen		**Nilai 2 (Cukup Memadai)**	

Analisa dan Kesimpulan

No	Komponen	Nilai
1	Lingkungan Pengendalian *(Control Environment)*	*Nilai 1 (Memadai)*
2	Penilaian Risiko *(Risk Assessment)*	*Nilai 2 (Cukup Memadai)*
3	Aktivitas Pengendalian *(Control Activities)*	*Nilai 2 (Cukup Memadai)*
4	Informasi dan Komunikasi *(Information and Communication)*	*Nilai 2 (Cukup Memadai)*
5	Pemantauan *(Monitoring)*	*Nilai 2 (Cukup Memadai)*
Total Nilai Seluruh Indikator Komponen		**62**
Banyaknya Indikator Komponen		**37**
Rata-rata Nilai		**1.68**
Peringkat Self Assessment		**2**
Predikat Self Assessment		**Peringkat 2 (Cukup Memadai)**

Analisa dan Kesimpulan
Kualitas 5 (lima) Komponen COSO pengendalian internal yaitu (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi & Komunikasi; (5) Pemantauan, secara umum cukup memadai dan membutuhkan perbaikan cukup signifikan agar dapat memberikan kontribusi secara berkesinambungan terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal pada level yang dapat diterima.

Bantul, 23 April 2026

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Cicilia Wiwik
Direktur

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
Jl. Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp : (0274) 376276, Fax : (0274)385192, Hp : 082288435000
email: bprcma@bprcma.co.id | website: www.bprcma.co.id

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA

31 Desember 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
▪ Surat Pernyataan Direksi	
▪ Laporan Auditor Independen	
▪ Laporan Posisi Keuangan	1
▪ Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	2
▪ Laporan Perubahan Ekuitas	3
▪ Laporan Arus Kas	4
▪ Catatan Atas Laporan Keuangan	
▪ Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	5 - 23
▪ Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan	24 - 37
▪ Gambaran Umum Perusahaan	38 - 40
▪ Lampiran	

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ny. Cicilia Wiwik
Jabatan	:	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Alamat Kantor	:	Jl. Gedongkuning No 150A, Banguntapan,Bantul, D.I. Yogyakarta, Indonesia, (0274) 376276 / 385192

Untuk dan atas nama PT BPR Chandra Muktiartha menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Chandra Muktiartha;

2. Laporan keuangan PT BPR Chandra Muktiartha tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Chandra Muktiartha telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan PT BPR Chandra Muktiartha tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Chandra Muktiartha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan, dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan bagi PT BPR Chandra Muktiartha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 02 April 2026

Ny. Cicilia Wiwik, S.E
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
Jl. Gedong Kuning No.150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp. (0274) 376276, Fax : (0274) 385192, HP : 082288435000
email: bprcma@bprcma.co.id | website: www.bprcma.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00098/2.1358/AU.8/07/0906-3/1/IV/2026

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT. BPR Chandra Muktiartha

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan PT. BPR Chandra Muktiartha ("Perusahaan"), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan PT. BPR Chandra Muktiartha terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Atas Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan CKPN diatur berdasarkan surat keputusan Direksi No. 10/SK/CMA/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan

mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner

Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
NRAP. AP.0906
Yogyakarta, 02 April 2026: ATH

LAPORAN KEUANGAN

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025 *Sesuai SAK EP*	2024 *Restatement Sesuai SAK EP*	2024 *Sesuai SAK ETAP*
ASET				
Kas	C.1	650.803.500	816.381.950	816.381.950
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima				3.362.476.947
Penempatan Pada Bank Lain	C.2	58.569.599.072	47.152.012.879	47.152.012.879
PPKA				(123.512.497)
CKPN Penempatan Pada Bank l	C.2	(84.861.078)	(123.512.497)	
Kredit Yang Diberikan	C.3	247.863.986.403	329.682.111.883	333.530.803.590
Provisi				(1.196.271.786)
Biaya Transaksi				186.517.855
Pendapatan Bunga Yang Ditangguhkan				(2.838.937.776)
PPKA				(13.700.847.547)
CKPN Kredit	C.3	(9.419.824.564)	(13.700.847.547)	
Agunan Yang Diambil Alih	C.4	21.925.550.004	12.425.315.455	12.425.315.455
Aset tetap	C.5	6.446.846.131	6.297.660.131	6.297.660.131
Akum Peny. Aset tetap	C.5	(4.252.936.193)	(3.905.457.301)	(3.905.457.301)
Total		**2.193.909.939**	**2.392.202.830**	**2.392.202.830**
Aset Tidak Berwujud	C.6	756.400.000	746.400.000	746.400.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud	C.6	(261.076.052)	(166.838.554)	(166.838.554)
Total		**495.323.948**	**579.561.446**	**579.561.446**
Aset Lain-Lain	C.7	6.782.988.346	7.859.166.857	4.496.689.910
Jumlah Aset		**328.977.475.569**	**387.082.393.257**	**387.082.393.257**
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	C.8	943.830.664	933.332.452	933.332.452
Utang Bunga				972.256.822
Utang Pajak				472.644.182
Simpanan	C.9			
Tabungan		37.811.803.260	34.017.322.941	34.017.322.941
Deposito		254.039.165.981	317.190.710.159	317.190.710.159
Liabilitas Imbalan Kerja	C.10	98.550.000	109.200.000	109.200.000
Liabilitas Lainnya	C.11	1.059.701.947	1.444.901.004	
Jumlah Liabilitas		**293.953.051.852**	**353.695.466.556**	**353.695.466.556**
EKUITAS				
Modal		50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Modal Belum Disetor		(30.000.000.000)	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)
Modal Disetor	C.12	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**
Saldo Laba	C.13			
Cadangan Umum		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Belum Ditentukan Tujuannya				
Laba Tahun Lalu		9.386.926.701	7.711.192.391	7.711.192.391
Laba Tahun Berjalan		1.637.497.017	1.675.734.310	1.675.734.310
Jumlah Saldo Laba		**15.024.423.717**	**13.386.926.701**	**13.386.926.701**
Jumlah Ekuitas		**35.024.423.717**	**33.386.926.701**	**33.386.926.701**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		**328.977.475.569**	**387.082.393.257**	**387.082.393.257**

Yogyakarta, 02 April 2026

Ny. Cicilia Wiwik, S.E
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025 *Sesuai SAK EP*	2024 *Restatement Sesuai SAK EP*	2024 *Sesuai SAK ETAP*
Pendapatan dan Beban Operasional				
Pendapatan Operasional				
Pendapatan Bunga Kontraktual	C.14	35.522.645.529	43.300.235.973	42.766.223.050
Pendapatan Bunga Tangguhan				597.619.174
Koreksi atas Pendapatan Bunga				(63.606.251)
Provisi	C.14	1.030.473.138	1.245.552.351	1.245.552.351
Administrasi dan Komisi	C.14	226.188.435	1.086.129.505	1.086.129.505
Biaya Transaksi	C.14	(141.099.680)	(130.878.633)	(130.878.633)
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih		**36.638.207.421**	**45.501.039.196**	**45.501.039.196**
Pendapatan Operasional Lainnya	C.15	6.323.058.550	4.128.424.095	4.128.424.095
Jumlah Pendapatan Operasional		**42.961.265.971**	**49.629.463.291**	**49.629.463.291**
Beban Operasional				
Beban Bunga	C.16	21.053.016.370	23.573.487.968	23.573.487.968
Beban Penyisihan Kerugian				3.488.162.875
Beban Kerugian Penurunan Nilai	C.17	155.559.848	3.488.162.875	
Beban Pemasaran	C.18	685.746.177	611.743.544	611.743.544
Beban Administrasi dan Umum	C.19	18.761.806.854	19.518.014.740	19.518.014.740
Beban Operasional Lainnya	C.20	334.146.059	246.901.426	246.901.426
Jumlah Beban Operasional		**40.990.275.307**	**47.438.310.554**	**47.438.310.554**
Laba (rugi) Operasional		**1.970.990.664**	**2.191.152.738**	**2.191.152.738**
Pendapatan dan Beban Non Operasional				
Pendapatan Non-Operasional	C.21	77.481.453	133.902.036	133.902.036
Beban Non-Operasional	C.22	(60.975.100)	(176.676.281)	(176.676.281)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		**16.506.353**	**(42.774.245)**	**(42.774.245)**
Laba (rugi) Bersih Sebelum Pajak		**1.987.497.017**	**2.148.378.492**	**2.148.378.492**
Taksiran Pajak Penghasilan	C.23	(350.000.000)	(472.644.182)	(472.644.182)
Laba (Rugi) Bersih setelah Pajak		**1.637.497.017**	**1.675.734.310**	**1.675.734.310**

Yogyakarta, 02 April 2026

Ny. Cicilia Wiwik,S.E

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	MODAL	SALDO LABA			JUMLAH
	MODAL DISETOR	CADANGAN TUJUAN	CADANGAN UMUM	BELUM DITENTUKAN TUJUANNYA	
Saldo Per 31 Desember 2023	**20.000.000.000**	**-**	**4.000.000.000**	**7.711.192.392**	**31.711.192.392**
Laba bersih tahun berjalan				1.675.734.310	1.675.734.310
Pembulatan				(1)	(1)
Saldo Per 31 Desember 2024	**20.000.000.000**	**-**	**4.000.000.000**	**9.386.926.701**	**33.386.926.701**
Laba bersih tahun berjalan				1.637.497.017	1.637.497.017
Pembulatan				1	1
Saldo Per 31 Desember 2025	**20.000.000.000**	**-**	**4.000.000.000**	**11.024.423.717**	**35.024.423.717**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Penerimaan pendapatan bunga	35.522.645.529	43.300.235.973
Penerimaan pendapatan provisi	1.030.473.138	1.245.552.351
Penerimaan pendapatan administrasi dan transaksi	85.088.755	955.250.873
Pendapatan operasional lainnya	6.323.058.550	4.128.424.095
Pembayaran beban bunga	(21.053.016.370)	(23.573.487.968)
Beban gaji dan tunjangan	(12.733.361.990)	(14.359.371.168)
Beban umum dan administrasi	(6.272.474.652)	(5.345.392.016)
Beban operasional lainnya	(334.146.059)	(246.901.426)
Pendapatan non operasional lainnya	77.481.453	133.902.036
Beban non operasional lainnya	(60.975.100)	(176.676.281)
Pembayaran pajak penghasilan	(350.000.000)	(472.644.182)
Dividen	-	-
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(597.276.237)	(3.913.157.975)
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	(11.417.586.193)	6.395.528.516
Kredit yang diberikan	81.818.125.481	15.604.462.784
Agunan yang diambil alih	(9.500.234.550)	(11.790.654.799)
Aset lain-lain	(149.690.830)	(280.965.374)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	(2.652.088.671)	2.459.957.410
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	10.498.212	(406.471.259)
Tabungan	3.794.480.319	(9.086.682.381)
Deposito	(63.151.544.178)	(4.271.821.254)
Simpanan dari bank lain		
Pinjaman yang diterima		
Liabilitas imbalan kerja	(10.650.000)	46.000.000
Liabilitas lain-lain	(385.199.057)	(416.999.803)
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional		
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional	(6.392.451)	(71.911.850)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(149.186.000)	292.899.300
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	(10.000.000)	(303.900.000)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi	(159.186.000)	(11.000.700)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penyesuaian Lainnya	0,60	
CKPN		
Penyesuaian SAK EP		
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	0,60	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(165.578.450)	(82.912.550)
KAS PADA AWAL TAHUN	816.381.950	899.294.500
KAS PADA AKHIR TAHUN	650.803.500	816.381.950

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding 2024 Audited disajikan berdasarkan:

1 SAK EP (Entitas Privat);
Laporan keuangan BPR disusun sesuai dengan SAK EP. Sedangkan PA BPR merupakan petunjuk teknis bagi BPR dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK yang efektif saat ini. PA BPR bukan merupakan pengganti SAK EP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BPR. PA BPR tersebut sesuai dengan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan BPR.

2 Ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

3 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan BPR; dan

4 Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi keuangan selain SAK EP.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1 Komponen Laporan Keuangan
Komponen Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

2 Bahasa laporan keuangan
Laporan keuangan disusun dalam Bahasa Indonesia.

3 Tanggung jawab atas laporan keuangan
Direksi BPR bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4 Mata uang pelaporan
a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi BPR menggunakan mata uang selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, BPR menggunakan kurs sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

b. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Transaksi dalam mata uang asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

5 Prinsip Penyajian Laporan Keuangan
BPR menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi akrual, kecuali untuk informasi arus kas. Dalam dasar akrual, BPR mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.36).

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan diterima BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP lampiran B).

Adapun pos-pos yang merupakan aset keuangan seperti surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal disertai dengan pos pengurang berupa CKPN.

BPR menghitung Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kualitas aset BPR. Apabila nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti BPR.

BPR mengakui aset dalam laporan posisi keuangan ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke BPR dan nilai aset dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.37).

1). Kas

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan kas dalam perjalanan. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coins/notes), dan mata uang emas.

2). Kas dalam valuta asing

Kas dalam valuta asing adalah uang kertas asing *(banknotes)* dan *traveller's cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SAK EP Bab 30 tentang Penjabaran Valuta Asing. BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi *(spot rate)* yang berlaku pada tanggal perolehan/transaksi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 30.7). Pada setiap tanggal pelaporan BPR menjabarkan kas dalam valas ke rupiah dengan kurs penutup. Kurs penutup yang dirujuk adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan dengan menggunakan kurs tengah yaitu kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Kas dalam valuta asing disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

3). Surat Berharga

Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah. Surat berharga diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi. Contoh biaya transaksi yaitu *brokerage fee.* Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Surat berharga disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

4). Penempatan Pada Bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai secondary reserve. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

a. Aset *(Lanjutan)*

4). Penempatan Pada Bank lain *(Lanjutan)*

- Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
- Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Deposit on call merupakan deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- Sertifikat deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.
- Penempatan pada bank syariah merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah. Perlakuan akuntansi merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Giro, deposito, dan tabungan pada bank lain pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan, kecuali untuk produk sertifikat deposito dengan diskonto. Pengukuran selanjutnya, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi CKPN. CKPN penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang *(offsetting account)* dari penempatan tersebut.

5). Kredit yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi termasuk provisi. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit dengan debitur, BPR mengakui sebagai "kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang diberikan kepada debitur" sebesar Plafon Kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan Kredit yang disepakati BPR dengan debitur, kecuali untuk penerusan Kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas Kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu Kredit sesuai jenis Kreditnya,

Kredit disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud. Kredit kelolaan disajikan pada pos "Kredit yang Diberikan" berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

a. Aset *(Lanjutan)*

5). Kredit yang Diberikan *(Lanjutan)*

Pendapatan bunga dari Kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal Kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga Kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga Kredit atau pendapatan bunga Kredit yang akan diterima.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Selisih kurang antara perubahan estimasi arus kas atas Restrukturisasi Kredit dibandingkan dengan nilai tercatat diperhitungkan sebagai kerugian kredit.

Kredit restrukturisasi disajikan menjadi bagian dari Kredit.

Penghapusbukuan Kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif BPR untuk memindahkan nilai yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa mengurangi hak tagih BPR kepada debitur secara kontrak. Pada saat kredit dihapus buku, BPR telah membentuk CKPN sebesar 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat Kredit dengan menjurnal balik CKPN – Kredit yang diberikan. Kredit yang dihapus buku disajikan dalam Rekening Administratif. Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai Pendapatan Hapus Buku (Pendapatan Operasional Lainnya).

6). Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar dan SAK EP Bab 14 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.

BPR mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu metode yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

Penghasilan dividen dari investasi pada entitas asosiasi diakui pada saat hak grup untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Penghasilan dividen termasuk dalam penghasilan lain.

BPR mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sebagai aset tidak lancar. (Hal ini mengacu SAK EP paragraf 14.11)

7). Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR)

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

AYDA yang dicatat dalam laporan posisi keuangan hanya yang berasal dari penyelesaian kredit melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. BPR memperhitungkan AYDA yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset BPR.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

a. Aset *(Lanjutan)*

7). Agunan Yang Diambil Alih *(Lanjutan)*

Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.

Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Apabila AYDA mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

Apabila AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA tidak dilakukan depresiasi.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian operasional.

Hasil penjualan agunan yang dikuasai diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit.

Biaya transaksi dalam proses pengurusan AYDA dapat dikapitalisasi sepanjang nilai AYDA lebih besar dibandingkan nilai tercatat kredit setelah ditambah kapitalisasi biaya transaksi.

AYDA disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar mana yang lebih rendah, antara: nilai tercatat kredit; atau nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual.

8). Aset Tetap

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.2). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 17 tentang Aset Tetap, SAK EP Bab 20 tentang Sewa dan SAK EP Bab 27 tentang Penurunan Nilai Aset.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap tersedia untuk digunakan dan penyusutannya dihentikan ketika asset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

9). Properti Terbengkalai

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 16 tentang Properti Investasi.

10). Aset Tak Berwujud

Aset Takberwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 18.2).

Bab ini hanya diterapkan untuk akuntansi seluruh aset takberwujud selain goodwill.

Pengakuan awal aset takberwujud diakui sebesar biaya perolehan.

BPR mengukur aset takberwujud pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset takberwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya dan diakui sebagai beban setiap periode.

Penurunan nilai aset takberwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

a. Aset *(Lanjutan)*

11). Aset lainnya

Aset Lainnya adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Komponen aset lainnya, antara lain:

Pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, Mata uang kertas dan logam yang ditarik, Piutang dari perusahaan asuransi, Aset Pajak Tangguhan, Aset Keuangan Lainnya, Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima, Lainnya. Aset lainnya disajikan secara gabungan, kecuali komponennya memiliki nilai yang material, maka komponen tersebut disajikan tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

12). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar.

CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.21).

Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

- BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:

  aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.

- Apabila aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut; aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).

Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

- BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga); aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan Nilai

- BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan. Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual; tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

a. Aset *(Lanjutan)*

12). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) *(Lanjutan)*

Periode evaluasi penurunan nilai, bahwa setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai. Dalam hal BPR melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka BPR mengestimasi kembali arus kas masa datang dan CKPN untuk kredit tersebut.

Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, bahwa BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama; BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi, yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat menggunakan *peer group* data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.

Formulasi CKPN= PD x LGD x EAD

●Probability of Default (PD)

Merupakan tingkat kemungkinan kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya yang dapat diukur dengan pendekatan yaitu antara lain *Migration Analysis.*

●Loss Given Default (LGD)

Merupakan besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang diukur berdasarkan pendekatan *Collateral Shortfall.*

●Exposure at Default (EAD)

Merupakan estimasi besarnya eksposur kredit pada saat terjadi wanprestasi.

Saat ini BPR dalam menentukan kriteria pembentukan CKPN sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh direksi Nomor : 10/SK/CMA/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR. Penyelesaian kewajiban kini biasanya melibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.20, paragraf 2.21, dan lampiran B).

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan ketika:

- BPR memiliki kewajiban pada akhir periode pelaporan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu;
- Kemungkinan besar BPR akan menyelesaikan liabilitas tersebut dengan menyerahkan asetnya; dan
- Nilai liabilitas dapat diukur secara andal.

1). Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan merupakan liabilitas keuangan. Pengakuan awal sebesar nilai sekarang kas yang disampaikan ke BPR dikurangi biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jika tidak terdapat biaya transaksi, nilai pada umumnya sama dengan jumlah kas yang akan dibayarkan dan tidak didiskontokan.

Bentuk-bentuk simpanan berupa:

- Tabungan adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga. Perhitungan beban bunga menggunakan suku bunga efektif. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.

- Deposito adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu. Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai beban bunga. Deposito disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

- Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

b. Liabilitas *(lanjutan)*

2). Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito dari bank lain di Indonesia. Simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman yang diterima.

Tabungan dari bank lain, bahwa transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.

Deposito dari bank lain, bahwa transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Deposito dari bank lain disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

3). Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Liabilitas segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Tidak termasuk dalam liabilitas segera adalah utang bunga.

Jenis liabilitas segera antara lain: penutupan rekening deposito jatuh tempo; titipan nasabah; selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah; dividen yang belum dibayarkan; liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar; sanksi liabilitas membayar kepada otoritas yang belum dibayarkan; gaji/honor/upah yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Komponen-komponen tersebut apabila jumlahnya material dikelompokkan dalam pos tersendiri.

Transaksi liabilitas segera diakui pada saat liabilitas telah jatuh tempo; atau liabilitas menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Liabilitas segera dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

4). Utang

- Utang Bunga

Utang bunga merupakan seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi. Utang bunga antara lain terdiri dari Liabilitas bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga). Bunga deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Penyajian Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

- Utang Pajak

Utang pajak adalah liabilitas pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

Dasar Pengaturan Utang Pajak ada pada SAK EP Bab 29 tentang Pajak Penghasilan dan juga PA BPR Bab XXIV tentang Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

b. Liabilitas *(lanjutan)*

4). Utang *(Lanjutan)*

Utang pajak mencakup utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

Utang Pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Penyajian Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

5). Pinjaman

Pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat yunior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

Pengukuran awal yaitu pinjaman diakui sebesar nilai sekarang kas terutang (sebagai contoh, termasuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok). (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 11.13). Pengukuran selanjutnya pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman diterima dapat berasal dari bank umum, BPR lain, Bank Indonesia, atau pihak lain. Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR. Jenis pinjaman yang diterima antara lain: pinjaman bilateral; pinjaman sindikasi; pinjaman subordinasi; dan pinjaman khusus yang diterima dari lembaga pengayom maupun pinjaman dalam rangka linkage. Dalam ketentuan permodalan, pinjaman subordinasi masuk sebagai pinjaman dengan persyaratan tertentu sebagaimana POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Pinjaman yang diterima tidak termasuk: setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama); atau dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit *(channeling).*

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman, dikurangi bunga dibayar di muka jika ada (diskonto). Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui sebagai beban bunga. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai utang bunga. Penyajian Pinjaman yang diterima disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos utang bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik. Penempatan BPR berupa giro pada bank umum yang bersaldo kredit (overdraft) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman diterima.

6). Dana Setoran Modal-Liabilitas

Dana Setoran Modal (DSM) – Liabilitas adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DSM – Liabilitas tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas karena masih terdapat unsur ketidakpastian di mana BPR tetap memiliki liabilitas kontraktual sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat. Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyetor. Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian dari ekuitas BPR.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

b. Liabilitas *(lanjutan)*

6). Dana Setoran Modal-Liabilitas *(Lanjutan)*

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai DSM - Liabilitas. DSM - Liabilitas yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai DSM - Ekuitas. Penyajian DSM – Liabilitas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan.

7). Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPRatas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur danmanajemen. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)b. Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalankerja.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: imbalan kerja jangka pendek; imbalan pascakerja; imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan pesangon. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek: Secara umum diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto *(undiscounted amount).* (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.5)

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah terdiskonto *(discounted amount).*

Khusus untuk liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pastidan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya, BPR mengukur liabilitas pada total neto dari jumlah nilai kini liabilitas imbalan, dikurangi nilai wajar aset program (jika ada), pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf28.15 dan 28.30).

Khusus untuk pesangon, BPR mengakui pesangon sebagai beban dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pesangon tidak memberikan manfaat ekonomik kepada BPR di masa depan. Pesangon diakui sebagai liabilitas dan beban hanya ketika BPR menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemberhentian kontrak kerja sebelum tanggal pensiun normal, yang ditunjukkan dengan rencana formal terperinci untuk menghentikan pekerja dan tidak terdapat kemungkinan yang realistis untuk membatalkan rencana tersebut; atau memberikan pesangon sebagai hasil dari penawaran yang dilakukan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.34 dan 28.35)2). BPR mengukur pesangon pada estimasi terbaik dari pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban. Jika pesangon diberikan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela, pengukuran pesangon didasarkan pada jumlah pekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut. Jika pesangon jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, pesangon diukur pada nilai sekarang terdiskonto. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.36 dan 28.37).

Penyajian Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Liabilitas segera pada laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos liabilitas lainnya pada laporan posisi keuangan.

8). Liabilitas Lainnya

Liabilitas lainnya merupakan pos yang mencakup liabilitas BPR yangtidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Termasuk dalam liabilitas lainnya antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas lainnya diakui dalam hal BPR menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut dan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Penyajian Liabilitas lainnya disajikan dalam pos Liabilitas lain-lain pada laporan posisi keuangan.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

6 Laporan Posisi Keuangan *(Lanjutan)*

c. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya *(substance over form).* (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3 dan 22.4).

1). Modal

Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.

Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif diterima BPR.

Agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Modal sumbangan yaitu modal yang diterima BPR yang berasal dari sumbangan dalam bentuk dana atau aset lainnya.

2). DSM (Dana Setoran Modal) Ekuitas

DSM – Ekuitas yaitu dana yang telah disetor secara riil untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modaldisetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. (Undang-Undang No.40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas). Perlakuan terhadap modal dilakukan sesuai ketentuan permodalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang terkait perseroan terbatas, Undang-Undang terkait koperasi, POJK mengenai BPR, dan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

Modal disetor diakui pada saat BPR menerima setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar yang telah dikurangi biaya transaksi, jika ada. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.7 dan 22.8).

3). Saldo Laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap (yang telah masuk sebagai bagian saldo laba).

Saldo laba umumnya dikelompokkan menjadi:

1) Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.

2) Cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.

3) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:

a) laba tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan

b) laba tahun berjalan.

Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a. Penghasilan dan Beban

Penghasilan diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi peningkatan manfaat ekonomik masa depan terkait peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.41).

Penghasilan terdiri dari:

1). Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga, yaitu pendapatan dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif; dan pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksidan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya(dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Pendapatan Bunga terdiri dari:

- Pendapatan bunga kontraktual, yaitu pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi);
- Provisi kredit, yaitu pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan;

  Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga.

  Amortisasi provisi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi provisi.
- Biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan sertifikat Bank Indonesia, penempatan pada bank lainserta kredit yang diberikan. Biaya transaksi mencakup semua biaya tambahan yang terkait secara langsungdengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR,misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit; dan

  Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

  Amortisasi Biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi biaya transaksi.
- Koreksi pendapatan bunga, yaitu koreksi pendapatanbunga akrual atas aset produktif yang mengalamipenurunan kualitas atau penurunan nilai,sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporanbulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat. Bentuk pendapatan lainnya antara lain:

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain *(Lanjutan)*

- Pendapatan jasa transaksi (seperti payment point dan ATM);
- Keuntungan dari penjualan valuta asing;
- Keuntungan penjualan surat berharga;
- Penerimaan aset produktif yang dihapus buku;
- Pemulihan CKPN aset keuangan;
- Dividen;
- Keuntungan dari penyertaan dengan equity method;
- Keuntungan penjualan AYDA;
- Pendapatan ganti rugi asuransi; dan
- Pemulihan penurunan nilai AYDA.

Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

2). Beban Operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR.

Beban diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi penurunan manfaat ekonomik masa depan terkait penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.42).

Beban operasional diakui secara akrual, yaitu dampak daritransaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saatterjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kasdibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dandilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Beban Operasional terdiri dari:

- Beban Bunga

Beban bunga, yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR,seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban bunga antar kantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban non operasional sesuai ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat;

- Beban kerugian restrukturisasi kredit

Beban kerugian restrukturisasi kredit, yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilaikredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan CKPN aset keuangan karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi;

- Beban kerugian penurunan nilai

Beban kerugian penurunan nilai, yaitu CKPN asetproduktif antara lain berupa kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, dan penempatan pada bank lain. Detil mengenai kerugian penurunan nilai dapat merujuk standar akuntansi keuangan mengenai instrumen dasar. Pembentukan beban kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena BPR masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masadatang yang berasal dari kredit yang diberikan;

Beban kerugian penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan, BPR mengakui dan mengukur berdasarkan bukti objektif. Jika pada periode berikutnya, jumlah beban kerugian penurunan nilai menurun, maka BPR menyajikan jumlah perbaikan pada pemulihan CKPN pada pendapatan operasional lainnya.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain *(Lanjutan)*

a. Penghasilan dan Beban *(Lanjutan)*

- Beban pemasaran

  Beban pemasaran, yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi;

- Beban penelitian dan pengembangan

  Beban penelitian dan pengembangan, yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu: (1)biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR, (2) biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR, dan (3) beban pengeluaran yang terjadi secara internal pada suatu item aset tak berwujud;

- Beban administrasi dan umum

  Beban administrasi dan umum, termasuk beban tenagakerja, beban pendidikan & pelatihan, beban sewa, beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap & inventaris,beban amortisasi aset takberwujud, beban premi asuransi, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban barang & jasa, beban penyelenggaraan, teknologi informasi, kerugian terkait risiko operasional, dan pajak-pajak;

- Beban lainnya

  Beban lainnya, yaitu beban operasional lainnya termasuk kerugian penjualan valuta asing, kerugian penjualan surat berharga, kerugian dari penyertaan dengan equity method, kerugian penjualan AYDA, kerugian penurunan nilai AYDA, dan biaya pungutan OJK.

  Beban - beban lain seperti beban pemasaran, beban penelitiandan pengembangan, dan beban administrasi dan umum diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

b. Pendapatan dan Beban Non Operasional

1). Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non operasional merupakan semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Non operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. BPR mengakui pendapatan Non operasional menggunakan dasar akuntansi akrual, yaitu diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk akun tersebut.

Pendapatan Non Operasional terdiri dari:

- Keuntungan penjualan, yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Pemulihan penurunan nilai, termasuk penurunan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai;
- Bunga antar kantor, yaitu pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan pendapatan bunga antar kantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan beban bunga antar kantor *(gross)* , sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (offsetting/net);
- Selisih kurs, yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya;
- Pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga yang tidak dapat dikelompokkan seprti di atas.Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih; sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain *(Lanjutan)*

b. Pendapatan dan Beban Non Operasional *(Lanjutan)*

2). Beban Non Operasional

Beban Non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

Beban nonoperasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Beban Non Operasional terdiri dari:

- Kerugian penjualan/kehilangan, yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Bunga antar kantor, yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan beban bunga antar kantor untuk keperluan laporan keuangan bertujuan umum secara gabungan disajikan secara saling hapus(offsetting/net);
- Selisih kurs, yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya; dan
- Beban lainnya, termasuk sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.

c. Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan

1). Pajak Kini

Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan)terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan atau periode lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi BPR sebagai bagian dari biaya operasional. Pengakuan ini harus dilakukan pada periode pelaporan yang sesuai dengan prinsip akrual, yaitu beban pajak harus diakui pada saat pendapatan diperoleh atau biaya terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan.

Beban pajak penghasilan diukur berdasarkan tarif pajak yangberlaku pada periode pelaporan yang bersangkutan. Tarif pajak yang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis pendapatan atau pengeluaran, serta peraturan pajak yang berlaku.

2). Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari BPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajak kini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Aset pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer dapat dikurangkan di masa depan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Aset pajak tangguhan juga diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.12 dan 29.21)

Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan termporer kena pajak.

Liabilitas dan aset pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus pada jumlah neto Pajak Tangguhan.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain *(Lanjutan)*

c. Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan *(Lanjutan)*

Saat ini BPR Belum menyajikan Pajak Tangguhan.

d. Laporan Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain adalah item penghasilan dan beban(termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi yang disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan.

Penghasilan komprehensif lain timbul dari poin dalam SAK EP Bab5 Paragraf 5.4 (b). Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasiaset tetap. Surplus revaluasi aset tetap tidak direklasifikasikan kelaba rugi. Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap bila BPR memilih kebijakan akuntansi revaluasi untuk aset tetapnya (lihat bab IX tentang Aset Tetap dan Inventaris). Surplus revaluasi aset tetap tidak di reklasifikasikan ke laba rugi.

8 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan. Laporan arus kas menunjukkan secara terpisah penerimaan dan pengeluaran kas BPR dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.1)

Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas dan pinjaman BPR yang dikontribusikan.

BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, dengan metode ini pos-pos utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.7)

Kas terdiri atas:

1) kas dalam rupiah dan kas dalam valuta asing;
2) rekening giro pada bank lain;
3) tabungan pada bank atau BPR lain.

b. Setara kas, antara lain:

1) surat berharga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
2) deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

9 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, item penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan (tergantung pada format laporan dari perubahan ekuitas yang dipilih oleh BPR) jumlah transaksi dengan pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

10 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

11 Instrumen Keuangan

- Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada BPR dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.3).

- BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas keuangan sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya dan tidak hanya dari bentuk hukumnya (substance over form). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).
- Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika BPR harus menyelesaikan kewajiban kontraktualnya melalui penyerahan kas atau aset lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).

12 Suku Bunga Efeketif

Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur instrumen keuangan ke jumlah tercatat aset atau liabilitas keuangan tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.16).

13 Pengukuran Aset Non Keuangan dan Liabilitas Non Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46). Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- Semisal Aset Tetap yaitu dengan model biaya, diukur pada yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan; atau Model revaluasi, diukur pada yang lebih rendah antara jumlah revaluasian dan jumlah terpulihkan.
- BPR mengakui kerugian penurunan nilai terkait aset nonkeuangan yang digunakan atau dikuasai untuk dijual, sebagai contoh aset yang diambil alih.
- SAK EP mengizinkan atau mensyaratkan pengukuran pada nilai wajar untuk: investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur BPR pada nilai wajar; properti investasi yang diukur BPR pada nilai wajar; dan aset tetap yang diukur BPR dengan model revaluasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.50).
- Kebanyakan liabilitas selain liabilitas keuangan diukur pada estimasi terbaik atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.51).

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(Lanjutan)*

14 Pengukuran Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas keuangan pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46) Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- BPR mengukur aset keuangan dasar dan liabilitas keuangan dasar pada biaya perolehan diamortisasi *(amortised cost)* dikurangi penurunan nilai. Pengukuran ini dikecualikan untuk: investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi; dan saham biasa atau saham preferen tanpa opsi jual yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Investasi dan saham di atas diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.47).
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali disyaratkan lain oleh SAK EP. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.48)
- Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai bersih dari: jumlah saat pengakuan awal; dikurangi setiap pelunasan pokok; ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan dikurangi penurunan nilai (untuk aset keuangan). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.15).

15 Saling Hapus

- BPR tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban. Saling hapus hanya diperbolehkan dalam rangka penyajian untuk transaksi yang memiliki sifat yang sama, sebagai contoh keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs.
- Pengukuran aset secara neto dengan nilai penyisihan bukan merupakan saling hapus.
- Jika aktivitas operasi normal BPR tidak mencakup pembelian atau penjualan aset tidak lancar, maka BPR melaporkan Keuntungan dan kerugian pelepasan aset tersebut dengan cara mengurangi hasil pelepasan dengan jumlah tercatat asetnya dan beban penjualan terkait.

  (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.52)

16 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan Keuangan

Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan adalah peristiwa-peristiwa, baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi antara akhir periode pelaporan (tanggal laporan posisi keuangan) dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Sampai dengan akhir pemeriksaan bahwa BPR tidak terdapat Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan Keuangan.

17 Pengungkapan Pihak Berelasi

Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan keuangan berisi pengungkapan yang diperlukan untuk menarik perhatian pada kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak berelasi. Pihak berelasi dijelaskan pada transaksi akun Kredit terkait dan Simpanan terkait.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

C.1 Kas

Saldo Kas 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Kas Gabungan	650.803.500	816.381.950
Saldo	**650.803.500**	**816.381.950**

C.2 Penempatan Pada Bank Lain

Saldo Penempatan Pada Bank Lain 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	Selisih Rekonsiliasi 2025 yang dijurnal BPR di Januari 2026	2025	2024
Giro:			
Giro BANK BCA	30.137.157,03	11.191.492.080	7.387.333.465
Giro BANK MANDIRI	12.960.715,05	3.696.032.613	7.622.144.478
Giro BANK MANDIRI 2	4.999.999,80	175.626.959	-
Giro BANK PERMATA	4.556.555,45	4.581.275.405	12.268.089.196
Giro BANK BRI	13.004.999,70	1.204.518.186	4.807.561.703
Giro BANK BRI 2	43.056.599,90	2.122.577.334	-
Giro BANK BPD	584.065,00	578.631.596	409.009.869
Giro BANK BNI	1.358.848,00	1.019.444.899	683.705.000
GIRO BTN SYARIAH		-	928.450.671
Saldo Giro:	**110.658.940**	**24.569.599.072**	**34.106.294.382**
Tabungan:			
Tabungan BANK BCA		-	595.718.497
Saldo Tabungan:		**-**	**595.718.497**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Penempatan Pada Bank Lain *(Lanjutan)*

Deposito:

Deposito BANK JATENG	100.000.000	100.000.000
Deposito BANK BPD DIY	200.000.000	200.000.000
Deposito BANK Mayapada	3.000.000.000	-
Deposito BPR ALTO MAKMUR	300.000.000	300.000.000
Deposito BPR ALTO MAKMUR	500.000.000	-
Deposito BPR DANAGUNG SYARIAH	300.000.000	300.000.000
Deposito BPR DANAGUNG SYARIAH	300.000.000	300.000.000
Deposito BPR DANAGUNG	500.000.000	500.000.000
Deposito BPRS HIK MITRA CAHAYA INDONESIA	1.000.000.000	-
Deposito BPRS CAHAYA HIDUP	500.000.000	-
Deposito BPRS CAHAYA HIDUP	400.000.000	-
Deposito BPR CEPER	-	1.000.000.000
Deposito BPR CEPER	500.000.000	-
Deposito BPR CEPER	500.000.000	-
Deposito BPRS MADINA	-	1.000.000.000
Deposito BPRS MADINA	500.000.000	-
Deposito BPRS MADINA	500.000.000	-
Deposito BPR KURNIA SEWON	500.000.000	-
Deposito BPR KURNIA SEWON	500.000.000	-
Deposito BPR WIRA ARDANA SEJAHTERA	500.000.000	500.000.000
Deposito BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	250.000.000	250.000.000
Deposito BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	1.000.000.000	-
Deposito BPR LESTARI JOGJA	-	1.000.000.000
Deposito BPR LESTARI JOGJA	500.000.000	-
Deposito BPR LESTARI JOGJA	500.000.000	-
Deposito BPR Indra Candra	1.000.000.000	-
Deposito BPR SYARIAH SLEMAN	500.000.000	-
Deposito BPR SYARIAH SLEMAN	500.000.000	-
Deposito BPR SENTRAL MANDIRI	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR Bank Jombang Perseroda	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	-
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	-
Deposito BPR BRILIAN INVESTAMA	1.000.000.000	1.000.000.000
Deposito BPR AMBARKETAWANG PERSADA	1.000.000.000	-
Deposito BPR ARTHA KARYA USAHA	900.000.000	-
Deposito BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN	1.000.000.000	-

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Penempatan Pada Bank Lain *(Lanjutan)*

Deposito:

Deposito BPR METROPOLITAN PUTERA (TERKAIT)	250.000.000	-
Deposito BPR METROPOLITAN PUTERA (TERKAIT)	1.000.000.000	-
Deposito BPRS MITRA HARMONI	500.000.000	-
Deposito BPR KLATEN SEJAHTERA	500.000.000	-
Deposito BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA	500.000.000	-
Deposito BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA	500.000.000	-
Deposito BPR SAUDARA KITA(TERKAIT)	1.000.000.000	-
Deposito BPR MODERN EXPRESS	1.000.000.000	-
Deposito BPR DP TASPEN	1.000.000.000	-
Deposito BPRS AL HIJRAH AMANAH	500.000.000	-
Deposito BPRS KEDUNG ARTO	500.000.000	-
Deposito BPRS KEDUNG ARTO	500.000.000	-
Deposito BPR HALDEN PRIME	500.000.000	-
Deposito BPR INTAN NASIONAL(TERKAIT)	500.000.000	-
Deposito BPR RAMA GANDA	500.000.000	-
Deposito BPR NBP 29	500.000.000	-
Deposito BPR KARYA PRIMA SENTOSA	500.000.000	-
Deposito BPR NBP 11	500.000.000	-
Deposito BPR DELANGGU RAYA	500.000.000	-
Deposito BPR RAMA GANDA	-	1.000.000.000
HOSSING (TERKAIT) 3 BILYET LIKUIDITAS	-	1.000.000.000
HOSSING (TERKAIT) 3 BILYET LIKUIDITAS	-	500.000.000
HOSSING (TERKAIT) 3 BILYET LIKUIDITAS	-	500.000.000
Saldo Deposito:	**34.000.000.000**	**12.450.000.000**
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	**58.569.599.072**	**47.152.012.879**

CKPN Penempatan Pada Bank Lain

Saldo 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	**2024**
Saldo Awal	(123.512.497)	(103.569.980)
Pembentukan penyisihan selama thn brjalan	(155.559.848)	(114.693.273)
Penyesuaian/ Pembalikan tahun berjalan	194.211.267	94.750.756
Saldo CKPN Penempatan Pada Bank Lain	**(84.861.078)**	**(123.512.497)**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.3 Kredit Yang Diberikan

Saldo Kredit Yang Diberikan 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

		2025	2024
1.	**Berdasarkan Jenis Penggunaan**		
	KYD - KREDIT MODAL KERJA	90.563.579.990	
	KYD - KREDIT INVESTASI	116.287.012.489	
	KYD - KREDIT KONSUMTIF	41.149.156.551	
	KYD - KREDIT KARYAWAN INTERNAL	101.798.070	
	Pinjaman Berjangka		98.374.164.740
	Pinjaman Angsuran		235.156.638.850
	Saldo Berdasarkan Jenis Penggunaan	**248.101.547.099**	**333.530.803.590**
	SELISIH FLAT VS EIR	**2.814.085.832**	
2.	**Berdasarkan Kolektibilitas Kredit**		
	Lancar	109.126.027.980	180.432.978.522
	Dalam Perhatian Khusus	38.195.298.791	68.674.383.591
	Kurang Lancar	8.681.133.519	2.344.285.538
	Diragukan	10.378.586.801	6.685.184.443
	Macet	81.720.500.009	75.393.971.496
	Saldo Berdasarkan Kolektibilitas Kredit	**248.101.547.099**	**333.530.803.590**
3.	**Berdasarkan Keterkaitan**		
	Pihak terkait	-	-
	Pihak Tidak Terkait	248.101.547.099	333.530.803.590
	Saldo Berdasarkan Keterkaitan	**248.101.547.099**	**333.530.803.590**

Biaya Provisi, Administrasi dan Transaksi	**2025**	**2024**
Saldo 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Provisi dan administrasi Kredit	(893.838.113)	(1.196.271.786)
Biaya Transaksi	74.480.175	186.517.855
Saldo	**(819.357.938)**	**(1.009.753.931)**

Pendapatan Bunga Ditangguhkan	**2025**	**2024**
Saldo Pendapatan Bunga Ditangguhkan 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(2.232.288.590)	(2.838.937.776)
Saldo Pendapatan Bunga Ditangguhkan	**(2.232.288.590)**	**(2.838.937.776)**

Pendapatan bunga yang ditangguhkan merupakan dari proses restrukturisasi kredit

Saldo Kredit Yang Diberikan	**247.863.986.403**	**329.682.111.883**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Kredit Yang Diberikan *(Lanjutan)*

CKPN Kredit Yang Diberikan	**2025**	**2024**
Saldo P 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Saldo Awal	**(13.700.847.547)**	**(12.109.612.454)**
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	-	(3.373.469.602)
Penyesuaian/ Pembalikan tahun berjalan	4.281.022.983	1.524.968.379
Penghapusan Kredit Tahun Berjalan	-	257.266.131
Saldo CKPN Kredit Yang Diberikan	**(9.419.824.564)**	**(13.700.847.547)**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah CKPN kredit yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

C.4 Agunan Yang Diambil Alih	**2025**	**2024**
Merupakan agunan yang diambil alih oleh bank atas debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank dengan rincian sebagai berikut :		
AYDA TANAH, BANGUNAN/RUMAH	21.925.550.004	12.425.315.455
Saldo Pinjaman Diterima	**21.925.550.004**	**12.425.315.455**

C.5 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2023	**Penambahan**	**Pengurangan**	**2024**
Harga Perolehan				
Tanah dan Gedung	3.926.250.000			3.926.250.000
Kendaraan	470.065.000		333.415.000	136.650.000
Alat Kantor	2.194.244.431	40.515.700		2.234.760.131
Jumlah	**6.590.559.431**	**40.515.700**	**333.415.000**	**6.297.660.131**
Akumulasi Penyusutan				
Gedung	(1.684.742.023)	(196.312.500)		(1.881.054.523)
Kendaraan	(387.044.162)	(28.020.835)	(333.415.000)	(81.649.997)
Alat Kantor	(1.807.887.889)	(134.864.892)		(1.942.752.781)
Jumlah	**(3.879.674.074)**	**(162.885.727)**	**(333.415.000)**	**(3.905.457.301)**
Nilai Buku :	**2.710.885.357**			**2.392.202.830**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Aset Tetap *(Lanjutan)*

	2024	Penambahan	Pengurangan	2025
Harga Perolehan				
Tanah dan Gedung	3.926.250.000			3.926.250.000
Kendaraan	136.650.000			136.650.000
Alat Kantor	2.234.760.131	149.186.000		2.383.946.131
Jumlah	**6.297.660.131**	**149.186.000**	**-**	**6.446.846.131**
Akumulasi Penyusutan				
Gedung	(1.881.054.523)	(196.312.500)		(2.077.367.023)
Kendaraan	(81.649.997)	(15.000.000)		(96.649.997)
Alat Kantor	(1.942.752.781)	(136.166.392)		(2.078.919.173)
Jumlah	**(3.905.457.301)**	**(151.166.392)**	**-**	**(4.252.936.193)**
Nilai Buku :	**2.392.202.830**			**2.193.909.939**

C.6 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Harga Perolehan Aset Tak Berwujud	756.400.000	746.400.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(261.076.052)	(166.838.554)
Saldo Aset Tak Berwujud	**495.323.948**	**579.561.446**

C.7 Aset Lain-Lain

Saldo Lain-Lain 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA - ABA	-	
PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA - KYD	2.136.607.606	3.362.476.947
Pajak Dibayar Dimuka	900.835.519	1.003.242.119
Biaya Dibayar Dimuka		
Sewa Gedung	687.500.000	-
Premi Asuransi Kas	4.970.415	4.970.428
Asuransi Tenaga Kerja	-	360.000.000
Asuransi Gedung	8.534.001	-
Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	602.115.066	981.689.919
ALL-LAINNYA		
Penyelesaian Kredit	2.435.705.112	2.142.907.444
Materai	3.030.000	3.880.000
Deposit Pajak	3.690.627	-
Saldo Aset Lain-Lain	**6.782.988.346**	**7.859.166.857**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.8 Liabilitas Segera

	2025	2024
Saldo Liabilitas Segera 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Liabilitas Kepada Pemerintah		
PPh Tabungan	9.673.751	8.945.693
PPh Deposito	272.181.244	352.974.029
PPh 21	19.038.537	-
PPH 23 Jasa Lainnya	23.018	-
PPh lainnya	21.882.391	21.012.031
Liabilitas Segera Lainnya		
Titipan Nasabah	334.583.589	385.451.673
Titipan Biaya Notaris	-	2.500.000
Titipan Biaya Asuransi	22.097.117	29.766.526
Titipan Sementara	208.550.000	-
Lainnya	55.801.017	132.682.500
Saldo Liabilitas Segera	**943.830.664**	**933.332.452**

C.9 Simpanan

	2025	2024
Saldo Simpanan 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Berdasarkan Jenis		
Tabungan		
TABUNGAN MUKTI	12.149.592.127	10.822.622.865
TABUNGAN TAMASYA PLUS	11.497.831.054	10.865.389.562
TABUNGAN WISATA PLUS	365.573.620	247.833.640
TABUNGAN TABUNGANKU	3.941.857.831	5.197.336.401
TABUNGAN CMA PRIO	2.468.429.162	1.622.641.185
TABUNGAN RISMA	7.388.519.466	5.261.499.288
Saldo Tabungan	**37.811.803.260**	**34.017.322.941**
Berdasarkan Jangka waktu		
Deposito		
Deposito 1 bulan	84.972.049.731	118.460.568.160
Deposito 3 bulan	101.361.235.068	117.043.180.407
Deposito 6 bulan	38.850.640.027	44.036.968.831
Deposito 12 bulan	28.849.212.936	37.644.328.856
Deposito 36 bulan	6.028.219	5.663.905
Saldo Deposito	**254.039.165.981**	**317.190.710.159**
Saldo Simpanan	**291.850.969.241**	**351.208.033.100**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Simpanan *(Lanjutan)*

Berdasarkan Keterkaitan		
Tabungan		
Terkait	72.781.029	72.359.296
Tidak Terkait	37.739.022.231	33.944.963.645
Saldo Tabungan	**37.811.803.260**	**34.017.322.941**
Deposito		
Terkait	159.974.920	-
Tidak Terkait	253.879.191.061	317.190.710.159
Saldo Deposito	**254.039.165.981**	**317.190.710.159**

C.10 Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Saldo Awal	**109.200.000**	**63.200.000**
Pembentukan	98.550.000	109.200.000
Pencairan	(109.200.000)	(63.200.000)
Saldo Liabilitas Imbalan Kerja	**98.550.000**	**109.200.000**

C.11 Liabilitas Lainnya

Saldo Liabilitas Lainnya 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Utang Bunga Deposito	709.701.947	972.256.822
PPh Badan	350.000.000	472.644.182
Saldo Liabilitas Lainnya	**1.059.701.947**	**1.444.901.004**

C.12 Modal Disetor

Saldo Modal Disetor 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Modal Dasar	50.000.000.000	50.000.000.000
Modal yang belum disetor	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)
Saldo Modal Disetor	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.13 Saldo Laba

Saldo Saldo Laba 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Cadangan Umum	4.000.000.000	4.000.000.000
Cadangan Tujuan	-	-
Belum Ditentukan Tujuannya		
Laba Tahun Lalu	9.386.926.701	7.711.192.391
Laba Tahun Berjalan	1.637.497.017	1.675.734.310
Saldo Saldo Laba	**15.024.423.717**	**13.386.926.701**

C.14 Pendapatan Bunga Kontraktual

Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Dari Bank Lain		
GIRO DARI BANK UMUM	490.368.649	825.225.209
TABUNGAN	7.002	44.900
DEPOSITO	1.859.497.659	1.385.886.296
Jumlah Dari Bank Lain	**2.349.873.311**	**2.211.156.405**
Dari Pihak Ketiga bukan Bank		
PENDAPATAN BUNGA KYD	30.358.686.386	40.555.066.644
PENDAPATAN BUNGA TANGGUHAN	-	597.619.174
PENDAPATAN PROVISI	1.030.473.138	1.245.552.351
ADMINISTRASI DAN KOMISI	226.188.435	1.086.129.505
BIAYA TRANSAKSI	(141.099.680)	(130.878.633)
KOREKSI PENDAPATAN BUNGA	-	(63.606.251)
PENDAPATAN BUNGA EIR	2.814.085.832	-
Jumlah Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	**34.288.334.111**	**43.289.882.791**
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	**36.638.207.421**	**45.501.039.196**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.15 Pendapatan Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
PENERIMAAN KREDIT YANG DIHAPUSBUKU	23.689.171	1.200.000
PEMULIHAN CKPN		
CKPN - KYD	4.281.022.983	1.524.968.379
CKPN - ABA	194.211.267	94.750.756
PENDAPATAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN	1.430.534.353	1.341.368.425
PENDAPATAN ADMINISTRASI TABUNGAN		
BULANAN	127.958.118	134.908.378
TUTUP REKENING	7.558.183	12.918.933
GANTI BUKU TABUNGAN	552.000	663.000
PENDAPATAN PENALTY DEPOSITO	326.513	2.924.020
PENDAPATAN BUNGA DEBIUS	684.000	-
PENDAPATAN ADMINISTRASI KREDIT	2.250.000	3.550.000
PENDAPATAN SELISIH KAS	24.275	26.699
POL LAINNYA	254.247.688	1.011.145.505
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	**6.323.058.550**	**4.128.424.095**

C.16 Beban Bunga

Jumlah Beban Bunga 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
BEBAN BUNGA TABUNGAN	756.085.794	1.099.472.539
BEBAN BUNGA PHK KE III BBEBAN - DEPOSITO	19.588.229.853	21.711.979.149
BEBAN PREMI PENJAMINAN LPS	708.700.723	762.036.280
Jumlah Beban Bunga	**21.053.016.370**	**23.573.487.968**

C.17 Beban Kerugian Penurunan Nilai

Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
BEBAN CKPN - PENEMPATAN PADA BANK LAIN	155.559.848	114.693.273
BEBAN CKPN - KYD	-	3.373.469.602
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	**155.559.848**	**3.488.162.875**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.18 Beban Pemasaran

Jumlah Beban Pemasaran 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
BEBAN IKLAN	75.593.508	21.926.110
BEBAN TRANSAKSI	4.666.665	833.333
BEBAN HADIAH/UNDIAN	514.707.160	561.609.201
BEBAN LITERASI & INKLUSI	2.207.500	-
BEBAN LAINNYA PEMASARAN	88.571.344	27.374.900
Jumlah Beban Pemasaran	**685.746.177**	**611.743.544**

C.19 Beban Administasi dan Umum

Jumlah Beban Administasi Dan Umum 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

Beban Tenaga Kerja	2025	2024
GAJI	8.666.705.188	9.641.283.165
UM& TRANS	1.095.036.000	1.713.616.000
BONUS/THR	1.482.166.745	1.880.424.948
LEMBUR	208.075.750	170.318.275
IMBALAN KERJA LAINNYA	357.991.327	334.394.100
BPJS - KETENAGAKERJAAN	-	32.402.974
BPJS - KESEHATAN	923.386.980	586.931.706
Sub Jumlah Beban Tenaga Kerja	**12.733.361.990**	**14.359.371.168**
Beban Pendidikan		
PENDIDIKAN	**340.293.175**	**458.047.925**
Beban Sewa		
BEBAN SEWA GEDUNG KANTOR	530.100.679	491.232.581
BEBAN SEWA KENDARAAN	523.507.540	533.812.756
BEBAN SEWA LAINNYA	17.327.372	17.414.022
Sub Jumlah Beban Sewa	**1.070.935.591**	**1.042.459.359**
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
GEDUNG	196.312.500	196.312.500
INVENTARIS KENDARAAN	15.000.000	28.020.835
INVENTARIS PERABOT ALAT KANTOR	136.166.392	134.864.892
BEBAN AMORTISASI A.TIDAK BERWUJUD	94.237.498	65.796.873
Sub JumlahBeban Penyusutan dan Amortisasi	**441.716.390**	**424.995.100**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Beban Administasi dan Umum *(Lanjutan)*

Beban Premi Asuransi

BEBAN PREMI ASURANSI	459.000.000	-
ASURANSI CASH IN SAVE	11.660.013	11.659.992
ASURANSI KEBAKARAN	4.053.312	-
ASURANSI GEMPA	4.480.680	-
Sub Jumlah Beban Premi Asuransi	**479.194.005**	**11.659.992**

Beban Pemeliharaan & Perbaikan

BEBAN PEMELIHARAAN KENDARAAN	12.914.500	23.054.500
BEBAN GEDUNG KANTOR	10.460.500	67.654.500
PERALATAN KANTOR/INVENTARIS	26.081.000	18.266.000
PERBAIKAN LAINNYA	122.585.610	64.865.640
Sub Jumlah Beban Pemeliharaan & Perbaikan	**172.041.610**	**173.840.640**

Beban Barang & Jasa

BEBAN PERALATAN KANTOR	-	271.500
BEBAN ALAT TULIS KANTOR	135.668.925	151.836.071
BEBAN KOMUNIKASI	418.956.043	400.651.605
BEBAN LISTRIK	202.414.746	217.442.397
BEBAN BBM	497.809.614	565.340.816
BEBAN LITERASI/LANGGANAN KORAN, MAJALAH	4.445.000	3.539.000
BEBAN PHOTO COPY	2.159.146	2.270.166
BEBAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA	68.090.998	76.848.686
BEBAN PAM	2.791.480	4.169.480
BEBAN PARKIR&KEAMANAN	2.790.000	769.000
BEBAN KONSULTAN	41.580.000	20.000.000
BEBAN CETAKAN	213.147.860	196.716.761
BEBAN SERAGAM KARY	81.435.000	2.572.000
BEBAN PERJALANAN DINAS	54.662.550	95.801.400
BEBAN PENAGIHAN	1.071.754.082	740.670.477
BEBAN BARANG DAN JASA LAINNYA	717.575.225	527.704.959
Sub Jumlah Beban Barang & Jasa	**3.515.280.669**	**3.006.604.318**

Beban Pajak Non PPh

PBB	1.137.888	-
BEBAN PAJAK KENDARAAN	2.523.600	38.122.388
BEBAN PAJAK IKLAN	-	2.913.850
BEBAN PAJAK LAINNYA	5.321.937	-
Sub Jumlah Beban Pajak Non PPh	**8.983.425**	**41.036.238**

Jumlah Beban Administasi Dan Umum	**18.761.806.854**	**19.518.014.740**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.20 Beban Operasional Lainnya

Jumlah Beban Operasional Lainnya 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

	2025	2024
BEBAN ADMINISTRASI BANK	6.378.453	14.670.560
BEBAN ADM UM LAINNYA	28.759.570	221.866.266
BEBAN YANG DIBEBANKAN OLEH OJK	8.240.000	7.864.600
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	290.768.036	2.500.000
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**334.146.059**	**246.901.426**

C.21 Pendapatan Non Operasional

Jumlah Pendapatan Non Operasional 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

	2025	2024
PENJUALAN INVENTARIS	-	-
PENJUALAN AYDA	6.229.167	-
PENDAPATAN NON OPS FEE NOTARIS	24.909.500	47.249.500
PENDAPATAN NON OPS FEE ASURANSI	1.477.111	12.558.570
PENDAPATAN NON OPS SURAT KETERANGAN	4.205.000	4.865.000
PENDAPATAN NON OPS LAINNYA	40.660.675	69.228.966
Jumlah Pendapatan Non Operasional	**77.481.453**	**133.902.036**

C.22 Beban Non Operasional

Jumlah Beban Non Operasional 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

	2025	2024
KERUGIAN KEHILANGAN/ PENJUALAN ASET TETAP	44.192.300	60.600.000
BEBAN OLAHRAGA / REKREASI	250.000	2.300.000
ENTERTAIN	3.199.800	808.700
SUMBANGAN	9.550.000	8.800.000
DANA SOSIAL	-	200.001
IURAN KEANGGOTAAN PERBARINDO/PERBANKAN	-	31.800.000
BEBAN NON OPS LAINNYA	3.783.000	72.167.580
Jumlah Beban Non Operasional	**60.975.100**	**176.676.281**

C.23 Taksiran Pajak Penghasilan

Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

2025	2024
350.000.000	**472.644.182**

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.24 Komitmen dan Kontijensi

Jumlah Komitmen Dan Kontijensi 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

	2025	2024
Tagihan kontijensi:		
Fasilitas Pinjaman Yang Belum Ditarik		
Bunga Kredit yang diberikan		
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	27.810.469.016	23.856.910.968
Agunan Proses Penyelesaian Kredit		
Aset Produktif yang Dihapusbukukan		
Kredit yang diberikan	8.764.305.880	8.787.995.051
Pendapatan Bunga Kredit Hapus Buku	1.828.874.192	1.831.570.465
Lainnya	4.462.650.235	126.000.000
Jumlah Tagihan Kontijensi	**42.866.299.323**	**34.602.476.484**

D. UMUM

D.1 Pendirian Perusahaan

PT. BPR Chandra Muktiartha berlokasi di Jl. Gedong Kuning No. 150 A Banguntapan, Bantul, DIY. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 73 Tanggal 13 April 1993 dibuat dihadapan Raden Mas Surjanto Partaningrat, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta. Kemudian dirubah dengan Akta perubahan Nomor: 75 oleh Notaris yang sama pada tanggal 12 Juli 1993 untuk mendapat persetujuan/ pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: C2-7869.HT.01.01.TH.93 dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 1993. PT. BPR Chandra Muktiartha berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir yang termaktub dalam Akta No. 89 tertanggal 15 Maret 2023 dibuat di hadapan Stefanus Yuwono Tedjo Saputro., ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH Sarjana Hukum di Semarang yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor : AHU-AH.01.09-0102755 tanggal 18 Maret 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas BPR Chandra Muktartha. Dalam RUPS tersebut memutuskan pengangkatan kembali anggota dewan direksi dan komisaris.
Pada tanggal 19 Desember 2024 BPR terdapat RUPS yang menyatakan perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. RUPS teresebut disahkan dalam Akta No.24 tanggal 24 Februari 2025 oleh Notaris Stefanus Yuwono Tedjo Saputro., ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH Sarjana Hukum di Semarang yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0041212 tanggal 11 Februari 2025.

D.2 Tempat dan Kedudukan

PT. BPR Chandra Muktiartha berkedudukan di :

a. Kantor Pusat
   Jl. Gedongkuning No 150A, Banguntapan,Bantul, D.I. Yogyakarta, Indonesia,(0274) 376276 / 385192
b. Kantor Cabang
   - Kantor Cabang Wonosari, beralamat di Jl. MGR. Sugiyopranoto No.66 Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta, Indonesia, (0274) 391566
   - Kantor Cabang Kota Yogyakarta, beralamat di Jl. Letjen Suprapto No.48 Ngampilan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia, (0274) 5304727
c. Kantor Kas
   - Kantor Kas Karangmojo Wonosari, beralamat di Jl. Karangmojo - Wonosari km 0.5 Gunungkidul D.I Yogyakarta Indonesia, (0274) 29102487
   - Kantor Kas Playen , beralamat di Jl. Manthous, Jatisari, RT 16 RW 04 Playen, Playen Gunungkidul Indonesia, (0274) 2903297.

D.3 Perijinan Usaha

Dalam melaksanakan usahanya PT. BPR Chandra Muktiartha memiliki perjanjian sebagai berikut:

1. Ijin Menjalankan Usaha Nomor:Kep-173/Km.17/1994 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 28 Juni 1994.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Departement Keuangan Republik Indenesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Yogyakarta dengan Nomor 01.599.238.1-543.000.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0403220043353 tertanggal 4 Maret 2022.

1. UMUM *(Lanjutan)*

D.4 Modal BPR

Modal Dasar Bank telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir berdasarkan Akta Nomor 100 Tanggal 31 Desember 2021 dihadapan Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputra, ST., SH., MBA., M.Sis., M.Kn., MH., Notaris di Semarang modal disetor yaitu berjumlah Rp50.000.000.000,- yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham @ Rp1.000.000,-. Adapun yang ditempatkan dan disetor sebesar 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham sebagai berikut :

Nama	Lembar Saham	Nominal @ Rp1.000.000	%
Tn. Drs. Agus Pramono	9.133	9.133.000.000	45,67%
Tn. Halim Susanto	6.867	6.867.000.000	34,33%
PT Merdeka Jaya	4.000	4.000.000.000	20,00%
Modal Disetor	**20.000**	**20.000.000.001**	**100%**

Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat perubahan modal disetor

D.5 Susunan Pengurus dan Karyawan

Susunan Pengurus perseroan terdapat perubahan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 9 Juli 2025 dihadapan Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputra,ST., SH., MBA., M.Sis., M.Kn., MH., Notaris di Semarang dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.09-0312365 tanggal 17 Juli 2025, dengan susunan kepengurusan Bank per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :			Masa Jabatan
- Komisaris Utama	:	Tn. Fransiscus Xaverius Soewardi Wakidin	(9-7-2025 s.d 9-7-2028)
- Komisaris	:	Tn. Ch. Bagus Anggara Jita	(9-7-2025 s.d 9-7-2028)
Direksi :			
- Direktur Utama	:		
- Direktur	:		
- Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	:	Ny. Cicilia Wiwik	(s.d 19-5-2028)

Atas Nama Tn. Kus Sentono Halim, SE sudah tidak menjabat Direktur sesuai RUPSLB Tanggal 01 Desember 2025.

Sampai pada akhir pemeriksaan, PT. BPR Chandra Muktiartha memiliki karyawan berjumlah 146 karyawan dengan rincian sebagai berikut :

- Karyawan Tetap : 117
- Karyawan Kontra : 29

D.6 Penyajian Kembali Laporan keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2025, Bank telah menerapkan SAK Entitas Privat (SAK EP) sebagai kerangka pelaporan keuangan, menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Transisi ini merupakan perubahan kerangka pelaporan keuangan yang signifikan. SAK EP (Entitas Privat) menggantikan SAK ETAP dengan beberapa penyesuaian pada instrumen keuangan.

PT. BPR Chandra Muktiartha menggunakan prinsip penyesuaian tersebut dengan metode retrospektif yaitu dari dimulainya periode praktis paling awal. Oleh karena itu, entitas mengabaikan porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal berlakunya SAK EP.

	2024	Penyesuaian/ Reklasifikasi		2024
Akun	SAK ETAP	D	K	SAK EP
PBYAD	3.362.476.947		3.362.476.947	-
Aset Lain-Lain-PBYAD		3.362.476.947		3.362.476.947
Provisi	(1.196.271.786)	1.196.271.786		1.196.271.786
Biaya Transaksi	186.517.855		186.517.855	-
PBYD	(2.838.937.776)	2.838.937.776		-
KYD		186.517.855	4.035.209.562	(3.848.691.707)
PPKA ABA	(123.512.497)	123.512.497		
CKPN ABA			123.512.497	(123.512.497)
PPKA KYD	(13.700.847.547)	13.700.847.547		-
CKPN KYD			13.700.847.547	(13.700.847.547)
Utang Bunga	972.256.822	972.256.822		-
Utang Pajak	472.644.182	472.644.182		-
Liabilitas Lain			1.444.901.004	1.444.901.004
Beban PPKA	3.488.162.875		3.488.162.875	-
Beban CKPN		3.488.162.875		3.488.162.875
				-
Total		26.341.628.288	26.341.628.288	

LAMPIRAN

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

---

1. Perkembangan Usaha

a. Total asset

Total aset PT. BPR Chandra Muktiartha per 31 Desember 2025, mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

Total asset tahun 2025	328.977.475.569
Total asset tahun 2024	387.082.393.257
Peningkatan (Penurunan)	**-58.104.917.687**
Persentase Peningkatan (penurunan)	**-15,01%**

b. Penghimpunan Dana

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun PT. BPR Chandra Muktiartha 31 Desember 2025, yaitu deposito dan tabungan dengan rincian sebagai berikut :

	Deposito	**Tabungan**
Dana yang dihimpun tahun 2025	254.039.165.981	37.811.803.260
Dana yang dihimpun tahun 2024	317.190.710.159	34.017.322.941
Peningkatan (Penurunan)	**(63.151.544.178)**	**3.794.480.319**
Persentase Peningkatan (penurunan)	**-19,91%**	**11,15%**

c. Pemberian kredit

Jumlah pinjaman yang diberikan PT. BPR Chandra Muktiartha 31 Desember 2025, mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut :

Kredit yang diberikan tahun 2025	250.915.632.931
Kredit yang diberikan tahun 2024	333.530.803.590
Peningkatan (Penurunan)	**-82.615.170.659**
Persentase Peningkatan (penurunan)	**-24,77%**

2. Analisa Likuiditas

a. Cash Ratio

Alat Likuid	
Kas	650.803.500
Penempatan pada bank lain (giro dan tabungan, dikurangi tabungan bank lain)	24.569.599.072
Jumlah	**25.220.402.572**
Hutang Lancar	
Liabilitas segera dibayar	943.830.664
Tabungan	37.811.803.260
Deposito berjangka	254.039.165.981
Jumlah	**292.794.799.905**
Cash Ratio	**8,61%**

b. Rasio total kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (*Loan to Deposit Ratio*)

Loan	
Jumlah kredit yang diberikan	250.915.632.931
Deposit	
Simpanan pihak ketiga (non bank)	
Tabungan	37.811.803.260
Deposito berjangka	254.039.165.981
Jumlah	**291.850.969.241**
Loan to deposit Ratio	**85,97%**

3. a. Rasio Rentabilitas

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Beban operasional		41.131.374.987
Pendapatan operasional		43.102.365.651
BOPO		**95,43%**

b. Batas maksimum pemberian kredit

Modal inti		26.710.394.791
Modal pelengkap		630.491.217
Jumlah Modal		**27.340.886.008**
Pihak terkait (10%)		2.734.088.601
Pihak tidak terkait (20) %		5.468.177.202

c. Return On Asset (ROA)

Rata-Rata Aset		**370.010.825.298**
Laba Sebelum Pajak		**1.987.497.017**
Return On Asset (ROA)		**0,54%**

d. Perhitungan NIM *(Net Interest Margin)*

NIM		**3,60%**

e. Rasio CKPN Kredit terhadap PPKA

CKPN	9.504.685.642	**61%**
PPKA	15.468.581.239	

f. NON PERFORMING LOAN(NPL)/KREDIT NON LANCAR :

RINCIAN NPL:	
Kurang Lancar	8.681.133.519
Diragukan	10.378.586.801
Macet	81.720.500.009
Jumlah NPL Gross	100.780.220.328
OUTSTANDING KREDIT/KREDIT YG DIBERIKAN(Gross)	248.101.547.099
RASIO NPL	
Gross	**40,62%**
Net	**34,63%**

INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

Yogyakarta, 02 April 2026

Laporan nomor : 00098A/2.1358/0906-3/ATH/IV/2026

Hal : *Management Letter*

Kepada Yth

Dewan Komisaris dan Direksi

PT. BPR Chandra Muktiartha

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan PT. BPR Chandra Muktiartha tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami No: 00098/2.1358/AU.8/07/0906-3/1/IV/2026 pada tanggal 02 April 2026.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas Laporan Keuangan PT. BPR Chandra Muktiartha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kami melakukan pemahaman atas pengendalian internal, pengujian kewajaran pembukuan, dan penilaian operasi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Struktur pengendalian internal, kewajaran pembukuan, dan pelaksanaan operasi tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Dari pemahaman tersebut, kami menemukan permasalahan yang kami pandang merupakan kondisi yang perlu diperhatikan. Kondisi yang dilaporkan dalam lampiran *management letter* mencakup permasalahan yang kami temukan, kekurangan dalam rancangan dan pelaksanaan struktur pengendalian internal, pembukuan, dan operasi yang menurut pendapat kami masih perlu ditingkatkan ke depannya. .

Surat *management letter* ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada Dewan Komisaris, Manajemen, dan bukan untuk disajikan pada pihak-pihak yang tidak berkompeten di luar PT. BPR Chandra Muktiartha. Hal ini untuk mencegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian intern dan evaluasi serta tes yang kami lakukan atas pengendalian intern tersebut.

KAP Indarto Dan Yudhika
Managing Partner

Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
MRAP. AP.0906

Kantor : Jl. Tegalsari Raya No: 14, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198
Telp/Fax: (0274) 2841679, Email: kap.iy.pst@gmail.com; kap.iy.ind@gmail.com; kap.iy.yud@gmail.com

Adapun rincian temuan dan rekomendasi PT. BPR Chandra Muktiartha adalah sebagai berikut:

1. KEKOSONGAN JABATAN DIREKTUR UTAMA

Kondisi (Temuan): Berdasarkan penelaahan terhadap akta susunan pengurus dan dokumen kepegawaian selama periode audit tahun 2025, kami menemukan bahwa saat ini belum terdapat pejabat definitif yang menduduki posisi Direktur Utama. Operasional BPR saat ini hanya dijalankan oleh anggota Direksi yang tersisa/pelaksana tugas.

Kriteria:

1. **POJK Nomor 7 Tahun 2024** tentang Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 44 menyebutkan bahwa jumlah anggota Direksi BPR paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya wajib diangkat sebagai Direktur Utama.
2. **POJK Nomor 4 Tahun 2024** (atau peraturan Tata Kelola BPR terbaru yang relevan) mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, yang mewajibkan keutuhan susunan pengurus untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis yang independen dan efektif.

Akibat (Risiko):

1. **Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*):** BPR melanggar ketentuan OJK yang dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif, penurunan tingkat kesehatan bank (faktor Tata Kelola/GCG), hingga pembatasan kegiatan usaha oleh OJK.
2. **Risiko Operasional & Strategis:** Terhambatnya pengambilan keputusan strategis yang membutuhkan otorisasi Direktur Utama.

Rekomendasi: Kami merekomendasikan agar Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk calon Direktur Utama. Selanjutnya, segera ajukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada OJK agar kekosongan jabatan ini dapat segera diakhiri.

Tanggapan:

Manajemen memahami dan sependapat dengan temuan yang disampaikan terkait belum terisinya posisi Direktur Utama secara definitif. Kondisi ini terjadi karena proses penjaringan dan penetapan calon Direktur Utama memerlukan kehati-hatian, termasuk mempertimbangkan kriteria kompetensi, integritas, serta pemenuhan persyaratan regulator. Sebagai langkah mitigasi sementara, operasional BPR tetap berjalan di bawah koordinasi Direksi yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

2. MASIH TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN FORMAT LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAK EP DAN PA BPR

Kondisi (Temuan): Berdasarkan hasil reviu atas draf Laporan Keuangan BPR tahun 2025, kami menemukan bahwa:

1. Penamaan beberapa akun (*Chart of Accounts* / COA) belum dimutakhirkan.

2. Penyajian Laporan Arus Kas masih menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) atau belum diklasifikasikan dengan tepat.

Kriteria:

1. **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)** yang telah berlaku efektif secara mandatori per 1 Januari 2025. SAK EP mensyaratkan entitas (termasuk BPR) untuk menyajikan Laporan Arus Kas, di mana untuk aktivitas operasi dianjurkan menggunakan metode langsung (*direct method*).
2. **Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR)** terbaru yang merujuk pada SAK EP, yang telah menetapkan standar tata nama akun (COA), pengakuan, dan penyajian laporan keuangan khusus untuk industri BPR.

Akibat (Risiko):

1. Laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan dengan standar industri dan tidak sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia untuk BPR.
2. Terdapat potensi salah saji (reklasifikasi) yang signifikan, yang jika tidak diperbaiki, dapat memengaruhi opini auditor (Opini Wajar Dengan Pengecualian).
3. Terhambatnya proses pelaporan ke sistem pelaporan OJK karena ketidakcocokan *mapping* COA.

Rekomendasi:

1. Manajemen harus segera melakukan pemetaan ulang (*re-mapping*) COA pada *Core Banking System* (CBS) BPR agar selaras dengan PA BPR yang berbasis SAK EP.
2. Mengubah penyajian Laporan Arus Kas untuk aktivitas operasi menjadi metode arus kas langsung (*direct method*) dengan merinci penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto (misal: kas diterima dari nasabah, kas dibayarkan untuk bunga, kas dibayarkan untuk beban pegawai, dll).

Tanggapan:

Sependapat dengan temuan terkait belum dimutakhirkannya penamaan akun (Chart of Accounts/COA) serta penyajian Laporan Arus Kas yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) terbaru dan akan menindaklanjuti rekomendasi terkait.

3. KEWAJIBAN PENDAFTARAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) TERKAIT PENJUALAN AYDA/ASET TETAP

Kondisi (Temuan): Berdasarkan Laporan Laba Rugi BPR tahun 2025, total peredaran bruto (omset/pendapatan operasional) BPR telah melebihi Rp 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah). Namun, hingga saat audit ini dilakukan, BPR belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Di sisi lain, hal ini diperlukan untuk menghindari risiko temuan pajak apabila terdapat transaksi penjualan AYDA maupun asset.

Kriteria:

1. **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023** tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (sebagai pembaruan batasan Pengusaha Kecil), mewajibkan pengusaha yang memiliki

peredaran bruto melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 tahun buku untuk melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai PKP. (Meskipun jasa perbankan sebagian besar dikecualikan dari PPN, BPR tetap wajib PKP jika omset total melebihi *threshold*).

2. **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023** tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. Aturan ini menegaskan bahwa penjualan AYDA oleh Bank/Lembaga Keuangan terutang PPN (umumnya menggunakan besaran tertentu yang dipungut dan disetorkan oleh Kreditur).

Akibat (Risiko):

1. Jika BPR melakukan penjualan AYDA atau Aset Tetap (inventaris/kendaraan) namun belum menjadi PKP, BPR tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.
2. Risiko pemeriksaan pajak yang dapat berujung pada sanksi administratif dan denda bunga dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Pajak Keluaran (PPN) yang tidak dipungut/disetorkan sejak saat BPR seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.

Rekomendasi:

1. BPR harus segera mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat BPR terdaftar.
2. Menyiapkan sistem dan administrator untuk aplikasi *e-Faktur*.
3. Manajemen harus membuat SOP Perpajakan khusus terkait skema penjualan AYDA dan Penjualan Aset Tetap, untuk memastikan pungutan PPN sebesar tarif yang ditentukan regulasi (sesuai PMK 41/2023) dipotong dari hasil penjualan lelang/bawah tangan dan disetorkan ke Kas Negara secara tepat waktu.

Tanggapan:

Sependapat dengan KAP dan mempertimbangkan untuk pembuatan PKP.